



UNIVERSITAS INDONESIA

Pengelompokan Sikap Masyarakat Mengenai Campur Tangan Negara  
Terhadap Isu Kontroversial Poligami

Thesis

Yuli Anggraini

0806440835

---

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ilmu Komunikasi

Jakarta

Desember, 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

Pengelompokan Sikap Masyarakat Mengenai Campur Tangan Negara  
Terhadap Isu Kontroversial Poligami

Thesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M, Si)  
dalam Ilmu Komunikasi

Yuli Anggraini

0806440835

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ilmu Komunikasi

Manajemen Komunikasi Politik

Jakarta

Desember, 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Yuli Anggraini  
NPM : 0806440835  
Program Studi : Manajemen Komunikasi Politik  
Judul Tesis : Pengelompokan Sikap Masyarakat Mengenai Campur Tangan  
Negara Terhadap Isu Kontroversi Poligami

Telah Berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi pada Program Studi Manajemen Komunikasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

DR. Pinckey Triputra. M.Sc

(  )


Sekretaris Sidang

Ir. Firman Kurniawan. M.Si

(  )

Pembimbing

Ir. Bestian Nainggolan. M.Si

(  )

Penguji Ahli

Drs. Eduard Lukman. MA

(  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Desember 2010

## KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang karena akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Proses pembuatan tesis ini -dari penemuan ide sampai penulisan- bagi penulis adalah sebuah perjalanan panjang dimana penulis merasakan bagaimana beratnya menempuh pendidikan guna memperoleh ilmu. Ide untuk menyusun tesis dengan tema " Sikap Masyarakat terhadap Campur Tangan Negara dalam Poligami", saya dapatkan akhir semester tiga setelah membaca jurnal komunikasi karya Jennifer L. Lambe dan Jason B. Reineke. Tulisan Lambe dan Reineke memberikan inspirasi kepada saya untuk menelaah poligami dari perspektif yang berbeda. Kajian poligami selama ini selalu identik dengan agama dan kekerasan terhadap perempuan.

Keterbatasan waktu memang menjadi semacam rintangan yang cukup berat dalam penyusunan tesis ini, namun dengan segala keterbatasan tesis ini dapat diselesaikan, tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak. Atas bantuan tersebut sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih pertama ditujukan kepada Ir. Bestian Nainggolan, M,si yang ditengah kesibukannya tetap bersedia dengan tekun membimbing penulis dalam penulisan tesis ini. Rasa terima kasih yang dalam penulis hanturkan juga kepada Alm. Prof Dedy N Hidayat, Phd, Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi yang sempat memberikan pengarahan dan penjelasan mengenai langkah-langkah pembuatan tesis. Ucapan yang serupa juga kepada Ketua Jurusan Manajemen Komunikasi Politik Effendy Ghazali, Phd yang telah memberikan jurnal Lambe dan Reineke yang menginspirasi penulisan tesis ini. Rasa terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Eduward Lukman selaku sekretaris program pascasarjana Ilmu Komunikasi, Bapak DR. Pickey Triputra dan Ir. Firman Kurniawan selaku penguji tesis ini.

Rasa terima kasih tidak terhingga kepada seluruh responden penelitian ini, yang memberikan waktu untuk membaca dan mengisi kuesioner penelitian ini. Ucapan yang sama untuk Tim lapangan, anak-anak Universitas Indonesia dari berbagai fakultas, Puti,

Anita, Angga, Riska, Luluk, Ayu, Bayu, Supri dan Nabila yang telah membantu penulis mendapatkan data dari responden di tengah-tengah Ramadhan yang panas.

Untuk kawan-kawan Pascasarjana Ilmu Komunikasi khususnya kelas Manajemen Komunikasi Politik angkatan 2008 yakni saudara Reinanda, Heryadi, Doddy, Retno, Wiwien, Idi Subandi, Aiman, Ian dan banyak lagi yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Khusus untuk Heryadi dan Reinanda terima kasih layak saya gandakan karena mereka dua sahabat terbaik saya dalam memberikan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada para dosen antara lain Bapak Prof. Alwi Dahlan, Prof Aloys Nugroho, Prof Maswadi Rauf, Eep Saifullah Fatah, Prof Harsono Suwardi, Dr Billy K Sarwono, Prof Ikrar Nusa Bakti beserta staf pengajar telah membantu saya dalam menempuh jenjang pendidikan ini.

Tidak terlupakan penulis mengucapkan terimakasih mendalam kepada keluarga penulis. Untuk suami tercinta, Hendra Setyawan yang memberikan dorongan agar penulis melanjutkan studi dan menunjukkan kesabaran yang luar biasa membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Untuk, Afka Ramadhan Putra, Bunda ucapkan terima kasih banyak karena begitu pengertian dengan keadaan Bunda, terima kasih sayang serta mama yang selalu mendoakan penulis. Kata terima kasih juga penulis ucapkan untuk Aba dan tante yang selalu setia memberikan pengarahan dan pengertian tentang waktu.

Akhirnya penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini

Rempoa, 8 Desember 2010

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Anggraini  
NPM : 0806440835  
Program Studi : Manajemen Komunikasi Politik  
Departemen : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Sikap Masyarakat terhadap Campur Tangan Negara dalam Poligami

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Rempoa  
Pada Tanggal : 9 Desember 2010  
Yang menyatakan

  
( Yuli Anggraini)

## ABSTRAK

Nama : Yuli Anggraini  
Program Studi : Manajemen Komunikasi Politik  
Judul : Pengelompokan Sikap Masyarakat mengenai Campur Tangan Negara terhadap Isu Kontroversial Poligami

Tesis ini membahas mengenai pengelompokan sikap masyarakat mengenai campur tangan negara dalam masalah poligami. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksploratif. Menggunakan Teori Lambe dan Reineke. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah terbentuknya tiga pengelompokan sikap masyarakat berdasarkan kemiripan karakteristik sosial-ekonomi yang melekat pada individu. Ketiga kelompok tersebut yaitu kelompok protector yang menginginkan jaminan kebebasan dalam berpoligami, kelompok censorship yang menginginkan poligami dilarang dan kelompok allowers yang menginginkan pemerintah tidak ikut campur dalam masalah poligami. Jenis kelamin merupakan faktor signifikan yang membedakan pembentukan setiap kelompok.



## ABSTRACT

Name : Yuli Anggraini  
Study Program : Management of political communication  
Title : The Grouping of Public Attitudes about State Interference in the  
Controversial Issue of Polygamy

This thesis discusses the grouping of public attitudes about state interference in the issue of polygamy. The study was a quantitative study with exploratory design. Using the theory of Lambe and Reineke. Findings obtained from this research is the formation of three groupings of public attitudes based on similarities socioeconomic characteristics inherent in individuals. Three groups: the group protector who want guarantees of freedom in polygamy, a group that wants polygamy banned censorship and allows groups who wanted the government not to interfere in the matter of polygamy. Gender is a significant factor that distinguishes the formation of each group.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR GRAFIK .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Signifikansi Penelitian .....	10
2. Kerangka Konseptual .....	12
2.1 Posisi dan Peran Negara serta Masyarakat dalam demokrasi .....	12
2.2 Kecenderungan individu terhadap persetujuan campur tangan negara .....	13
2.3 Kontroversi poligami dan campur tangan negara .....	17
2.4 Hipotesis .....	27
3. Metodologi .....	29
3.1 Paradigma Penelitian .....	29
3.2 Metode Penelitian .....	29
3.2.1 Obyek Penelitian .....	30
3.2.2 Populasi Penelitian .....	30
3.2.3 Sampel Penelitian .....	30
3.3 Teknik Penelitian .....	34
3.4 Teknik Analisis Data .....	34
3.5 Defenisi konsep dan operasionalisasi konsep .....	35
3.6 Rumusan Hipotesis .....	41
3.7 Validitas dan realibitas .....	42
3.8 Kelebihan dan kelemahan penelitian .....	43
4. Analisis data .....	45
5. Interpretasi data .....	85
6. Kesimpulan dan rekomendasi .....	97
DAFTAR REFERENSI .....	101

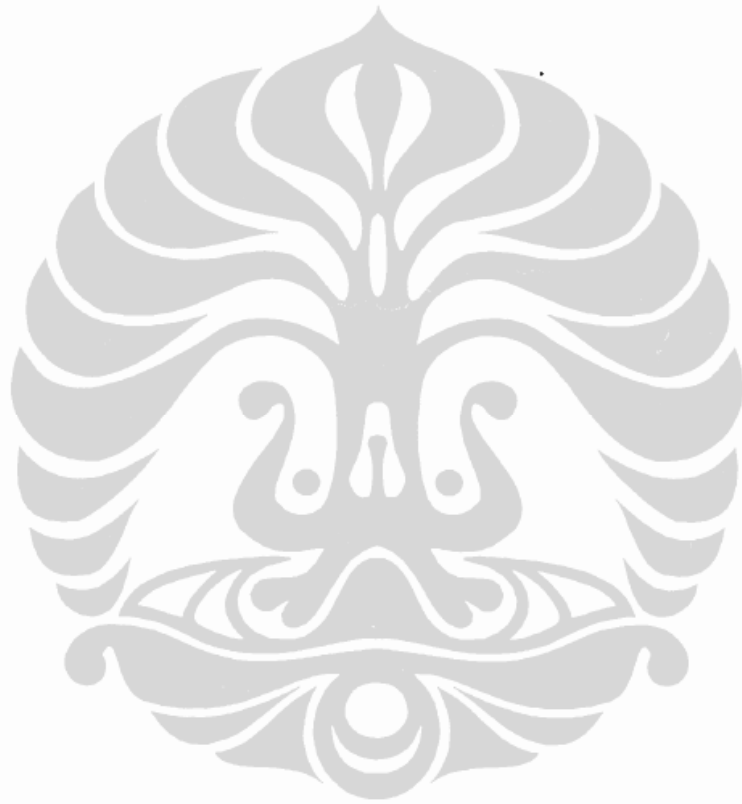
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Reaksi pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat terhadap kemunculan isu poligami .....	4
Tabel 3.1 Perbandingan hasil pemilihan presiden tingkat DKI Jakarta dan Kebayoran Lama .....	31
Tabel 3.2 Jumlah sampel dan wilayah RT di kecamatan Kebayoran Lama yang terpilih .....	33
Tabel 3.5 Konsep, dimensi dan indikator penelitian .....	40
Tabel 3.7 Hasil pengujian realibitas (homogenitas) berbagai indikator penelitian .....	43
Tabel 4.1.1 Jenis Kelamin Responden .....	46
Tabel 4.1.2 Agama Responden .....	47
Tabel 4.1.3 Usia Responden .....	48
Tabel 4.1.4 Pendidikan Responden .....	49
Tabel 4.1.5 Klasifikasi Pendidikan Responden .....	50
Tabel 4.1.6 Pekerjaan Responden .....	51
Tabel 4.1.7 Klasifikasi Pekerjaan Responden .....	52
Tabel 4.1.8 Status Pernikahan Responden .....	53
Tabel 4.1.9 Klasifikasi Status Pernikahan Responden .....	54
Tabel 4.1.10 Pola Konsumsi Informasi media cetak .....	55
Tabel 4.1.11 Pola Konsumsi Informasi media elektronik .....	56
Tabel 4.1.12 Intensitas membaca isu poligami .....	58
Tabel 4.1.13 Intensitas mendengar dan menonton isu poligami .....	59



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1. Konsepsi Skematik Rosenberg dan Hovland tentang sikap ..... 25  
dan skema pengelompokan sikap masyarakat Lambe dan  
Reineke dalam isu kontroversi ( Poligami)



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.2.1	Proposi dan frekuensi keanggotaan tiga kelompok .....	61
Grafik 4.2.2	Perbedaan karakteristik jenis kelamin responden berdasarkan klaster yang terbentuk .....	62
Grafik 4.2.3	Perbedaan karakteristik agama responden berdasarkan klaster yang terbentuk .....	64
Grafik 4.2.4	Perbedaan karakteristik usia responden berdasarkan klaster yang terbentuk .....	65
Grafik 4.2.5	Perbedaan karakteristik pendidikan responden berdasarkan klaster yang terbentuk .....	66
Grafik 4.2.6	Perbedaan karakteristik pekerjaan responden berdasarkan klaster yang terbentuk .....	68
Grafik 4.2.7	Perbedaan karakteristik status pernikahan responden berdasarkan klaster yang terbentuk .....	69
Grafik 4.2.8	Ciri khas identitas Responden di Klaster I .....	70
Grafik 4.2.9	Ciri khas identitas Responden di Klaster II .....	71
Grafik 4.2.10	Ciri khas identitas Responden di Klaster III .....	72
Grafik 4.2.11	Perbedaan karakteristik kebiasaan responden dalam mengkonsumsi media berdasarkan klaster yang terbentuk .....	73
Grafik 4.2.12	Perbedaan karakteristik dalam hal intensitas membaca mendengar dan menonton isu poligami di media .....	74
Grafik 4.2.13	Perbedaan Tingkat Pemahaman Responden Mengenai Poligami Berdasarkan Klaster yang Terbentuk .....	75
Grafik 4.2.14	Perbedaan Sikap Responden Terhadap Poligami Berdasarkan Kelompok yang Terbentuk .....	76
Grafik 4.2.15	Perbedaan Sikap Responden Terhadap Larangan Poligami Berdasarkan Klaster yang Terbentuk .....	77
Grafik 4.2.16	Perbedaan Sikap Responden Terhadap Sanksi bagi Pelaku Poligami Berdasarkan Klaster yang Terbentuk .....	78

Grafik 4.2.17 Perbedaan Sikap Responden mengenai Campur Tangan Pemerintah dalam Poligami Berdasarkan Klaster yang Terbentuk .....	79
Grafik 4.2.18 Ciri Khas Penyikapan Responden di Klaster I .....	81
Grafik 4.2.19 Ciri Khas Penyikapan Responden di Klaster II .....	82
Grafik 4.2.20 Ciri Khas Penyikapan Responden di Klaster III .....	83



## DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner

Tabel Frekuensi hasil analisis SPSS



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Dapat atau tidaknya seorang laki-laki memiliki pasangan hidup sah lebih dari satu perempuan (poligami) telah menjadi persoalan kontroversial di negeri ini, yang melibatkan negara maupun berbagai komponen masyarakat. Tidak hanya itu, setiap kemunculan persoalan poligami ini selalu pula diikuti perdebatan panjang antara kelompok yang mendukung dan yang menentang terhadap penerapan sistem tersebut. Begitu banyak persoalan-persoalan yang menyangkut poligami diperdebatkan.

Menelusuri persoalan poligami, perdebatan mengenai praktek poligami di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum bangsa ini merdeka. Beberapa wanita yang hidup sebelum kemerdekaan mulai menyadari dampak praktek perkawinan dimasa itu, sebut saja R.A Kartini, yang melihat poligami dan perkawinan paksa dapat menimbulkan kesengsaraan bagi perempuan yang menjalaninya. Kartini kala itu berhasil mendokumentasikan penderitaan dirinya di bawah tradisi poligami. Terlahir sebagai bangsawan Jawa, Kartini tidak dapat menghindari tradisi turun temurun untuk menikah dengan darah bangsawan yang memiliki isteri banyak. Perdebatan era Kartini terhadap poligami memang tidak dilakukan secara terbuka dan terorganisir. Apa yang dirasakan Kartini lebih kepada pergulatan bathin yang tertulis dalam surat-suratnya yang ditujukan untuk para sahabatnya. ( Arbaningsih, 2005).

Perdebatan terbuka mengenai praktek poligami dimulai tahun 1920-an, beberapa organisasi perempuan melihat apa yang terjadi dalam praktek perkawinan kala itu sangat merugikan perempuan. Melihat fenomena ini pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa saat itu mengedarkan rancangan Ordonansie perkawinan tercatat. Isinya antara lain mengenai larangan poligami, perceraian melalui keputusan hakim, dan sokongan kepada perempuan yang dicerai dan anak-anak. Ordonansi ini memang tidak dimaksudkan untuk penduduk pada umumnya, tapi hanya bagi orang Indonesia yang sukarela tunduk pada ordonansi tersebut. Artinya tidak ada keharusan bagi seseorang

untuk mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil. Tetapi rancangan ini kemudian mendapat tantangan keras terutama dari kalangan Islam (Suryochondro, 1984)

Perdebatan mengenai poligami juga terjadi setelah kemerdekaan. Pandangan Soekarno mengenai poligami banyak ditentang oleh organisasi perempuan dan diperdebatkan secara terbuka dan terang-terangan. Berbeda ketika pemerintahan Soeharto, rezim otoriter ini menenggelamkan polemik poligami yang berkembang ratusan tahun di Indonesia. Namun, poligami kembali menjadi perbincangan hangat setelah pemerintahan Soeharto jatuh.

Munculnya persoalan-persoalan yang menyangkut praktek poligami ke permukaan masyarakat, menjadi salah satu faktor timbulnya kontroversi poligami. Selama 12 tahun ini setidaknya ada 10 persoalan poligami yang menimbulkan perbincangan hangat di masyarakat. Isu-isu poligami yang muncul berkaitan erat dengan pejabat negara, pemuka agama dan selebritis. Persoalan poligami lain yang juga menuai pro dan kontra beberapa waktu lalu adalah pendirian Klub Poligami di Bandung Oktober 2009 silam. Pendirian Klub cabang Malaysia ini menyulut beragam reaksi. Deklarasi terbuka para pelaku poligami ini mendapatkan reaksi keras dari beberapa organisasi perempuan, sebut saja Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Institut Perempuan. LSM Perempuan ini menilai pendirian klub poligami di Bandung sangat menyakitkan hati perempuan dan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya itu, reaksi keras juga datang dari Majelis Ulama Indonesia Bandung. MUI kota Bandung sangat mengecam pendirian klub poligami dan beranggapan walaupun poligami tidak dilarang secara agama pendirian klub poligami sangat meresahkan masyarakat.

Persoalan poligami memang telah berurat akar. Praktek poligami telah berkembang subur sejak ratusan tahun lalu. Seorang kaisar Cina dari sebuah dinasti yang hidup di daratan Cina ribuan tahun lalu bahkan memiliki isteri lebih dari 30.000 ribu perempuan. Menelusuri persoalan praktik poligami sendiri di negeri ini membuktikan bahwa praktik perkawinan semacam ini telah diketanui berlangsung sejak

masa lampau. Bahkan, praktek seorang laki-laki beristrikan lebih dari satu telah ditemui sejak zaman kerajaan, sebelum terbentuknya negara ini. Diketahui, praktik poligami sudah subur di era kerajaan-kerajaan Hindu. Setelah kerajaan Hindu hancur, tradisi praktik beristri banyak tersebut berlanjut pada zaman kedatangan Islam dan mendapatkan legitimasi melalui ajaran Islam (Suara Rahima, 2007).

Islam memang tidak melarang poligami, bahkan praktek perkawinan dengan isteri lebih dari satu diizinkan dalam Al-Quran. Dalam pandangan Islam sendiri hingga saat ini terdapat perbedaan penafsiran Ayat Alquran terkait tradisi memiliki isteri lebih dari satu perempuan dalam waktu bersamaan. Sebagian Ulama berpendapat perilaku Nabi Muhammad berpoligami lebih dikarenakan kondisi sosial saat itu. Situasi perang melahirkan ribuan isteri yang kehilangan suami dan ribuan anak kehilangan ayah. Hal inilah yang mendorong Nabi Muhammad menikah lagi. Kondisi sosial saat itu dan beberapa syarat berat yang mengikutinya menurut sebagian ulama, praktek berpoligami sebaiknya dihindari. Bagi sebagian kalangan yang lain melihat poligami merupakan Sunnah Nabi, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Nabi dan sangat dianjurkan untuk diikuti. Perbedaan pemahaman dan penafsiran inilah yang membuat poligami juga menuai pro dan kontra dalam Islam.

Di negara-negara yang bermayoritaskan Muslim, aturan mengenai poligami juga berbeda-beda. Di Malaysia poligami diperbolehkan sejak tahun 1980. Menurut data statistik pemerintah Malaysia, dalam kurun waktu tahun 1995-2004 tercatat 13.516 pernikahan poligami, yang berarti 1,4% dari jumlah pernikahan Muslim yang ada (Suara Rahima, 2007). Tidak berbeda dengan Malaysia, Republik federal Nigeria yang setengah dari populasi penduduknya merupakan Muslim juga mengizinkan poligami dengan batasan memiliki isteri empat orang seperti yang tertera dalam Alquran, kenyataannya banyak penduduk Nigeria memiliki isteri lebih dari empat perempuan.

Hal ini berbeda dengan apa yang berlaku di Tunisia. Tunisia menjadi negara kedua setelah Turki yang melarang poligami. Larangan poligami resmi keluar pada tahun 1956, Presiden Tunisia Bourguiba ditahun yang sama mensahkan undang-undang (UU) keluarga yang melarang poligami. Tunisia adalah negara Islam yang konstitusinya

berdasarkan Syari'at Islam, Presiden Tunisia saat itu Bourguiba melihat poligami yang dipraktekkan umat Islam sekarang bertentangan dengan perilaku Nabi dahulu. Poligami umat Islam menurutnya sudah mencapai tahap *crime against humanity* (pelanggaran terhadap kemanusiaan), hal inilah yang mendorong Presiden Tunisia kala itu mengeluarkan aturan melarang poligami di Tunisia.

Undang-undang Keluarga negara Islam lainnya, seperti Mesir, Syria, dan Marokko meskipun tidak seketat Tunisia juga sangat membatasi poligami sebagai bentuk proteksi negara terhadap warganya yang rentan, yakni para anak dan isteri. Negara lainnya yang secara resmi menghapus poligami adalah Turki. Turki menghapuskan poligami lebih dari 1 abad lalu. Keinginan bangsa ini masuk dalam Uni Eropa membuat Turki mengilegalkan praktek poligami. Pada Kenyataanya praktek ini sulit dihapuskan khususnya didaerah-daerah terpencil, daerah yang berbatasan langsung dengan Irak dan Suriah. Daerah-daerah dimana tradisi dan adat istiadat Kurdi masih dilakukan.

Di Indonesia sendiri campur tangan negara dalam masalah ekspresif seperti poligami ini juga selalu menimbulkan pro dan kontra baik di tubuh pemerintah sendiri maupun di berbagai elemen masyarakat. Penelusuran terhadap berbagai literatur berikut ini menunjukkan perdebatan tersebut. Tampak jelas, betapa ambigunya negara maupun kelompok masyarakat dalam menyikapi persoalan ini. Semua ini terlihat sejak dari zaman kolonial Belanda, campur tangan pemerintah dalam isu kontroversial seperti poligami menimbulkan penyikapan yang saling bertentangan seperti terlihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 1.1. Reaksi Pemerintah dan Berbagai Kelompok Masyarakat terhadap Kemunculan Isu Poligami

Era Pemerintahan	Isu	Aturan Poligami	Reaksi Pemerintah	Reaksi Masyarakat



Zaman Belanda	Sistem perkawinan yang merugikan perempuan seperti kawin paksa, di bawah umur dan poligami	Rancangan Ordonansi Pecat Perkawinan. Indonesia menganut sistem monogami	Mendukung	Reaksi penolakan dari organisasi perempuan berafaskan Islam seperti Fatayat NU dan Masyumi
Soekarno	Memberikan tunjangan 2 kali lipat bagi pelaku poligami yang bekerja di pemerintahan	Kepres No 19 tahun 1952	Sikap pemerintah terpecah. Fraksi Masyumi dan NU mendukung. Fraksi Kristen dan sekuler menolak	Masyarakat yang beraliansi politik dengan Masyumi dan NU mendukung langkah Soekarno, sebaliknya kelompok masyarakat pengikut partai sekuler dan Kristen menolak keputusan Presiden Soekarno saat itu
Soeharto	Maraknya pernikahan siri pejabat dan PNS	UU Perkawinan tahun 1974 dan PP no 10 tahun 1983. Memperketat aturan poligami bagi PNS	UU perkawinan disetujui semua fraksi tidak terkecuali PPP. Begitu juga dengan PP no 10 tahun 1983, pemerintah tidak menolak kehadiran peraturan tersebut	Masyarakat cenderung menerima peraturan yang dikeluarkan pada era ini. Sistem pemerintahan yang otoliter berpengaruh pada kebebasan menyatakan pendapat individu.
Abdurrahman Wahid	Poligami tidak dilarang agama dan merupakan HAM	Rencana Revisi UU Perkawinan dan penghapusan PP no 10 tahun 1983. Mengizinkan poligami	Sikap pemerintah terpecah. Perpecahan itu terlihat di tubuh parlemen. Sebagian fraksi mendukung langkah menteri pemberdayaan perempuan tetapi sebagian lagi menolak.	Penolakan keras datang dari beberapa organisasi perempuan dan kaum perempuan Indonesia.
Susilo Bambang Yudhoyono	Pernikahan kedua Aa Gym	Rencana perluasan larangan poligami	Sikap pemerintah terpecah, revisi tidak pernah dilaksanakan	Sikap masyarakat terpecah: mendukung, menolak dan menginginkan pemerintah tidak ikut

				campur
--	--	--	--	--------

Tabel di atas menunjukkan bahwa baik di level negara, yakni pemerintah yang membuat kebijakan, maupun di level kelompok masyarakat khususnya kelompok kepentingan seperti organisasi perempuan, tidak tampak kesolidan dalam menyikapi persoalan yang terkait dengan poligami. Dengan perkataan lain, terjadi pengelompokan penyikapan terhadap persoalan ini baik di kalangan para pemangku kekuasaan maupun kalangan masyarakat. Organisasi perempuan di Indonesia memiliki *willingness to censorship* yang tinggi. Beberapa organisasi ini menuntut pemerintah ambil bagian dalam masalah ini dengan mengeluarkan aturan yang jelas mengenai pelarangan poligami.

Poligami menurut pandangan beberapa organisasi perempuan sejalan dengan penilaian Siti Musdah Mulia dalam bukunya *Islam Mengungkat Poligami (2007)*, yang melihat poligami merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga faktor: Pertama, lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-undang Perkawinan. Kedua, masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak; dan ketiga, kuatnya interpretasi agama yang bias jender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memposisikan isteri hanya sebagai obyek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Realitas sosiologis di masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam

Pada sisi lain, di tengah perdebatan panjang persoalan poligami, saat ini fenomena semakin terbukanya ekspresi para pelaku poligami itu sendiri kepada publik untuk menunjukkan bahwa mereka berpoligami semakin mencolok. Menariknya, pengakuan para pelaku poligami tidak hanya dilakukan dari mereka yang berlatar belakang artis yang kerap menjadi bahan pemberitaan media massa, namun kini tokoh penting publik seperti pimpinan partai politik, ataupun salah satu pejabat menteri di negeri ini secara terbuka menyatakan status poligaminya itu. Munculnya pelaku

poligami yang notabene merupakan para pejabat negara dalam wacana publik, kembali memunculkan perdebatan.

Tidak sedikit elemen masyarakat yang meminta negara agar lebih jelas mengambil langkah bagi praktek perkawinan dengan sistem poligami. Pelarangan yang diinginkan pun beragam, mulai dari hal yang paling ringan seperti tampil di depan publik hingga pelarangan melalui Undang-Undang. Larangan paling keras datang dari organisasi perempuan, mereka menuntut revisi Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Bahkan draf baru revisi UU tersebut telah disiapkan yang masing-masing dibuat oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kowani, dan LBH-Apik. Ketiga elemen ini menolak poligami, setidaknya memperketat poligami, dengan argumentasi yang sama, yaitu poligami merupakan bentuk subordinasi laki-laki terhadap perempuan karena semata-mata didasarkan pada superioritas dan kepentingan laki-laki.

Pada pandangan lain, terdapat juga kelompok masyarakat yang mempunyai sikap berseberangan. Mereka menginginkan negara melihat poligami sebagai perilaku yang tidak dilarang sebagaimana agama khususnya Islam yang tidak melarang praktik poligami. Dengan demikian, perdebatan yang terjadi kali ini seakan mengulang kembali rentetan kemunculan isu poligami yang selalu kontroversial, dan tidak terpecahkan.

Kondisi yang terjadi dan berbagai pengelompokan penyikapan terhadap persoalan poligami ini tampaknya akan terus-menerus berlangsung. Demikian pula, akan terus-menerus diperdebatkan sejauh mana urusan yang melekat dalam perilaku individu ini perlu disikapi oleh negara. Melihat kondisi persoalan semacam ini, menarik untuk dikaji variasi dan apa latar belakang yang mendasari pola-pola fragmentasi penyikapan yang terjadi di tengah masyarakat terkait campur tangan negara dengan persoalan poligami ini.

## 1.2. Perumusan Masalah

Di Indonesia poligami memang telah menjadi polemik jauh sebelum bangsa ini merdeka, polemik ini tidak hanya terbatas pada setuju atau tidak setuju dengan praktek poligami yang ada di masyarakat. Persoalan perlunya atau tidaknya penyelesaian oleh negara juga menyulut kontroversi. Secara historis campur tangan negara dalam masalah poligami terjadi apabila poligami melibatkan pejabat negara, pemuka agama dan selebritis. Isu kontroversial ini diikuti oleh sikap penolakan, pemberitaan di media massa yang berkepanjangan, aksi demonstrasi dan pernyataan terbuka masyarakat. Sederet aksi itu biasanya diikuti oleh permintaan agar pemerintah mengatur masalah poligami. Organisasi perempuan mendorong pemerintah agar membuat aturan yang sifatnya melarang poligami, sebaliknya pihak lain yang cenderung dengan poligami meminta agar pemerintah tidak mengurus masalah pribadi, khususnya perkawinan warga negaranya.

Isu kontroversial memang selalu memecah sikap masyarakat, ada sebagian masyarakat yang pro dan banyak juga masyarakat yang cenderung bersikap kontra, begitu juga dengan campur tangan negara dalam isu kontroversial biasanya ada kelompok yang mendukung langkah pemerintah ada juga kelompok yang cenderung menolak langkah pemerintah.

Di Amerika penelitian mengenai sikap masyarakat terhadap campur tangan negara dalam masalah yang bersifat kontroversial diperkenalkan oleh Jennifer L. Lambe dan Jason B Reineke. Hasil penelitian Lambe dan Reineke mengatakan keterlibatan negara dalam isu-isu yang bersifat kontroversial, akan menyebabkan pembentukan pengelompokan penyikap menjadi tiga kelompok yaitu kalangan ataupun kelompok masyarakat yang menginginkan agar pemerintah menjamin suatu kebebasan individu (*protection*), kelompok masyarakat yang menginginkan pemerintah untuk membatasi kebebasan individu (*censorship*) dan kelompok masyarakat yang justru tidak menginginkan pemerintah turut campur tangan dalam persoalan kontroversi (*allowers*).

Melihat teori Lambe dan Reineke dalam menyikapi isu kontroversial poligami, akan terpolakan tiga pengelompokan sikap dalam masyarakat yaitu kelompok *protector* (kelompok yang menginginkan pemerintah menjamin kebebasan setiap warganya dalam berpoligami), kelompok *ensorship* (kelompok yang menginginkan pemerintah melarang poligami) dan kelompok *allowers* (kelompok yang menginginkan pemerintah tidak ikut campur dalam masalah poligami)".

Pembentukan kelompok-kelompok penyikapan terhadap isu poligami ini terbentuk oleh karena adanya kesamaan-kesamaan karakteristik sosial ekonomi yang melekat di masing-masing individu. Dalam hal ini, lantaran isu poligami merupakan isu yang bersinggungan dengan eksistensi sosial kalangan perempuan ataupun laki-laki, maka karakteristik jenis kelamin individu merupakan faktor yang signifikan berperan dalam pembentukan kelompok ataupun yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dalam menyikapi perlu tidaknya campur tangan pemerintah dalam masalah kontroversial semacam poligami telah terbentuk pengelompokan penyikapan yang berbeda-beda pada anggota masyarakat?
2. Apabila terbentuk pengelompokan sikap di masyarakat dalam masalah poligami, kesamaan-kesamaan karakteristik sosial ekonomi apakah yang menjadi faktor pembentuk kelompok tersebut?
3. Secara khusus, seberapa signifikan faktor jenis kelamin responden dalam penelitian ini berperan dalam pembentukan kelompok-kelompok penyikapan terhadap persoalan poligami, yang selalu dikaitkan dengan eksistensi sosial perempuan ini?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berbagai tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menemukan ada atau tidak pengelompokan penyikapan yang terjadi pada setiap anggota masyarakat terkait dengan perlu tidaknya campur tangan negara dalam urusan kontroversial poligami.
2. Mengetahui apakah karakteristik sosial ekonomi yang terdapat dalam diri setiap anggota masyarakat akan mempengaruhi terbentuknya pengelompokan sikap mereka terkait dengan persoalan kontroversial poligami.
3. Secara khusus ingin menguji, apakah jenis kelamin individu menjadi faktor yang berperan kuat dalam pembentukan kelompok-kelompok penyikapan terhadap persoalan poligami, yang selalu dikaitkan dengan eksistensi sosial perempuan .

### 1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan signifikansi atau kebermanfaatan secara akademik maupun praktik sebagai berikut:

1. Pada tataran teoritis, kajian yang mencoba mengungkap pengelompokan penyikapan yang terbentuk dalam masyarakat ini berupaya menguji kesahian dari berbagai teori dan literatur kajian komunikasi politik, khususnya terkait dengan pengelompokan penyikapan publik terhadap campur tangan pemerintah dalam masalah-masalah yang memicu kontroversi. Beberapa kajian komunikasi dalam masalah kontroversial selama ini berkaitan erat dengan campur tangan ataupun sensor yang dilakukan pemerintah (negara) seperti kajian Chaffee, Thompson & Oshagan (1990). Dalam karyanya yang berjudul *Regulating Pornography: A Public Dilemma*. Kajian ini menggambarkan bahwa dalam masalah kontroversial seperti pornografi campur tangan negara akan

menyebabkan sikap masyarakat cenderung terpecah. Kajian ini juga diperkuat oleh Jennifer L. Lambe (2002) dalam kajiannya mengenai *The Structure of Censorship Attitudes*, kajian ini meneliti struktur sikap publik khususnya kecenderungan umum untuk mendukung tindakan pemerintah mengenai suatu permasalahan yang kontroversial. Memahami struktur sikap masyarakat penting untuk melihat bagaimana sikap mereka tentang suatu permasalahan.

2. Pada tataran praktis, karya ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi siapa saja khususnya pembuat kebijakan dalam menyikapi kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat. Pola penyikapan terhadap isu ataupun kebijakan yang bersifat kontroversial, sebagaimana yang dipaparkan dalam kajian ini pada kenyataannya akan membentuk kelompok-kelompok penyikapan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Pola pengelompokan penyikapan yang terbentuk semacam itu tidak lepas dari kesamaan-kesamaan identitas yang melekat pada masing-masing individu. Oleh karena itu, bagi pihak pembuat kebijakan seperti badan legislatif (DPR), pemerintah, ataupun lembaga negara lainnya, pertimbangan-pertimbangan terhadap latar belakang anggota masyarakat, sebagai mana yang ditunjukkan dalam kajian ini, menjadi sesuatu yang mutlak dipertimbangkan saat membuat ataupun mengeluarkan kebijakan yang dinilai kontroversial.





## BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

### 2.1. Posisi dan Peran Negara Serta Masyarakat dalam Pemerintahan Demokrasi

Telaah konseptual negara dan masyarakat tidak lepas dari pemikiran klasik liberalisme John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Melalui karya klasik Locke, *Second Treatises of Civil Government* (1662), diungkapkan hadirnya kekuasaan negara tidak akan lepas dari pengakuan terhadap keberadaan hak-hak pemilikan individual. Kekuasaan negara (*supreme power*) diperlukan untuk menjaga hak-hak kepemilikan individu, sebagai hak bersifat alamiah dimiliki manusia.

Terbentuknya suatu kekuasaan negara ini berkonsekuensi pula pada penyerahan sebagian hak dari masing-masing individu tersebut yang diikat dalam suatu perjanjian sosial. Gagasan mengenai terbentuknya ikatan kontrak sosial secara khusus dikaji oleh Rousseau dalam karyanya *Du Contract Social* (1768). Menurut Rousseau, secara alamiah manusia mempunyai kebebasan mutlak dan bergerak menurut nafsu dan nalurinya. Namun, sebaik apapun keadaan alamiah yang dimilikinya itu tidak akan meluputkan dari ancaman terhadap eksistensinya. Untuk keluar dari keadaan alamiah tersebut, dengan kesadaran penuh setiap individu mengadakan ikatan bersama, suatu kontrak sosial, yaitu membentuk negara.

Terbentuknya negara sebagai hasil dari perjanjian sosial individu ini tercermin dari sistem pemerintahan yang dipraktikkan, yaitu Demokrasi maupun Republik. Konsepsi dasar mengenai demokrasi ataupun republik, yang sebenarnya sudah dikenalkan semenjak 500 tahun sebelum masehi di Yunani dan Roma, yang mengakui sepenuhnya keberadaan hak-hak dan partisipasi individu menjadi pedoman dalam pengelolaan negara.



Namun, dalam teori demokrasi negara tidak ikut campur dalam urusan privat, moral atau agama. Campur tangan negara dalam hal moral orang perorangan sarat dilema. Di satu pihak, bila negara banyak campur tangan dalam masalah privat ataupun moral, diasumsikan bukan memperluas lingkup kebebasan warga negara, tetapi justru mempersempit. Dengan banyak campur tangan negara pada lingkup privat, ruang publik menjadi rentan. Hal yang paling dikhawatirkan terganggunya kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi setiap warga negara. Dalam banyak kasus penyensoran, negara menggunakan hukum sebagai alibi. Di lain pihak, bila kebebasan seseorang merugikan orang lain, atau pemenuhan hak seseorang mengancam kebebasan pihak lain, campur tangan negara sulit ditolak dan cenderung sangat dibutuhkan.

Seperti ditegaskan oleh John Stuart Mills dalam bukunya *On Liberty*, Prinsip Kebebasan Mill: "Harm Principle", menyatakan bahwa "*you may justifiably limit a person's freedom of action only if they threaten harm to another*". Harm Principle: membatasi kebebasan atas tindakan orang lain diperbolehkan hanya jika tindakan orang itu membahayakan (mengancam kebebasan) orang lain.

Menurut Mill, kebebasan hanya bernilai di bawah persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak berlaku, maka kebebasan bisa sangat membahayakan. Campur tangan pemerintah dalam masalah pribadi akan menjadi suatu yang bisa salah dan bisa benar bila menyangkut moralitas sosial, kewajiban pada orang lain, pendapat umum: pendapat mayoritas yang berkuasa. Hal ini menurut Mills menyangkut penilaian, kepentingan dan perilaku tertentu. Ada orang yang menganggap sebagai kerugian perilaku orang lain yang dinilai merupakan penghinaan terhadap perasaan mereka. Tetapi tidak ada persamaan antara perasaan seseorang terhadap pendapatnya sendiri dengan perasaan orang lain yang terhina karena dia mempertahankan pendapatnya.

## **2.2. Kecenderungan Individu terhadap Persetujuan Campur Tangan Negara**

Telaah mengenai kecenderungan individu terhadap campur tangan negara dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat khususnya masalah yang bersifat kontroversial telah dikenalkan oleh beragam disiplin keilmuan. Dalam ilmu politik

kajian mengenai sikap penyensoran dapat dilihat dari karya Stouffer yang menguji tentang seberapa jauh para warga negara menghendaki diperluasnya perlindungan kebebasan sipil bagi kelompok yang sangat beragam dalam masyarakat. Hasil karya Stouffer ini membahas sikap-sikap umum terhadap para penganut komunis, ateis dan sosialis.

Dalam kajian Ilmu Komunikasi, telaah mengenai campur tangan negara melalui sensor yang dilakukan pemerintah dalam isu-isu kontroversi terlihat dalam karya Chaffee, Thompson & Oshagan (1990). Dalam karyanya yang berjudul *Regulating Pornography: A Public Dilemma*, Chaffee, Thompson dan Oshagan melihat sentimen antipornografi yang muncul di masyarakat Amerika tidak hanya dari kalangan yang berpandangan politik konservatif dan kaum moralis tetapi juga mereka yang berhaluan kiri khususnya kelompok feminis. Kelompok feminis melihat industri pornografi yang semakin berkembang pesat menggunakan kekerasan seksual untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pandangan kelompok feminis ini meredefinisi pornografi. Pornografi tidak lagi dilihat hanya sebagai tindakan kriminal dan melanggar hukum tetapi juga sebagai kekerasan terhadap hak perempuan. Argumen yang sering muncul berkaitan dengan kontrol masyarakat dalam isu pornografi adalah tuntutan apa yang "diterima" oleh "masyarakat".

Survey-survey di Amerika sebelumnya menunjukkan tingginya toleransi publik untuk hal-hal yang berorientasi seksual. Tahun 1970 The U.S Commission on Obscenity and Pornography menyimpulkan pornografi lebih banyak membawa kerusakan dibandingkan kebaikan hal ini senada dengan penelitian Gallup, dipublikasikan *Newsweek* pada tahun 1985, yang menemukan bahwa lebih banyak responden yang menginginkan hal-hal yang berorientasi seksual agar lebih diperketat peredarannya dalam masyarakat.

Dalam artikelnya Chaffee melakukan survey opini publik dalam skala kecil mengenai peraturan pornografi. Survey ini diselenggarakan di wilayah aktivis antipornografi yang lantang menentang peredaran pornografi di Amerika. Chaffee, Thompson dan Oshagan mengasumsikan bahwa pornografi merupakan isu yang sangat

problematis untuk semua orang, tidak memandang ideologi politik dan demografi masyarakat. Konservatif dan Liberal sama-sama mempunyai kecenderungan menghargai nilai-nilai yang tertuang dalam First Amendment. Bedanya, kelompok tradisional konservatif lebih menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pornografi karena dinilai sebagai penghinaan terhadap konvensional, seperti nilai-nilai dasar dalam keluarga.

Di lain sisi, Liberal lebih fokus pada hal-hal yang lebih spesifik, kelompok ini melihat pornografi dalam dua hal yaitu efek yang merugikan dalam hubungan perempuan dan laki-laki serta kontribusinya pada budaya kekerasan terhadap perempuan. Hal semacam ini penuh dengan tekanan yang saling bertentangan yaitu kebebasan dan peraturan. Hasil penelitian Chaffee, Thompson dan Oshagan menunjukkan ekspektasi yang kontradiktif, responden yang secara kuat merasakan bahwa pornografi mempunyai efek negatif khususnya dalam hubungan perempuan dan laki-laki lebih menentang sensor pemerintah melalui peraturan dan sebaliknya responden yang berpikir bahwa efek pornografi tidak terlalu negatif menginginkan adanya peraturan oleh pemerintah.

Kajian lain mengenai campur tangan pemerintah dalam hal kontroversi juga terlihat dalam artikel *The Effects of Governments of War Related News Coverage on Interest In The Censored Coverage: A Test of Competing Theories*, karya Jason B. Reineke dan Andrew F Hayes. Mereka melakukan penelitian setelah pemilihan Presiden Amerika tahun 2004 dengan menggunakan data eksperimental dari *split-ballot survey*. Kedua peneliti ini menguji efek sensor pemerintah mengenai gambar-gambar perang yang berhubungan dengan kematian tentara Amerika di Irak.

Penelitian ini Jason B. Reineke dan Andrew F Hayes menggunakan *Reactance & Balance Theories*. *Reactance theory* mengatakan ketika seseorang merasakan kebebasannya terancam, mereka akan merasakan perasaan yang tidak menyenangkan disebut reaktansi, hal ini memotivasi seseorang untuk berperilaku mengancam untuk menunjukkan kebebasan mereka terganggu. Berdasarkan *reactance theory* seharusnya efek yang timbul akibat sensor pemerintah terhadap gambar-gambar perang semakin

mendorong seseorang untuk melihat foto-foto tersebut. *Balance theory* atau teori keseimbangan mengatakan bagaimana orang mengembangkan hubungan mereka dengan orang lain dan dengan hal-hal di lingkungan mereka.

Teori ini juga mengatakan bahwa jika orang melihat satu set unsur-unsur kognitif sebagai suatu sistem maka mereka akan mempunyai preferensi untuk menjaga keadaan tetap seimbang melalui unsur-unsur tadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reineke dan Hayes terhadap efek yang timbul akibat gambar-gambar perang yang berhubungan dengan kematian tentara Amerika di Irak lebih konsisten dengan *balance theory* dibandingkan dengan *reactance theory*.

Kajian yang paling baru adalah telaah yang dilakukan oleh Jennifer L. Lambe dan Jason B. Reineke dalam kajian komunikasi politik yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengelompokan dalam masyarakat berkenaan penyikapan masyarakat tentang keterlibatan negara dalam hal penyensoran khususnya dengan isu-isu kontroversi yang sedang terjadi. Lambe dan Reineke menguji *Willingness to Censorship (WTC)* kecenderungan seseorang menyetujui penyensoran pemerintah terhadap pernyataan pendapat.

Penelitian ini menggunakan *cluster analysis* dengan menguji tiga satuan data (Multistate, Ohio dan Minnesota). Hasil penelitian Lambe menunjukkan analisa kelompok membentuk tiga pengelompokan sikap yang berbeda dalam hal peran yang seharusnya pemerintah lakukan terkait dengan masalah-masalah kontroversi. Dalam jurnalnya Lambe menggunakan tiga istilah yakni; Pertama, kelompok *Protector*, yaitu kalangan yang bersikap menghendaki pemerintah agar proaktif menjamin pernyataan pendapat memang diperbolehkan. Kedua, kelompok *Censorship*, yaitu kelompok yang bersikap agar pemerintah membatasi pernyataan pendapat. Ketiga, kelompok *Allowers*, merupakan kelompok yang bersikap agar pemerintah tidak ambil bagian dalam kontroversi.

Penelitian Lambe dan Reineke juga memperlihatkan dari ketiga perangkat data wanita lebih berkeinginan melakukan sensor pernyataan pendapat dibandingkan dengan

laki-laki. Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu (Lambe, 2002 dan Sullivan 1982) yang telah menemukan perbedaan gender yang kuat sehingga wanita pada umumnya bersedia menyensor ketimbang pria. Selain jenis kelamin pengetahuan politik juga membedakan para *Censorship* dan *Protector*. Mereka yang memiliki pengetahuan politik lebih banyak dan sering melakukan diskusi politik kemungkinannya lebih kecil akan menyetujui penyensoran.

Lambe memberikan contoh demonstrasi Ku Klux Klan di Amerika Serikat yang telah mengajukan permohonan izin. Kelompok *Protection* akan memberikan izin bagi mereka dan meminta pemerintah melalui polisi agar mengawal demonstrasi mereka yang memang hak demonstrasi dilindungi oleh negara. Kelompok *Censorship* menganggap sebaiknya pemerintah tidak akan memberikan izin dan meminta pemerintah melarang demonstrasi tersebut. Sementara bagi kelompok *Allowers*, mereka menginginkan pemerintah seharusnya berada di luar masalah itu.

### 2.3. Kontroversi Poligami dan Campur Tangan Negara

Poligami, yang berasal berasal dari bahasa Yunani dan berarti polus atau banyak dan gamos atau perkawinan, sering diartikan secara harfiah sebagai sistem perkawinan dimana laki-laki ataupun perempuan memiliki lebih dari satu pasangan (Istibsyaroh, 2004). Dilihat dari perspektif antropologi sosial, poligami merupakan praktek pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) yang dilakukan sekaligus pada suatu saat.

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok. Namun, poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Di Indonesia, masyarakat menggunakan kata poligami untuk laki-laki yang memiliki beberapa isteri sekaligus. Poligami memang perilaku kontroversial ditengah-tengah masyarakat yang menganut sistem monogami seperti Indonesia. Sejak zaman Pra kemerdekaan hingga sekarang tidak pernah ada kata sepakat dapat atau tidaknya praktek poligami di Indonesia. Penolakan keras datang dari organisasi perempuan, beberapa

literatur memperlihatkan bahwa kelompok ini sangat ingin pemerintah mengatur masalah poligami lebih ketat dan jelas. Hingga sampai saat ini tidak pernah ada kesepakatan yang sama di mata masyarakat khususnya organisasi perempuan, pelaku poligami maupun pemerintah mengenai isu ini. Aturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan ataupun melalui Peraturan Pemerintah juga selalu menuai pro dan kontra.

Tuntutan agar pemerintah mulai memperhatikan isu-isu perempuan khususnya permasalahan poligami sudah ada sejak zaman Belanda. Dalam bukunya Wieringa (1999) menulis, walaupun menentang keras gerakan perempuan yang berkembang saat itu. Isu pengaturan masalah poligami dalam sistem hukum dan perundangan pertama kali mengemuka pada Kongres Wanita pertama yang diadakan pada bulan Desember 1928 yang diprakasai oleh Aisyiyah sayap organisasi perempuan dari pergerakan Muhammadiyah dan diikuti oleh sekitar 30-an organisasi. Selain isu poligami, isu perkawinan di bawah umur dan kawin paksa juga menjadi perhatian anggota kongres. Istri Sedar sebuah organisasi berhaluan kiri yang kemudian menjadi cikal bakal Gerwani menolak ikut dalam Kongres ini sebagai bentuk penentangannya dan penolakannya untuk berkompromi dalam isu poligami.

Belanda merespon hasil kongres Perempuan pada tahun 1928 di Bandung, yang dihadiri lebih dari 50 organisasi seperti Wanita Utomo, Aisyah, Putri Indonesia, Wanita Katholik, Wanita Mulyo, SI, Jong Islamieten Bond, Taman Siswa. Kongres ini diberi nama Persatuan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). PPII mendesak pemerintah Belanda untuk memperhatikan kasus-kasus perkawinan yang terjadi pada saat itu seperti pernikahan dibawah umur, kawin paksa dan poligami. Pemerintah Belanda merespon hasil kongres dengan mengeluarkan Rancangan Ordonansi Pencatatan Perkawinan yang berlaku bagi bangsa Indonesia kala itu. Isi Ordonansi menyatakan Indonesia dibawah pemerintah Belanda menganut prinsip monogamy. Aturan yang dikeluarkan Belanda ini memicu kontroversi khususnya dari organisasi perempuan itu sendiri. PPII terbelah, organisasi yang berlandaskan Islam menolak ordonansi sedangkan kelompok Katholik, nasionalis dan sekuler setuju dengan Belanda. RUU versi Belanda ini tidak berhasil menjadi Undang-Undang (138).



Pasca kemerdekaan, tepatnya tahun 1950, fraksi Wanita di parlemen mengusulkan dibentuknya komisi perkawinan dan berhasil membuat RUU perkawinan baru, Rancangan Undang-Undang itu pada prinsipnya mengizinkan poligami dengan berbagai persyaratan keras dengan persetujuan laki-laki dan perempuan hal ini dimentahkan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Keputusan No 19 Tahun 1952 yang memberikan tunjangan 2 kali lipat bagi pegawai negeri yang berpoligami dan janda poligami. Keputusan pemerintah ini didukung oleh Masyumi dan organisasi Islam lainnya Muslimat NU, tetapi kembali ditentang oleh kelompok Kristen dan sekuler seperti Gerwani.

RUU dari fraksi Wanita itu kemudian diajukan kembali pada tahun 1954 tetapi rancangan itu tidak diteruskan ke Parlemen. Sebaliknya pemerintah malah mengajukan Undang-Undang No. 22 tahun 1946 yang hanya membahas tentang pendaftaran perkawinan hal ini tentu saja di tolak oleh fraksi perempuan. Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan fraksi wanita tidak tersentuh sampai tahun 1957. (Wieringga, 1999, 235-237).

Pada tahun yang sama Presiden Soekarno mengukuhkan praktek poligami dengan menikahi Hartini. Gerwani organisasi yang sejak dulu menolak poligami sangat marah dengan tindakan Soekarno yang menikah dengan Hartini. Gerwani mengirimkan delegasi ke Istana untuk berbicara dengan Presiden Soekarno, mereka mengatakan kekecewaannya kepada Soekarno ditengah perjuangan mereka untuk mendapatkan Undang-Undang Perkawinan yang adil, Soekarno malah memberikan contoh buruk. Gerwani pun mengajak Fatmawati untuk keluar dari istana kepresidenan. Persetujuan ajakan Gerwani oleh Fatmawati dengan keluar dari istana membuat hubungan presiden dan organisasi perempuan saat itu semakin tegang dan memanas. Perbedaan pandangan di lingkungan internal organisasi perempuan semakin jelas terlihat tetapi mereka tidak dapat menolak keputusan presiden no 19 tentang kenaikan gaji dan tunjangan untuk pelaku poligami.

Di parlemen wacana agar Indonesia menganut sistem monogami melalui RUU muncul dari fraksi PNI pada tahun 1958, partai yang notabeneanya didirikan oleh

Soekarno, satu-satunya Presiden Indonesia yang melakukan poligami secara terang-terangan. Wacana ini ditentang oleh warga Nahdliyin dan Masyumi yang menginginkan RUU lebih mengkedepankan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan ini tidak pernah mendapatkan jalan keluar, RUU yang diajukan tidak pernah disetujui sampai pemerintahan berganti. Rancangan perbaikan diajukan kembali dan disetujui ketika kepemimpinan presiden Soeharto. Rancangan ini juga disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR sehingga pembicaraan tingkat lanjut digelar. Dibentuklah panitia bersama antara Komisi III dan Komisi IX yang kemudian membentuk Panitia Kerja RUU Perkawinan yang beranggotakan 10 orang; terdiri dari 4 orang dari Golkar, dan masing-masing 2 orang dari ABRI, PPP dan PDI.

Sidang selanjutnya ingin segera mengesahkan RUU tersebut pada 27 Desember 1973 tetapi dalam Fraksi Karya Pembangunan terdapat reaksi menolak dari 80 orang beragama Kristen/Katolik terhadap rumusan baru yang telah menjadi konsensus itu. Setelah FKP dapat menyelesaikan persoalan internnya maka tak ada penghalang lagi untuk pengesahan rancangannya. Selanjutnya, disahkanlah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Lembaran Negara No.1 Tahun 1974, tertanggal 2 Januari 1974. Undang-undang yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal ini berlaku efektif pada Oktober 1975. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur perkawinan secara nasional, karena sebelumnya urusan perkawinan diatur dalam berbagai aturan hukum. (A. Suryana Sudrajat, 2008,140)

Dalam Undang-undang perkawinan yang baru terbentuk, pemerintah memperbolehkan poligami dengan berbagai macam syarat salah satunya harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Meskipun tampak dalam UU perkawinan, praktek poligami dibatasi tetapi pada kenyataannya poligami masih banyak dilakukan bahkan oleh pejabat. Untuk lebih memperketat lagi praktek poligami bagi Pegawai Negeri sipil (PNS), Presiden Soeharto mengeluarkan PP no 10 tahun 1983. Penelitian yang dilakukan Julia Suryakusuma pada tahun 1991 menunjukkan keluarnya PP ini disebabkan karena banyaknya keluhan dan laporan dari anggota Dharma Wanita tentang perlakuan buruk para suami yang berkaitan dengan perceraian, poligami dan dukungan

keuangan. Beberapa pengurus Dharma Wanita menemui ibu Tien Soeharto meminta dibentuk peraturan untuk mengatur perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Tepat pada hari Kartini tahun 1983 keluarlah PP yang mempersulit PNS untuk melakukan pernikahan lagi. Beberapa orang yang vokal menentang campur tangan pemerintah dalam masalah poligami sebut saja WS Rendra penyair yang kerap menentang pemerintah dan pelaku poligami, menurut Rendra pemerintah tidak berhak ikut campur mengatur keinginan laki-laki beristrikan lebih dari satu. Sistem pemerintahan otoriter saat itu membuat masyarakat yang tidak setuju dengan aturan ini tidak berani menolaknya secara terang-terangan, pelaku poligami lebih senang melakukan pernikahan secara diam-diam.

Poligami kembali menjadi perbincangan publik ketika Da'i kondang Abdulah Gymnastiar atau yang kerap disapa Aa Gym bicara jujur di depan televisi bahwa dirinya telah menikah lagi atas persetujuan istri pertamanya. Ustadz yang pernah menolak poligami dan mengkedepankan pembentukan keluarga sakinah dalam setiap ceramahnya akhirnya memutuskan untuk memiliki istri sah lebih dari satu perempuan. Sontak pengakuan terbuka sang Ustadz menyulut beragam reaksi. Reaksi keras datang dari organisasi perempuan dan jemaah perempuannya. Bahkan banyak jemaahnya ambil langkah seribu menjauh dari sang ustadz. Beberapa bisnis dengan label Manajemen Qolbu (MQ) yang terpusat di Geger Kalong, Bandung terpaksa gulung tikar. Pondok Pesantrennya Da'arut Tauhid pun sempat sepi dari pengunjung.

Pengakuan Aa Gym bahwa dirinya menikah lagi untuk kedua kalinya mengundang reaksi nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun turun tangan menyikapi berita yang menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Presiden SBY merasa perlu mengambil langkah untuk meredam kontroversi yang terus berkembang mengenai poligami. Pasca pengumuman Aa Gym, Presiden SBY langsung memanggil Menteri pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta terkait isu ini. Hasil pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar rencananya akan merevisi payung hukum tentang poligami. Pemerintah berencana melebarkan larangan poligami tidak

hanya terbatas pada PNS tetapi juga pejabat negara, pejabat pemerintah seperti gubernur, bupati, anggota TNI/Polri dan DPR bahkan hingga ke masyarakat biasa.

Campur tangan negara dengan berencana merevisi Undang-Undang Perkawinan 1/1974 tentang Perkawinan dan PP 45/1995 lagi-lagi menuai pro dan kontra. Banyak pejabat pemerintah seperti anggota DPR menilai sebaiknya hal itu tidak perlu dilakukan. Bagi kalangan yang menolak campur tangan pemerintah dalam hal ini menilai poligami merupakan keputusan pribadi dan hak setiap laki-laki sebagai individu. Hal ini berbeda jauh dengan sikap organisasi perempuan dan kaum perempuan yang sejak lama menginginkan adanya peraturan yang jelas mengenai poligami, mereka mendukung langkah-langkah pemerintah terkait isu ini. Menurut beberapa organisasi perempuan, poligami tidak hanya bisa dilihat dari kerangka agama saja. Menurut data organisasi perempuan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat adanya poligami, menurut mereka walaupun poligami merupakan hak suami dan memiliki legitimasi agama tetapi hak perempuan khususnya isteri dan anak juga harus dilindungi.

Kajian ilmiah mengenai poligami yang ada selama ini memang selalu mengaitkan kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahan poligami. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yayah Hidayah, mahasiswi Kajian Islam dan Psikologi Universitas Indonesia. Menurut penelitian ini banyaknya orang khususnya muslim yang membenci perilaku poligami disebabkan tidak dimungkinkannya seorang laki-laki bersikap adil kepada semua isterinya belum lagi banyaknya kekerasan perempuan dalam praktek poligami. Kajian ini mengutip hasil penelitian Mohammad Hakimi, Guru Besar Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) di Purworedjo mengenai prelevansi kekerasan pasangan terhadap perempuan dengan sampel penelitian 765 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi. Kekerasan emosional sebanyak 34%, 27% untuk kekerasan fisik dan seksual, 22% kekerasan seksual dan 11% untuk kekerasan fisik.

Yayah Hidayah menggunakan analisis interpersonal untuk membuktikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berpoligami. Subjek yang diteliti

sebanyak 3 perempuan berusia 35 tahun keatas, tinggal di Jakarta dan dipoligami oleh suaminya. Hasil penelitian ini menunjukkan ketiga responden mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikologis, ekonomi bahkan seksual. Kekerasan yang diterima oleh ketiga responden ini berbeda-beda dan menyebabkan ketiganya mengalami stress. Hasil penelitian ini mengungkapkan perubahan-perubahan yang dialami responden terjadi setelah suami mereka melakukan poligami.

Kajian lain mengenai poligami juga dilakukan oleh Pusat Studi kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada. Penelitian yang dilakukan di Yogyakarta pada tahun 2005 ini melihat campur tangan pemerintah mengatur perkawinan, perceraian dan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengeluarkan PP no 10 tahun 1983 semakin mendorong PNS melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. PP no 10 Tahun 1983 adalah sebuah peraturan yang mengikat kepada PNS. Dalam hal ini yang termasuk didalamnya adalah pegawai negeri dan pejabat tinggi yang bekerja di departemen, bank dan perusahaan milik negara, bank daerah, perusahaan daerah milik negara serta kepala desa dan staf kantor kepala desa.

Peraturan yang terdapat di dalam PP ini meliputi pengaturan masalah perkawinan, perceraian, poligami dan hidup bersama di luar pernikahan. Pada umumnya instansi pemerintah telah melakukan pengawasan terhadap implementasi PP tersebut. Jika ada pelanggaran akan ada prosedur-prosedur untuk menangani pelanggaran. Tetapi banyak faktor yang membuat PP ini tidak dapat dipatuhi secara maksimal. Salah satunya sulitnya menunjukan bukti perselingkuhan.

Hasil penelitian lembaga ini menunjukan banyak anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar PP no 10 tahun 1983, khususnya melakukan pernikahan lebih dari satu kali dan tidak dilaporkan ke instansi tempat mereka bekerja. PP no 10 pada dasarnya bukan pelarangan untuk berpoligami tetapi lebih pada ketentuan yang mempersulit PNS melakukan pernikahan sah lebih dari satu kali. Penelitian ini melihat keberadaan PP yang pada awalnya di desain sebagai fungsi kontrol negara yang mengatur permasalahan seksualitas PNS untuk melindungi isteri dan anak dari

pernikahan pertama tidak lagi berfungsi karena pemerintah tidak tegas memberlakukan peraturan ini dan berbelitnya prosedur birokrasi.

Hasil penelitian ini memperlihatkan beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di wilayah Yogyakarta. Pertama, Perkawinan Tanpa Persetujuan Ini merupakan bentuk pelanggaran yang paling umum. Perilaku seperti ini melanggar pasal 4 dan 5 yang tertera dalam PP. Pasal 4 dan 5 menjelaskan bagi PNS yang berkeinginan menikah lagi diperlukan izin isteri dan atasan di instansi terkait. Pernikahan diam-diam ini biasanya dilakukan secara siri dan pemalsuan identitas bila terjadi pernikahan di dean KUA.

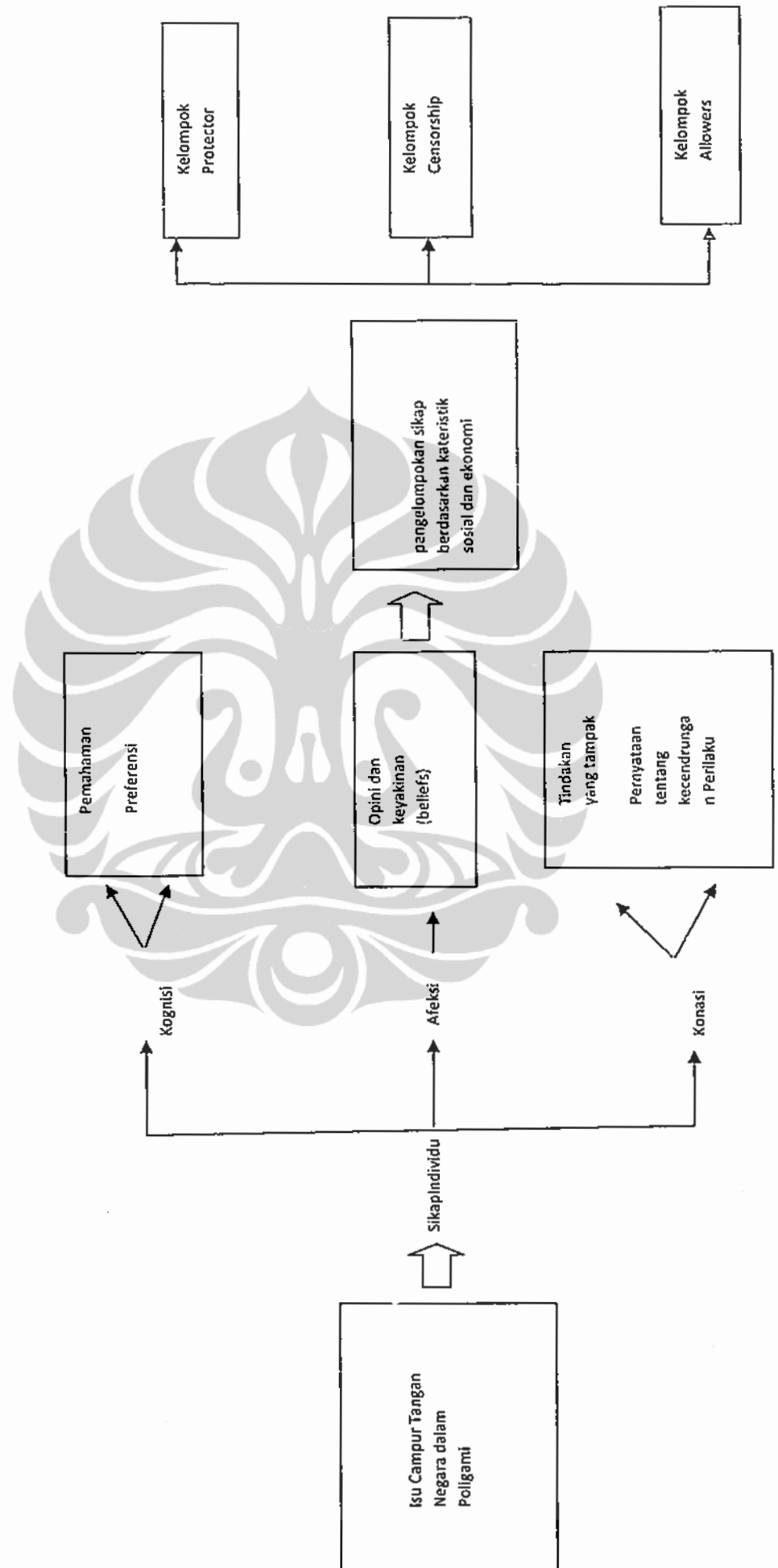
Kedua, Perceraian Tanpa Prosedur Resmi. Bentuk pelanggaran lain adalah tidak melaporkan perceraian anggota PNS. bila mengikuti prosedur resmi bila PNS ingin bercerai harus seizin dan sepengetahuan atasannya dengan alasan yang jelas. Hal ini menjadi masalah yang umum dilakukan PNS karena sulitnya meminta izin cerai pada atasan dan memberikan alasan yang jelas. Cerai agama menjadi alternatif terbaik bagi PNS yang ingin berpisah dari isterinya.

Ketiga, Praktek Perselingkuhan. Pelanggaran yang diatur dalam pasal 15 dan 17 PP no 10 tahun 1983 ini juga muncul di PNS Yogyakarta. Perselingkuhan ini muncul sebagai upaya menghindari aturan mengenai perkawinan dan perceraian PNS. Hidup bersama tanpa menikah menjadi pilihan PNS Yogyakarta.

Berangkat dari rangkaian paparan teori di atas, maka terhadap persoalan sikap masyarakat mengenai kontroversi poligami di negara ini, digambarkan dalam pemetaan berikut ini :

Konsepsi Skematik Rosenberg dan Hovland tentang Sikap dan Skema Pengelompokan sikap masyarakat Lambe dan Reineke

dalam Isu Kontroversi (Poligami)



Rosenberg dan Hovlan menilai ketika seseorang diberikan stimuli (rangsangan) dari objek sikap seperti individu, situasi, kelompok sosial ataupun isu yang berkembang di masyarakat dalam penelitian ini isu campur tangan negara dalam masalah poligami, sikap yang muncul terdiri dari tiga komponen yaitu: Komponen Kognisi berupa pemahaman individu berdasarkan preferensi individu. Komponen Afeksi, komponen ini menitikberatkan pada kepercayaan atau keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti, otoritas, pengalaman atau intuisi. Dalam hal ini kepercayaan dapat bersifat rasional ataupun irrasional. Menurut Solomon E. Asch sebagaimana dikutip dari Jallaludin Rakhmat kepercayaan dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan dan kepentingan. Komponen Konasi merupakan tindakan yang tampak atau pernyataan tentang kecenderungan perilaku seseorang terhadap objek sikap. Pada konsep ini sikap seseorang terhadap isu tertentu dapat terlihat jelas oleh orang lain.

Sikap dalam pandangan Hovlan dan Rosenberg merupakan sebab (*cause*) dan efek (*effect*). Dalam objek sikap seperti campur tangan negara dalam masalah poligami sikap masyarakat akan terdiri dari tiga komponen yang merupakan sebab akibat seperti diungkapkan oleh Hovland dan Rosenberg. Individu dalam masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa poligami lebih banyak merugikan perempuan kemungkinan besar akan cenderung menolak poligami dengan keyakinan poligami lebih berdampak buruk bagi perempuan dan sikap penolakan ini mendorong mereka untuk berperilaku menentang poligami termasuk mendorong pemerintah untuk melakukan pelarangan terhadap poligami. Sebaliknya Bagi sebagian lain yang memiliki prefensi bahwa poligami tidak dilarang agama dan merupakan sebuah pilihan bagi setiap individu kemungkinan besar akan cenderung setuju dengan poligami dan individu ini akan cenderung mendukung langkah-langkah pemerintah membebaskan poligami.

Sikap yang terbentuk ini dilatar belakangi oleh kemiripan karakteristik sosial dan ekonomi. Kemiripan karakteristik ini menurut Lambe dan Reineke akan membentuk kelompok penyikap baru yang mereka sebut sebagai Protector (kelompok dalam masyarakat yang menginginkan pemerintah melindungi kebebasan menyatakan



pendapat), Censorship (kelompok yang menginginkan pemerintah membatasi kebebasan menyatakan pendapat) dan Allowers (kelompok yang menginginkan pemerintah tidak ambil bagian dalam masalah kontroversi yang berkembang dimasyarakat).

Berangkat dari Bagan diatas maka dapat dibangun hipotesis yaitu

1. Hipotesis teoritis

“Setiap isu ataupun kebijakan bersifat kontroversial akan memunculkan pengelompokan pola penyikapan dalam masyarakat, yaitu kalangan ataupun kelompok masyarakat yang menginginkan agar pemerintah menjamin suatu kebebasan individu (*protector*), kelompok masyarakat yang menginginkan pemerintah untuk membatasi kebebasan individu (*censorship*) dan kelompok masyarakat yang justru tidak menginginkan pemerintah turut campur tangan dalam persoalan kontroversi (*allowers*).”

2. Hipotesis Penelitian

“Dalam menyikapi isu kontroversial poligami, akan terpolakan tiga pengelompokan sikap dalam masyarakat yaitu kelompok *protector* (kelompok yang menginginkan pemerintah menjamin kebebasan setiap warganya dalam berpoligami), kelompok *censorship* (kelompok yang menginginkan pemerintah melarang poligami) dan kelompok *allowers* (kelompok yang menginginkan pemerintah tidak ikut campur dalam masalah poligami)”.

Hipotesis kedua yang dibangun dalam penelitian ini adalah. “Pembentukan kelompok-kelompok penyikapan terhadap isu poligami ini terbentuk oleh karena adanya kesamaan-kesamaan kateristik sosial ekonomi yang melekat di masing-masing individu. Dalam hal ini, lantaran isu poligami merupakan isu yang bersinggungan dengan eksistensi sosial kalangan perempuan ataupun laki-laki, maka karakteristik jenis kelamin individu merupakan faktor yang signifikan berperan dalam pembentukan kelompok.

### 3. Hipotesis Statistik

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$$

Keterangan:

$\mu_1$  : Rata-rata skor Kelompok *Protector*

$\mu_2$  : Rata-rata skor Kelompok *Censorship*

$\mu_3$  : Rata-rata skor Kelompok *Allowers*



## BAB III METODOLOGI

### 3.1. Paradigma Penelitian

Kajian dalam penelitian ini bersandar pada paradigma positivis dan bersifat eksploratif. Sebagai konsekuensi dari penggunaan penelitian ini (Guba dalam Denzin & Lincoln, 1994), secara ontologis, terkait dengan asumsi mengenai objek yang diteliti, permasalahan ataupun realitas yang diteliti diyakini terjadi dan diatur oleh kaidah-kaidah umum yang berlaku universal. Dalam hal ini, fragmen-fragmen termasuk karakteristik penyikapan yang terungkap dalam kajian ini terbentuk oleh kaidah yang berlaku secara umum.

Sisi lain, konsekuensi epistemologi yang mengkaitkan hubungan antara pengamatan dan objek yang teramati sangat terpisah, berjarak, dan tidak terkait satu sama lainnya. Dengan pilihan paradigma demikian, aspek subyektivitas dalam mengkaji fragmen penyikapan masyarakat sedapat mungkin dihindarkan, dan sebaliknya obyektivitas menjadi pedoman.

Konsekuensi lainnya dari penggunaan paradigma semacam ini dinyatakan dalam rincian aspek metodologi. Disadari, kajian ini merupakan bentuk intervensi peneliti yang disandarkan pada struktur logika *hypothetico deductive method* (Wallace, 1971), dengan menggunakan metode *cross sectional survey* dan penganalisisan secara kuantitatif. Lebih lengkapnya, segenap aspek metode yang digunakan dipaparkan dalam bagian berikut ini.

### 3.2. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode survey secara *cross sectional*, dengan titik tolak pendekatan secara kuantitatif. Obyek yang menjadi fokus penelitian, populasi, sampel,

metode pengumpulan data, metode analisis data, maupun ukuran-ukuran validitas dan reliabilitas penelitian dipaparkan sebagai berikut.

### **3.2.1. Obyek Penelitian**

Menjadi objek dalam penelitian ini adalah individu sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan atau mereka yang telah menikah. Dasar pertimbangan individu sebagai warga negara dijadikan sebagai obyek penelitian adalah bahwa kalangan inilah yang secara politik telah memiliki pengakuan resmi negara. Dengan pengakuan secara politik ini, warga negara berhak menyatakan penyikapannya terhadap segenap persoalan yang mengkaitkan hubungan antara masyarakat dan negara.

### **3.2.2. Populasi Penelitian**

Sebagaimana rujukan objek penelitian, dalam kajian ini populasi penelitian adalah mereka yang telah berumur 17 tahun atau lebih, atau mereka yang telah menikah dan memiliki hak politik, yang ditandai hak pilih dalam pemilihan umum, misalnya dalam Pemilihan Presiden 2009 lalu.

### **3.2.3. Sampel Penelitian**

Tidak semua anggota populasi (warga negara Indonesia) yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode sampling. Wilayah ibukota pemerintahan, DKI Jakarta, menjadi fokus perhatian, dengan pertimbangan utama di kawasan inilah sering kali bermuara persoalan-persoalan politik yang mengkaitkan hubungan antara negara dan masyarakat.

Pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan secara random (*probability sampling*), dengan menggunakan metode *multistage area random sampling*. Dengan menggunakan metode demikian, sampel dipilih secara bertahap dengan

mempertimbangkan level administratif pemerintahan dari yang terbesar hingga terkecil, setingkat Rukun Tetangga (RT).

Kecamatan Kebayoran Lama terpilih menjadi wilayah sampel pada jenjang administrasi pemerintahan tertinggi di DKI Jakarta. Kecamatan ini dipilih oleh karena di kecamatan inilah sempat terjadi peristiwa yang kembali membuat poligami menjadi pembicaraan masyarakat. Isu kekerasan dan poligami yang terjadi di wilayah kecamatan Kebayoran Lama empat tahun silam ini melibatkan artis dan anak mantan Presiden Indonesia. Terbukanya kasus poligami yang melibatkan figur publik kembali membuat isu poligami menghangat dibicarakan khususnya di wilayah kebayoran lama.

Selain itu, kecamatan ini memiliki kekekhasan politik yang mampu merepresentasikan kondisi politik DKI Jakarta. Argumentasi terhadap kekuatan kecamatan ini yang berpotensi kuat merepresentasikan suara masyarakat DKI Jakarta, dapat dirujuk dari hasil Pemilu Presiden 2009 lalu, dimana proporsi pilihan warga negara di kecamatan Kebayoran Lama mendekati hasil Pemilu Presiden di tingkat kota DKI Jakarta. Tabel berikut ini membandingkan hasil Pemilu Presiden di tingkat DKI Jakarta dan Kecamatan Kebayoran Lama.

Tabel 3.1. Perbandingan Hasil Pemilihan Presiden Tingkat DKI Jakarta dan Kecamatan Kebayoran Lama.

No	Kandidat Presiden Pemilu 2009	Perolehan (%)		Deviasi (%)
		DKI Jakarta	Kebayoran Lama	
1	Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto	1.028.227 (20 %)	29.351 (19 %)	-1 %

2	Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono	3.543.427 (70 %)	110.273 (72 %)	+2 %
3	Jusuf Kalla- Wiranto	464.257 (10 %)	14.398 (9 %)	-1 %
	Total	5.035.956 (100 %)	154.050 (100 %)	

Sumber: diolah dari data KPUD (2010).

Berdasarkan data pada tabel di atas, hasil Pemilu Presiden 2009 di Kecamatan Kebayoran Lama, hanya berselisih antara 1-2 persen dari proporsi suara DKI Jakarta. Dengan kondisi demikian, Kecamatan ini dinilai layak dijadikan wilayah administratif tertinggi untuk dijadikan sampel dalam kajian ini.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 400 responden. Angka ini didapatkan setelah dihitung dengan menggunakan rumus

$$N = \frac{Z^2 \cdot p (1-p)}{E^2}$$

- N Jumlah sampel yang dibutuhkan  
 Z Nilai pada tingkat kepercayaan 95% = 1.65  
 p (1-p) Keragaman populasi, sangat beragam p= 0,5 (50%)  
 E Sampling error yang dikehendaki 5%

Rumus ini digunakan pada penelitian ini karena populasi yang digunakan besar yaitu penduduk DKI dengan sampling error yang dikehendaki sekitar 5% maka jumlah responden harus sebesar 386 atau 400 sampel. Sampling error 5% karena penelitian ini

memiliki keterbatasan ekonomi dan tidak banyak mengubah perbedaan dari segi penelitian.

Pemilihan wilayah administratif selanjutnya di bawah Kecamatan Kebayoran Lama dilakukan secara disproporsional, dengan menentukan dua kelurahan, dan delapan Rukun Tetangga (RT). Pertama-tama penentuan Kelurahan dilakukan dengan cara mengundi kertas berisikan nomer Kelurahan di wilayah Kebayoran Lama. Tahap kedua menentukan secara acak juga Rukun Tetangga (RT) di masing-masing Kelurahan yang terpilih menjadi daerah penelitian. Untuk mencapai jumlah responden yang diharapkan sekitar 400 orang maka di masing-masing RT yang terpilih akan disebar 50 angket. Rincian Kelurahan dan RT yang terpilih menjadi wilayah penelitian dan jumlah sampel terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Jumlah Sampel dan Wilayah Rukun Tetangga di Kecamatan Kebayoran Lama yang Terpilih

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah RT	RT Terpilih	Jumlah Sampel
1	Kebayoran Lama Selatan	29.434	142	RT 3 RT 6 RT 7 RT 10	200 Orang
2	Cipulir	28.792	139	RT 1 RT 4 RT 6 RT 9	200 Orang

### 3.3. Teknik Pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara langsung (*face to face interview*) kepada masing-masing individu yang terpilih menjadi sampel. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan alat bantu penelitian berupa kuesioner yang telah disusun secara terstruktur dan sistematis dan didasarkan pada uraian persoalan penelitian yang ingin diketahui.

### 3.4. Teknik Analisis data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis data yang berupaya mengelompokkan responden ke dalam satu satuan kluster (*cluster analysis*). Kluster dalam penelitian ini diartikan sebagai kelompok, analisis pembentukan kluster adalah teknik untuk menghasilkan sejumlah kluster (kelompok) dengan asumsi sejumlah data tertentu dalam penelitian ini mempunyai kemiripan di antara anggotanya.

Pembentukan kluster ini memungkinkan untuk mengelompokkan responden yang mirip atau mempunyai karakteristik serupa berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, kebiasaan dalam mengkonsumsi media dan penyikapan responden dalam hal poligami ke dalam tiga kluster (kelompok). Teknik pengelompokkan dilakukan dengan bantuan program software SPSS dengan metode *Two Step Cluster Analysis*.

Kelebihan teknik *two step cluster analysis* menjadi pertimbangan dalam kajian ini mengingat teknik demikian dapat digunakan pada data yang berskala pengukuran kategorik maupun numerik. Data kategorik (skala nominal) dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, pekerjaan dan status pernikahan responden. Data numerik adalah data berbentuk angka (skala rasio) yang dapat dijumlahkan untuk mendapatkan skor terendah, rata-rata dan skor tertinggi. Dalam kajian ini data berskala



numerik adalah konsumsi media dan intensitas membaca, mendengar dan menonton isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum dan penyikapan responden dalam poligami yang terbagi atas pemahaman responden terhadap poligami, persetujuan responden terhadap poligami, persetujuan responden terhadap larangan poligami dan sanksi poligami dan persetujuan responden terhadap campur tangan pemerintah dalam masalah poligami

### 3.5. Definisi Konsep dan Operasionalisasi Konsep

#### 3.5.1. Pemahaman Konsep Sikap Individu

Definisi standar mengenai sikap diutarakan oleh Stone and Schaffner (1988) adalah *"attitudes is that they are an enduring system of positive or negative beliefs (the cognitive component), affective feelings and emotions and action tendencies regarding attitude objects, that is, the entity being evaluated."* Di sisi lain, Eagly and Chaiken (1998) mendefinisikan sikap sebagai *"a psychological tendency that is expressed by evaluating a particularentity with some degree of favor or disfavor"* (Cottam, Dietz-Uhler, Mastors, Preston, 2004, 57). Menurut Baron dan Byrne sebagaimana dikutip dalam Sarwono dan Meinarno (2009, 82) *"sikap merupakan evaluasi terhadap beberapa aspek perkataan sosial"*. Sarwono dan Meinarno menambahkan sikap dapat diketahui melalui pengetahuan, keyakinan, perasaan dan kecendrungan tingkah laku seseorang terhadap objek.

Penelitian La Pierre tahun 1943 memperlihatkan ada hubungan langsung antara sikap dan perilaku. Rumusan tersebut dinyatakan *"a person who racially prejudiced is unlikely to send their child to a school where African and Hispanic Americans, or whoever the person doesn't like, are in the majority"*. Lebih jauh, menurut Fazio and Williams, 1986 *"attitudes are strong, clear, and consisten over time and that are directly and specifically relevant to the behavior under examination, are more likely to be associated with attitude-bahavior consistency"* (Cottam, Dietz-Uhler, Mastors, Preston, 2004, 57)

Berdasarkan pada pemahaman di atas, pada intinya sikap adalah konsep yang dibentuk oleh tiga komponen atau lebih dikenal dengan *tricomponent attitude model*, yaitu: Komponen kognitif, Komponen afektif dan komponen konatif.

Komponen kognitif merupakan "*person cognitions*" yang merupakan pengetahuan dan persepsi yang muncul berdasarkan pengalaman langsung dan informasi mengenai suatu isu yang didapat dari berbagai macam sumber. Menurut Sarwono dan Meinarno komponen ini berisikan "pemikiran beserta ide yang berkenaan dengan objek sikap. Isi pemikiran seseorang meliputi hal-hal yang diketahuinya seputar objek sikap, berupa tanggapan atau keyakinan, kesan, atribusi dan penilaian tentang objek tadi" (2009, 83). Komponen afektif merupakan perasaan atau emosi seseorang tentang isu atau merek. Dalam banyak penelitian afektif dilihat dari aspek *happiness, sadness, shame, disgust, anger, distress, guilt, surprise*. Salah satu penelitian psikologi seperti dikutip dari Cottam, Dietz-Uhler, Mastors, Preston, 2004, 58) mengindikasikan perasaan emosional akan menjadi pengalaman positif atau negatif. Dari pengalaman tersebut mempengaruhi seseorang untuk bertindak. komponen inilah yang mewarnai sikap menjadi suatu dorongan.

Komponen konatif fokus pada "*likelihood or tendency that individual will undertake a specific action or behave in a particular way with regard to the attitudes object. According to some interpretations, the conative component may include the actual behavior itself*" (Cottam, Dietz-Uhler, Mastors, Preston, 2004, 238). Pada komponen ini respon dapat berupa tindakan yang dapat diamati dan dapat berupa niat untuk melakukan perbuatan tertentu sehubungan dengan objek sikap.

### 3.5.2. Operasionalisasi Konsep Sikap

Dalam kajian ini, sikap masyarakat dapat diukur melalui 3 komponen sikap yaitu:

- (1) **Komponen Kognisi:** Komponen ini berupa pengetahuan atau pemahaman seseorang mengenai poligami. Dalam penelitian ini komponen afektif dilihat dari Tingkat Pemahaman Responden mengenai hal-hal yang menyangkut poligami seperti pengertian poligami, pandangan poligami dalam agama Islam dan diluar Islam dan aturan-aturan yang ada mengenai poligami di Indonesia.
- (2) **Komponen Afeksi:** Komponen ini berkaitan dengan keyakinan atau perasaan individu mengenai praktek poligami. Komponen Kognisi dalam penelitian ini diterjemahkan dengan melihat Persetujuan Responden dalam hal poligami, persetujuan ini bukan hanya diri sendiri tetapi juga persetujuan bila memiliki kerabat, tetangga, pejabat negara atau masyarakat umum yang berpoligami. Selain persetujuan terhadap poligami dalam komponen ini juga dilihat persetujuan mereka mengenai larangan (sensor) terhadap media massa, pemuka agama, tenaga pendidik, artis dan masyarakat untuk tidak membicarakan poligami di depan umum dan persetujuan individu mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku poligami.
- (3) **Komponen Konasi:** komponen ini merupakan kecendrungan perilaku individu dalam masalah kontroversial seperti poligami. Dalam penelitian ini komponen konasi dilihat dari persetujuan responden dalam hal campur tangan pemerintah dalam masalah poligami.

### **3.5.3. Pengelompokan Sikap**

Pengelompokan sikap dalam penelitian ini bergabungnya individu-individu dalam masyarakat membentuk satu kelompok berdasarkan kemiripan sikap yang sama tentang peran yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam masalah poligami. Kesamaan sikap dapat dilihat dari kateristik sosial dan ekonomi masing-masing individu dalam kelompok. Terdapat 3 pengelompokkan sikap, yaitu:

- (1) Kelompok *Protector*: Kelompok dengan kesamaan karakteristik sosial dan ekonomi tertentu, bersikap (Afeksi, Kognitif dan Konasi) agar pemerintah mengizinkan praktek poligami.
- (2) Kelompok *Censorship*: Kelompok dengan kesamaan karakteristik sosial dan ekonomi tertentu bersikap (Afektif, Kognisi dan Konasi) agar pemerintah melarang praktek poligami.
- (3) Kelompok *Allowers*: Kelompok dengan kesamaan karakteristik sosial dan ekonomi tertentu bersikap (Afeksi, Kognitif dan Konasi) agar pemerintah tidak ikut campur dalam masalah poligami.

#### 3.5.4 Operasionalisasi Konsep Pengelompokan Sikap

Pengelompokan Sikap dapat diukur dengan mengkaji respons individu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, terkait dengan isu kontroversial poligami. Selanjutnya, berdasarkan skor respons tersebut masing-masing individu akan dikelompokkan ke dalam tiga pengelompokan, baik kelompok *Protector*, *Censorship*, maupun *Allowers*.

#### 3.5.5 Campur Tangan Negara

Campur Tangan Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan negara dalam kontroversi poligami. Bentuk campur tangan negara dilihat dari dua hal yaitu sensor pemerintah terhadap media massa, pemuka agama dan tenaga pendidik dalam hal poligami. Bentuk lainnya yang merupakan campur tangan pemerintah adalah kebijakan publik mengenai poligami seperti Keputusan Pemerintah, Peraturan Pemerintah dan rencana revisi PP no 10 tahun 1983 dan Undang Undang Perkawinan tahun 1974 khususnya mengenai poligami. Menurut Dye (1987, 2) "*Public Policy is whatever governments choose to do or not to do. Governments do many things. They regulate conflict within society; they organize society to carry out conflict with other*

*societis an other thing. Thus, public policies may regulate behavior, organize bureaucracies, distribute benefits, or extract taxes- or all these things at once".*

Di sisi lain, Nugroho (2009, 138) mengurai bahwa "Kebijakan publik merupakan hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa. Dalam bentuk luas kebijakan publik dari tingkat yang paling tinggi yaitu konstitusi (UUD 1945), ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Presiden, keputusan Kepala Daerah, Keputusan Menteri, Keputusan Pimpinan Dians, hingga peraturan di tingkat Rukun Tetangga (RT)"

### 3.5.6. Kontroversi Poligami

Kata Kontroversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan antara dua hal yang saling berlawanan atau bertentangan. Dalam kajian ini makna kontroversi merepresentasikan realitas perbedaan yang terjadi di tenggah masyarakat.

Menurut Istibsyaroh (2004) "poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *polus* berarti banyak, dan *gamos* berarti perkawinan. Secara harfiah poligami merupakan sistem perkawinan dimana laki-laki ataupun perempuan memiliki lebih dari satu pasangan".

Sebenarnya, dilihat dari perspektif antropologi sosial, poligami merupakan praktek pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) yang dilakukan sekaligus pada suatu saat. Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok. Dari ketiga bentuk tersebut, poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Dalam penelitian ini sekalipun pemaknaan terhadap poligami tampak meluas, namun penulis menggunakan istilah poligami dalam arti yang harafiah untuk memaparkan kondisi laki-laki yang memiliki pasangan sah lebih dari satu perempuan.

Keseluruhan konsep yang akan diuji maupun operasionalisasi dari segenap konsep tersebut dipaparkan secara ringkas dalam tabel berikut ini

Tabel 3.5. Konsep, Dimensi, dan Indikator Penelitian

Konsep	Dimensi	Indikator
Sikap	Kognisi	Skor pemahaman individu tentang poligami (Kuesioner No 23 hingga No 46)
	Afeksi	Skor persetujuan individu dalam hal poligami (Kuesioner No 47 hingga No 66)  Skor Persetujuan individu mengenai sensor di media massa, sensor terhadap pemuka agama, tenaga pendidik, artis dan pejabat negara (Kuesioner No 67 hingga No 94)
	Konatif	Skor persetujuan individu dalam hal campur tangan negara dalam masalah poligami (Kuesioner No 95 hingga No 114)
Pengelompokan Sikap	Protector	Respons individu yang cenderung setuju dengan poligami dan campur tangan negara untuk membebaskan poligami. (Kuesioner No 95 hingga No 114)

		Pilihan jawaban responden No 3
	Censorship	Respons individu yang cenderung menolak poligami dan setuju campur tangan negara untuk melarang poligami.  (Kuesioner No 95 hingga No 114)  Pilihan jawaban responden No 2
	Allowers	Respons individu yang cenderung setuju dengan poligami tetapi mengharapkan negara tidak ikut campur dalam masalah poligami.  (Kuesioner No 95 hingga No 114)  Pilihan jawaban responden No 2

### 3.6. Rumusan Hipotesis

Berangkat dari kajian-kajian sebelumnya (Lambe, 2002 dan Sullivan 1982), hipotesis teoritis penelitian ini adalah, “Setiap isu ataupun kebijakan bersifat kontroversial akan memunculkan pengelompokan pola penyikapan dalam masyarakat yang berbeda, yaitu kalangan ataupun kelompok masyarakat yang menginginkan agar pemerintah menjamin suatu kebebasan individu (*protector*), kelompok masyarakat yang menginginkan pemerintah untuk membatasi kebebasan individu (*censorship*) dan kelompok masyarakat yang justru tidak menginginkan pemerintah turut campur tangan dalam persoalan kontroversi (*allowers*).”

Berdasarkan rumusan hipotesis teoritis di atas, maka dalam kajian ini rumusan Hipotesis pertama penelitian yang digunakan adalah, “Dalam menyikapi isu kontroversial poligami, akan terpolakan tiga pengelompokan sikap dalam masyarakat

yaitu kelompok *protector* (kelompok yang menginginkan pemerintah menjamin kebebasan setiap warganya dalam berpoligami), kelompok *ensorship* (kelompok yang menginginkan pemerintah melarang poligami) dan kelompok *allowers* (kelompok yang menginginkan pemerintah tidak ikut campur dalam masalah poligami)".

Hipotesis kedua yang dibangun dalam penelitian ini adalah. "Pembentukan kelompok-kelompok penyikap terhadap isu poligami ini terbentuk oleh karena adanya kesamaan-kesamaan kateristik sosial ekonomi yang melekat di masing-masing individu. Dalam hal ini, lantaran isu poligami merupakan isu yang bersinggungan dengan eksistensi sosial kalangan perempuan ataupun laki-laki, maka karakteristik jenis kelamin individu merupakan faktor yang signifikan berperan dalam pembentukan kelompok".

Dari kedua hipotesis diatas maka Hipotesis statistik peneitian ini:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$$

Keterangan:

$\mu_1$  : Rata-rata skor Kelompok *Protector*

$\mu_2$  : Rata-rata skor Kelompok *Censorship*

$\mu_3$  : Rata-rata skor Kelompok *Allowers*

### 3.7. Validitas dan Realiabilitas Penelitian

Pengukuran konsistensi homogenitas dari setiap indikator yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach's alpha dari indikator yang digunakan. Di sisi lain, sebagai pembuktian validitas penelitian ini, akan digunakan pengujian faktor guna memperkuat apakah masing-masing indikator yang digunakan



sudah tergolong akurat untuk menjabarkan berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan uji homogenitas terhadap setiap indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan indikator yang digunakan terbilang konsisten, dengan angka Cronbach's Alpha di atas 0.900. Lebih lengkapnya hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7. Hasil Pengujian Reliabilitas (Homogenitas) Berbagai Indikator Penelitian

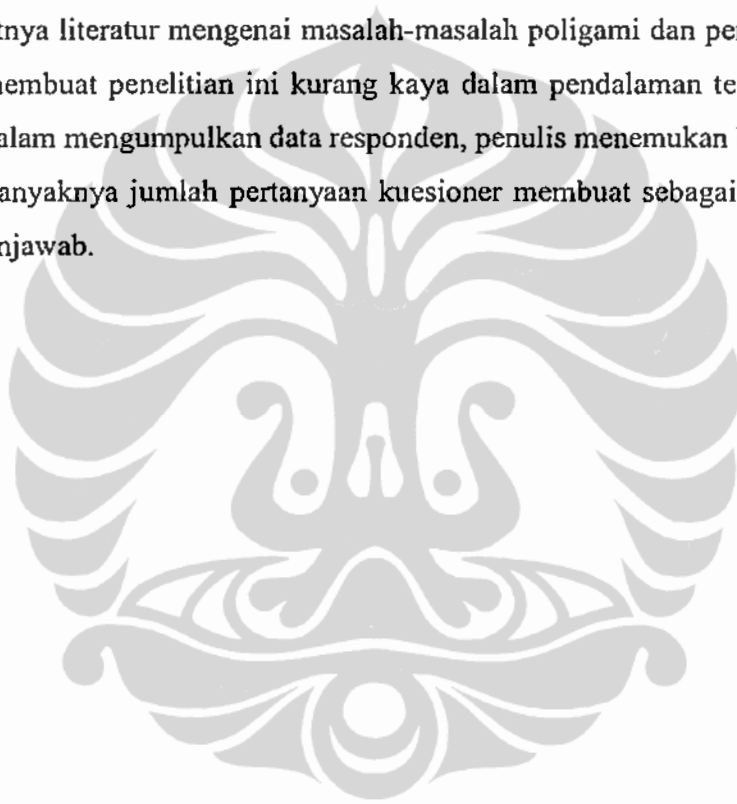
No	Konsep dan Dimensi Penelitian	Jumlah Indikator	Pengujian Reliabilitas Cronbach's Alpha
1	Pengetahuan terhadap Poligami	17	0.918
2	Penyikapan terhadap Poligami	19	0.972
3	Penyikapan Larangan Poligami	15	0.975
4	Penyikapan Sanksi Poligami	14	0.975
5	Penyikapan Campur Tangan Pemerintah	21	0.990

### 3.8. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian

Kelebihan penelitian ini terletak pada data yang otentik karena diambil secara langsung terhadap obyek yang menjadi fokus kajian. Selain itu, kajian ini merupakan kajian baru dalam komunikasi politik mengenai poligami dari perspektif keterlibatan pemerintah. Sejauh ini, penelitian mengenai poligami yang dilakukan sebelumnya selalu menggunakan pendekatan kualitatif dan tidak terfokus pada apa yang menjadi penyikapan di level individu (masyarakat). Oleh karena itu, penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif ini dapat mengisi kekosongan penggambaran pola sikap masyarakat tentang keterlibatan pemerintah dalam poligami.

Kelemahan penelitian ini terkait dengan kedalaman analisis. Tidak banyaknya dijumpai kajian-kajian mengenai poligami membuat kajian ini kurang kaya dalam pengelaborasi persoalan-persoalan yang dikaji. Di samping itu, penelitian ini masih tergolong sedikit dalam penggunaan jumlah sampel sehingga hasil penelitian ini memiliki keterbatasan dalam proses generalisasi temuan ke tingkat populasi yang lebih besar.

Sedikitnya literatur mengenai masalah-masalah poligami dan peran negara dalam masalah ini membuat penelitian ini kurang kaya dalam pendalaman teori dan kerangka konseptual. Dalam mengumpulkan data responden, penulis menemukan beberapa kendala di lapangan banyaknya jumlah pertanyaan kuesioner membuat sebagian orang menolak untuk ikut menjawab.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum responden (analisis deskripsi), analisis pembentukan cluster yang akan dilihat dari dua data yaitu data Numerik dan data Kategorik. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas uji statistik untuk melihat perbedaan-perbedaan (ciri khas) dalam setiap cluster yang terbentuk dan hasil temuan dan teori.

#### 4.1 Gambaran Umum Responden

Responden yang terpilih dalam penelitian ini tinggal di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama khususnya di wilayah kelurahan Cipulir dan Kebayoran Lama Selatan, memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, berumur 17 tahun lebih atau telah menikah. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 400 orang.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai responden dalam penelitian ini maka dilakukan penghitungan distribusi frekuensi berdasarkan data responden yang terdapat pada bagian awal kuesioner yaitu jenis kelamin, agama, usia pendidikan formal, pekerjaan, status pernikahan, konsumsi media dan intensitas konsumsi media yang dilakukan oleh responden.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden dalam penelitian ini antara laki-laki dan perempuan tidak terlihat perbedaan yang mencolok, bisa dikatakan relatif berimbang. Data responden menunjukkan jumlah responden laki-laki dalam penelitian ini lebih dari 50%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan mendekati angka 50%. Proporsi ini sama persis dengan data penduduk DKI dimana jumlah laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh berbeda, menurut data BPS Provinsi DKI Jakarta, hasil sensus yang dilakukan bulan Mei 2010 menunjukkan jumlah laki-laki di DKI Jakarta sebanyak 4,8 juta jiwa dan

jumlah perempuan yang tinggal di DKI Jakarta sebanyak 4,7 juta jiwa. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1.1 dibawah ini.

Tabel 4.1.1 Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Responden	Persen
1	Laki-laki	209	52
2	Perempuan	191	48

N=400

Pada tabel 4.1.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden berjenis kelamin selisih sedikit dengan responden yang berjenis kelamin perempuan. Responden laki-laki berjumlah 209 responden atau sebesar 52% dari total responden yang ada sedangkan responden perempuan berjumlah 191 orang atau sebesar 48% dari jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini.

Bila dilihat dari Agama, jumlah responden yang beragama Islam jauh lebih banyak dibandingkan dengan agama diluar Islam (Non Muslim). Data yang terkumpul memperlihatkan responden yang beragama Islam lebih dari 68% sedangkan responden yang beragama bukan Islam (Kristen Protestan dan Katholik) sekitar 30%. Proporsi ini tidak dapat dikatakan dekat dengan jumlah pemeluk agama di DKI Jakarta, karena tidak terdapat responden yang beragama Budha, Hindu ataupun Konghucu dalam penelitian ini.

Kecilnya jumlah responden menjadi salah satu sebab pemeluk agama di luar Islam, Kristen Protestan dan Katholik tidak terjaring melalui penelitian ini. Selain itu wilayah penelitian lebih banyak dihuni oleh pemeluk agama Islam, menurut data BPS DKI Jakarta, jumlah penduduk beragama Islam diwilayah Kecamatan Kebayoran Lama yang merupakan wilayah penelitian sebanyak 126.903 jiwa, Kristen Protestan sebanyak 9.512, Katholik 8.121 sedangkan penduduk yang beragama Hindu dan Budha kurang dari 1000 jiwa. Jumlah penduduk beragama Hindu dan Budha yang sangat sedikit di wilayah Kecamatan Kebayoran lama juga menjadi salah satu faktor tidak ditemukannya responden

yang beragama Hindu dan Budha. Jumlah responden berdasarkan agama dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 4.1.2 Agama Responden

No	Agama	Responden	Persen
1	Islam	275	69
2	Kristen Protestan	75	19
3	Kristen Katholik	50	12

N=400

Pada tabci 4.1.2 diatas dapat diketahui jumlah responden yang beragama Islam jauh lebih banyak dibandingkan dengan responden yang beragama Kristen Protestan maupun Katholik (Non Muslim). Jumlah responden muslim lebih dari 69% atau sebanyak 275 responden dari jumlah responden yang ada sedangkan responden Non Muslim sebanyak 125 orang (31%) yang terbagi atas 75 responden ( 19%) beragama Kristen Protestan dan 50 responden (12%) beragama Kristen Katholik.

Berdasarkan usia responden, kelompok responden dengan usia 17-35 tahun merupakan kelompok terbesar dalam penelitian ini dan kelompok responden dengan usia 54-71 merupakan kelompok terkecil. Bila dibandingkan dengan data penduduk di tingkat kelurahan Cipulir dengan data responden yang ada, data dapat dikatakan identik. Menurut data BPS DKI Jakarta di kelurahan Cipulir penduduk dengan usia 17-35 merupakan kelompok usia terbesar di wilayah tersebut, terdapat lebih dari 9000 jiwa berada pada kelompok usia ini, begitu juga di wilayah Kelurahan Kebayoran Lama Selatan data BPS memperlihatkan lebih dari 7.500 jiwa masuk dalam kategori usia 17-35 di wilayah tersebut.

Sebaliknya Usia 54-71 termasuk kelompok usia terendah di dua kelurahan tersebut baik kelurahan Cipulir maupun Kebayoran Lama Selatan. Lebih dari 3.500 jiwa yang

berusia 54-71 tahun tinggal di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan dan lebih dari 3000 jiwa hidup di wilayah Kelurahan Cipulir. Data BPS juga menunjukkan kesamaan dengan data penelitian yang ada untuk kelompok responden dengan Usia 36-53. Kelompok usia ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok usia 17-35 Tahun tetapi lebih banyak dibandingkan dengan kelompok usia 54-71 tahun. BPS DKI Jakarta mencatat lebih dari 5500 jiwa dengan usia 36-53 tahun hidup berada di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan dan 4000 di Kelurahan Cipulir. Jumlah responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1.3 Usia Responden

No	Usia	Responden	Persen
1	17-35 tahun	248	62
2	36-53 tahun	131	33
3	54-71 tahun	21	5

N=400

Dapat dilihat pada tabel 4.1.3 usia termuda responden pada penelitian ini adalah 17 tahun sedangkan usia tertua 71 tahun. Kelompok usia 17-35 tahun merupakan kelompok usia terbesar dengan 248 responden atau sebesar 62% dari total responden dalam penelitian ini. Kelompok usia dengan posisi di tengah adalah kelompok responden dengan usia 36-53 tahun yang berjumlah 131 orang atau sekitar 33%, sedangkan kelompok dengan usia 54-71 adalah kelompok responden paling sedikit karena hanya berjumlah 5% atau 21 responden dari 400 responden.

Selain menggambarkan identitas yang melekat pada diri responden, penelitian ini juga menjabarkan identitas pencapaian diri yang ada pada responden seperti pendidikan, pekerjaan, jabatan dan pernikahan. Pendidikan dalam penelitian ini dibagi ke dalam 3 tingkatan yaitu rendah, menengah dan tinggi. Tingkat pendidikan dikatakan rendah apabila responden tidak sekolah, tidak tamat SD, Tamat SD, Tamat Madrasah Ibtidaiyah

dan Tamat SLTP atau Tamat Sekolah Setingkat SLTP. Tingkat Pendidikan Menengah jika responden Lulus SLTA dan Lulus sekolah setingkat SLTA, sedangkan yang masuk klasifikasi tingkat pendidikan tinggi adalah responden yang lulus Perguruan Tinggi dan Tamat Pascasarjana.

Data yang terkumpul menunjukkan responden dengan tingkat pendidikan menengah (Tamat SLTA ataupun Madrasah Aliyah) merupakan gambaran kelompok responden terbesar, lebih dari 55% responden berada dalam kelompok ini sebaliknya kelompok responden terkecil adalah responden dengan tingkat pendidikan rendah, kelompok responden ini hanya sekitar 8% dari jumlah total responden yang ada. Jumlah responden dengan tingkat pendidikan tinggi juga terbilang cukup tinggi sekitar 35% responden dalam penelitian ini memiliki pendidikan tinggi atau tamat perguruan tinggi dan pasca sarjana. Jumlah responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.1.4 dan tabel 4.1.5 setelah diklasifikasikan dibawah ini.

Tabel 4.1.4 Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Responden	Persen
1	Tidak Sekolah	5	1
2	Tidak Tamat SD	2	0.5
3	Tamat SD	8	1.5
4	Tamat SLTP	14	3
5	Tamat Madrasah Tsanawiyah	4	1
6	Tamat SLTA	185	44
7	Tamat Madrasah Aliyah	51	13

8	Tamat Perguruan Tinggi	139	35
9	Tamat Pasca Sarjana	2	0.5

N=400

Tabel 4.1.5 Klasifikasi Jenjang Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persen
1	Rendah	33	8
2	Menengah	226	57
3	Tinggi	141	35

N=400

Dilihat pada tabel 4.1.4 jumlah responden dengan pendidikan menengah (Lulus SLTA ditambah dengan Tamat Madrasah Aliyah) berjumlah 226 orang (57%) yaitu sebanyak 175 responden merupakan lulusan SLTA dan 51 responden Tamat Madrasah Aliyah, sedangkan responden dengan pendidikan tinggi (Tamat Perguruan tinggi dan pascasarjana) sebesar 35% atau sebanyak 141 orang terbagi atas 139 responden Tamat Perguruan tinggi dan 2 responden Tamat Pascasarjana. Jumlah responden dengan pendidikan rendah (Tidak Sekolah sampai dengan tamat Madrasah Tsanawiyah) berjumlah 33 orang atau hanya sebesar 8%, terdiri dari 5 responden Tidak Sekolah, 2 responden tidak Tamat SD, 8 responden Tamat SD, 4 responden lulus Madrasah tsanawiyah dan sebanyak 14 responden Tamat SLTP.

Selain Pendidikan, penelitian ini juga menggambarkan pekerjaan responden sebagai salah satu identitas pencapaian diri responden. Aturan mengenai Poligami di Indonesia berkaitan erat dengan pekerjaan seseorang. Seseorang yang bekerja sebagai Pejabat Negara, Aparat Negara, TNI, Kepolisian dan perusahaan BUMN secara jelas



diatur oleh Negara dalam hal perkawinan. Ada peraturan jelas dan tertulis mengenai hal ini, seseorang yang bekerja di institusi seperti yang disebutkan diatas tidak diizinkan memiliki isteri lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan tanpa seizin Negara. Salah satu Peraturan Pemerintah akan hal itu adalah PP no 10 tahun 1983 yang berfungsi mengatur PNS, TNI, Polisi dalam masalah perkawinan khususnya poligami. Berdasarkan peraturan ini penulis mengklasifikasikan pekerjaan responden menjadi 2 kelompok besar yaitu Kelompok responden yang bekerja sebagai Aparat Negara (responden yang bekerja sebagai PNS, Anggota TNI, Anggota Kepolisian atau bekerja di perusahaan BUMN) dan Kelompok responden yang bekerja diluar institusi Pemerintahan, TNI dan Kepolisian, penulis mengistilah kelompok ini Bukan Aparat Negara.

Sebagian besar responden atau lebih dari 86% responden menjawab bekerja bukan sebagai Aparat Negara, artinya sebagian besar responden tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bukan Anggota Tentara Republik Indonesia (TNI), bukan anggota Kepolisian dan tidak bekerja di perusahaan BUMN. Kebanyakan dari responden bekerja di perusahaan Swasta Nasional, perusahaan Swasta asing, Aktivis LSM, Pedagang, Pemilik Usaha, Pekerja honorer, Tidak bekerja, Ibu Rumah Tangga atau pelajar. Sebaliknya hanya 14% dari total responden yang bekerja sebagai Aparat Negara.

Tabel 4.1.6 Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Responden	Persen
1	Pengusaha/Wirausaha	27	7
2	Karyawan Lepas	33	8
3	Mahasiswa/Pelajar	59	15
4	Ibu Rumah Tangga	34	8
5	Tidak Bekerja	13	5

6	PNS Golonegan IIIA	22	3
7	PNS DIBawah Golongan IIIA	7	4
8	TNI/Polri	17	5.5
9	Karyawan BUMN	11	2
10	Karyawan Swasta Nasional	90	22.5
11	Karyawan Swasta Asing	20	5
12	Aktivis LSM	38	9
13	Pedagang	29	7

N=400

Tabel 4.1.7 Klasifikasi Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Responden	Persem
1	Bekerja sebagai Aparat Negara	57	14
2	Bukan Aparat Negara	343	86

N=400

Pada tabel 4.1.6 diatas menunjukkan sebanyak 343 responden atau bisa dikatakan 86% dari 100% responden bekerja Bukan Aparat Negara. Pekerjaan 343 responden terbagi atas (lihat Tabel 4.1.7) 90 responden (22.5%) adalah Karyawan Swasta Nasional, 59 responden Mahasiswi/Pelajar atau sebesar 15%, 38 (9.5%), responden Staf/Pegawai/Aktivis Lembaga Sosial Non Pemerintah, 34 responden (8.5%) Ibu Rumah Tangga 33 responden (8%), Karyawan Lepas 27 (7%) responden, wirausaha dan 13 (3%)

responden tidak bekerja sedangkan responden yang bekerja sebagai aparat Negara sebesar 4 % atau sebanyak 57 orang yang terbagi atas 17 (4%) responden bekerja sebagai anggota TNI/Polri berpangkat prajurit, 22 (5.5%) Presponden bekerja sebagai PNS dibawah Golongan IIIA, 7 (2%) responden merupakan PNS Diatas Golongan IIIA dan 11 responden bekerja di perusahaan BUMN.

Hal menarik lain dalam identitas pencapain diri adalah status pernikahan responden. Variabel ini menjadi penting karena penelitian ini merupakan penelitian sikap dalam hal campur tangan pemerintah dalam poligami. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganut sistem perkawinan monogami, status pernikahan akan menjadi variabel penting dalam melihat masalah ini. Data yang terkumpul menunjukkan berdasarkan status pernikahan, kelompok responden dengan status menikah merupakan kelompok terbesar dibandingkan dengan status responden yang belum menikah. Kelompok responden Tidak Menikah merupakan kelompok responden terendah.

Tabel 4.1.8 Status Pernikahan Responden

No	Status Pernikahan	Responden	Persen
1	Belum Menikah	134	34
2	Tidak Menikah	4	1
3	Menikah	252	63
4	Janda/Duda Cerai	1	0
5	Janda/Duda Kematian	9	2

N=400

Tabel 4.1.9 Klasifikasi Status Pernikahan Responden

No	Status Pernikahan	Responden	Persen
1	Belum Menikah	138	35
2	Menikah/Pernah Menikah	262	65

N= 400

Pada tabel 4.1.9 di atas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini yang berstatus belum menikah lebih sedikit dibandingkan dengan responden yang berstatus sudah menikah. Responden dengan status menikah berjumlah lebih dari 63% atau sebanyak 252 reponden sedangkan responden yang belum menikah berjumlah 134 orang atau sebesar 33.5% dari total responden yang ikut dalam penelitian ini. Responden yang berstatus Janda ataupun duda hanya selisih 1.6% dengan responden yang tidak menikah, responden dengan status Janda/duda sebesar 2.6 % atau sebanyak 10 orang yang terbagi atas Janda/duda cerai 1 orang dan Janda/Duda kematian 9 orang sedangkan yang tidak menikah berjumlah 4 orang.

Selain dua bentuk identitas diatas penulis juga memasukan variabel Konsumsi Media responden dan Intensitas Responden membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum untuk diteliti. Penulis berasumsi hingga hari ini media massa menembus batas-batas yang bersifat private bagi seseorang dan manusia akan terus dipengaruhi oleh media. Seperti yang dikatakan McLuhan dalam teori ekologi media bahwa kita tidak dapat melarikan diri dari media, Media melingkupi keberadaan kita, media selalu hadir dalam kehidupan kita. McLuhan berpendapat media cukup kuat didalam pandangan seseorang. Sikap dan pengalaman seseorang secara langsung dipengaruhi oleh apa yang ia tonton di televisi dan apa yang ia dengarkan di radio. Media Massa dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada televisi dan radio, penulis juga memasukan media cetak seperti Koran, Tabloid dan Majalah juga Internet.

Data responden mengenai Konsumsi Media dalam hal mencari informasi di media cetak dapat dikatakan responden yang tidak pernah membaca Tabloid merupakan kelompok responden tertinggi, sebanyak 39% responden tidak pernah membaca Tabloid. Sebaliknya Kelompok responden terendah adalah responden yang majalah setiap hari, sekitar 1% dari total responden yang ada. Kelompok tengah adalah responden yang membaca Koran setiap hari, sebanyak 36% responden mengatakan membaca Koran setiap hari.

Untuk Konsumsi media di media elektronik, responden yang menonton televisi merupakan responden tertinggi sebanyak 88% responden mengatakan menonton televisi setiap hari. Kelompok responden terbesar kedua adalah responden yang mendengarkan radio setiap harinya, sebanyak 39% responden menjawab mendengarkan Radio setiap hari. Untuk kelompok responden terendah adalah responden yang mendengarkan radio 1 kali dalam seminggu, kelompok ini hanya sebesar 1% responden dari total responden. Data menunjukkan tidak ada responden yang tidak pernah menonton sama sekali atau menonton kurang dari 4 kali dalam sebulan. Gambaran responden berdasarkan konsumsi media cetak dan media elektronik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1.10 Pola Konsumsi Informasi Melalui Media Cetak

No	Frekuensi	Koran	Tabloid	Majalah
1	Setiap Hari	36	2	1
2	Beberapa hari dalam seminggu	22	20	21
3	1x sebulan	11	19	18
4	< dari 4 kali sebulan	12	20	26
5	Tidak Pernah	18	39	34

N=400

Tabel 4.1.11 Pola Konsumsi Informasi Melalui Media Elektronik

No	Frekuensi	Internet	Radio	Televisi/televisi berebayar
1	Setiap Hari	32	39	88
2	Beberapa hari dalam seminggu	19	26	10
3	1x sebulan	8	1	2
4	< dari 4 kali sebulan	9	11	0
5	Tidak Pernah	32	23	0

N=400

Berdasarkan pada tabel 4.1.10 diatas sebanyak 143 responden atau sebesar 36 % responden dalam penelitian ini mencari informasi melalui koran setiap hari, sebanyak 91 orang (23%) hanya beberapa hari dalam seminggu mencari informasi di koran. Sebanyak 43 responden atau sekitar 11% hanya seminggu sekali mencari informasi di koran dan sebanyak 49 orang atau 12% mencari informasi di Koran kurang dari 4 kali selama sebulan. Sebanyak 74 responden atau sebesar 18 % tidak pernah membaca koran untuk mencari informasi.

Berbeda dengan Koran, kolom Tabloid memperlihatkan 157 responden atau lebih dari 39% dari responden yang ada mengatakan tidak pernah membaca tabloid untuk mencari informasi, lebih dari 20% atau sebanyak 81 responden menjawab hanya membaca Tabloid kurang dari 4 kali dalam sebulan dan sebanyak 77 responden hanya membaca Tabloid seminggu sekali atau 4 kali dalam sebulan. Kurang dari 20% responden yang mengatakan membaca Tabloid beberapa hari dalam seminggu atau sebanyak 78 orang sedangkan yang mengatakan membaca Tabloid setiap hari hanya 7 responden atau kurang dari 2 % dari total responden yang menjawab yaitu sebanyak 400 responden

Untuk kolom Majalah, memperlihatkan 136 responden atau sebanyak 39% dari responden yang ada mengatakan tidak pernah membaca majalah untuk mencari informasi, lebih dari 20% atau sebanyak 83 responden menjawab membaca majalah beberapa hari dalam seminggu dan sebanyak 72 responden hanya membaca Majalah seminggu sekali atau 4 kali dalam sebulan. Lebih dari 26% responden yang mengatakan membaca Majalah kurang dari 4 kali dalam sebulan sedangkan yang menjawab membaca Majalah setiap hari hanya 3 responden atau kurang dari 1 % dari total responden yang menjawab yaitu sebanyak 400 responden.

Pada tabel 4.1.11 di atas dapat dilihat jumlah responden yang menggunakan internet setiap hari sama dengan jumlah responden yang tidak pernah menggunakan internet setiap hari, sebanyak 130 orang atau sebesar 32% responden yang mengatakan menggunakan internet setiap hari dan sebanyak 130 responden juga mengatakan tidak pernah menggunakan internet tiap hari. 76 responden atau sekitar 19% mengatakan bahwa mereka menggunakan internet beberapa hari dalam seminggu, 30 responden mengatakan setidaknya menggunakan internet 1 minggu sekali dan 34 responden atau sebesar 9% mengatakan menggunakan internet kurang dari 4 kali dalam sebulan.

Kolom Radio di atas dapat diketahui bahwa sekitar 39% responden atau 156 orang mengatakan bahwa mereka mencari informasi dengan mendengarkan radio setiap hari, sebanyak 102 orang (26%) mengatakan mereka mendengarkan radio beberapa kali dalam seminggu, 94 responden (23%) mengatakan mereka tidak pernah mencari informasi dengan mendengar radio sedangkan 45 responden (11%) menjawab bahwa mereka mendengarkan radio kurang dari 4 kali dalam sebulan dan hanya 3 responden yang mendengarkan 1 kali dalam seminggu (1%)

Berbeda dengan Internet dan Radio, kolom Televisi menunjukkan mayoritas responden sebanyak 353 88% atau orang menonton televisi/televisi berbayar untuk mendapatkan informasi. Sebanyak 40 responden menonton televisi beberapa hari dalam seminggu, 6 responden mengatakan bahwa mereka hanya 1 kali dalam seminggu

menonton televisi untuk mendapatkan informasi bahkan ada 1 responden dari 400 responden dalam penelitian ini yang menonton televisi kurang dari 1 bulan.

Selain konsumsi media, intensitas responden membaca isu-isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum merupakan salah satu variabel penting yang ikut diteliti. Penulis berasumsi semakin sering responden diterpa oleh isu-isu poligami yang dilakukan oleh artis, pejabat maupun masyarakat umum akan mempengaruhi pola pikir, persepsi dan sikap responden dalam masalah poligami. Seperti yang dikatakan McLuhan di atas media secara langsung mempengaruhi sikap dan pengalaman seseorang.

Berdasarkan Media Cetak rata-rata responden mengatakan jarang membaca isu poligami yang berkaitan dengan artis, pejabat maupun masyarakat luas baik di Koran, Tabloid maupun Majalah. Di media elektronik rata-rata responden juga mengatakan hal yang sama yaitu jarang membaca isu poligami artis, pejabat maupun masyarakat umum. Tetapi khusus televisi banyak juga responden yang mengatakan mereka cukup sering melihat isu poligami di televisi. Gambaran responden berdasarkan intensitas membaca isu poligami dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.12 Intensitas Membaca, Mendengar dan melihat isu poligami di media cetak

No	Intensitas	Koran	Tabloid	Majalah
1	Sangat Sering	0	0	0
2	Sering	22	15	14
3	Jarang	55	41	48
4	Tidak Pernah	33	44	38

N=400



Tabel 4.1.13 Intensitas Membaca Isu Poligami Artis, Pejabat dan Masyarakat di Media Elektronik

No	Intensitas	Internet	Radio	Televisi/televisi berbayar
1	Sangat Sering	0	2	3
2	Sering	34	19	45
3	Jarang	44	43	48
4	Tidak Pernah	21	36	4

N=400

Pada tabel 4.1.12 diatas memperlihatkan sebanyak 220 responden atau sebanyak 55.0% orang yang terlibat dalam penelitian ini mengatakan jarang membaca masalah poligami khususnya isu poligami artis, pejabat maupun masyarakat di Koran, kurang dari 23% atau sebanyak 89 responden mengatakan cukup sering membaca isu poligami artis, pejabat maupun masyarakat umum di Koran. Sebesar 2.8% atau 91 responden dari total 400 responden yang menjawab mengatakan tidak pernah membaca isu poligami yang berkaitan dengan artis, pejabat maupun masyarakat umum

Untuk kolom Tabloid sebanyak 175 responden atau sebesar 44% dari 400 responden menjawab tidak pernah membaca masalah poligami khususnya yang berkaitan dengan poligami artis, pejabat maupun masyarakat umum. Sebesar 62 responden atau 15% menjawab cukup sering membaca isu poligami artis, pejabat maupun masyarakat umum di Tabloid yang mereka baca. Lebih dari 41% atau sebanyak 163 responden dari total responden yang ikut dalam penelitian mengatakan jarang mereka membaca isu poligami artis, pejabat ataupun masyarakat diberitakan di Tabloid.

Di kolom Majalah memperlihatkan sebanyak 199 responden atau sebanyak 48% orang yang terlibat dalam penelitian ini mengatakan jarang membaca masalah poligami khususnya isu poligami artis, pejabat maupun masyarakat di Majalah, bahkan sebesar 38% atau 152 responden mengatakan tidak pernah membaca isu poligami artis, pejabat maupun masyarakat umum di Majalah. Hanya 57 responden dari total 400 responden dalam penelitian ini yang mengatakan cukup sering membaca isu poligami yang berkaitan dengan artis, pejabat maupun masyarakat umum di Majalah.

Berdasarkan tabel 4.1.13 diatas 137 responden atau sebesar 34% dari jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi mengenai poligami artis, pejabat maupun masyarakat umum di Internet. Kelompok ini lebih banyak dibandingkan oleh kelompok responden yang mengatakan bahwa mereka sering membaca isu poligami artis, pejabat ataupun masyarakat umum di Internet, kelompok yang mengatakan sering mendapatkan informasi seputar poligami artis, pejabat ataupun masyarakat sebesar 21% atau 81 orang sedangkan lebih dari 45% responden atau sebanyak 182 orang mengatakan mereka cukup jarang mendapatkan informasi mengenai poligami artis, pejabat ataupun masyarakat umum.

Pada Kolom Radio dapat dilihat bahwa 173 responden atau lebih dari 43% dari jumlah responden dalam penelitian ini menjawab jarang mendengar masalah poligami khususnya isu poligami artis, pejabat maupun masyarakat luas diberitakan di radio. 144 responden (36%) bahkan tidak pernah mendengar masalah poligami artis, pejabat maupun masyarakat umum di Radio, hal ini berbeda dengan 75 (19%) responden yang mengatakan cukup sering mendengar masalah poligami di radio bahkan 4 responden mengatakan sangat sering mereka mendengar isu poligami artis, pejabat ataupun masyarakat umum dibahas di Radio

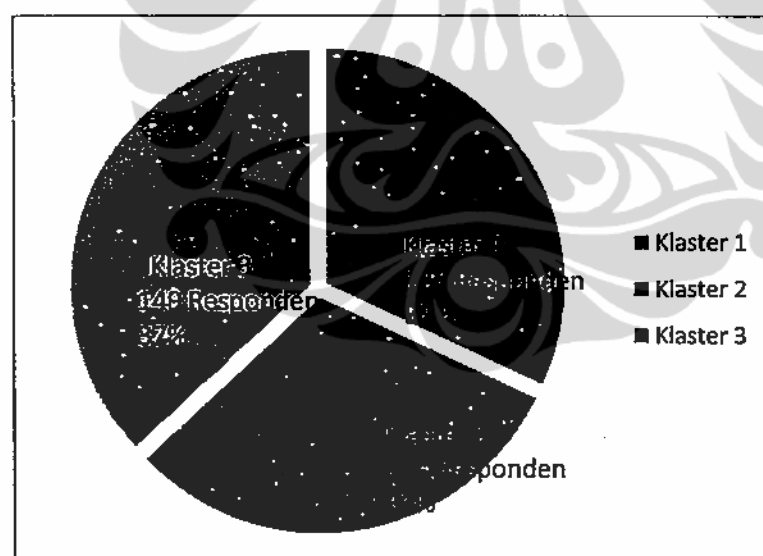
Kolom majalah menunjukkan dari 400 responden yang ada dalam penelitian ini, sebanyak 192 responden atau sebesar 48% menjawab jarang menonton masalah poligami khususnya poligami artis, pejabat ataupun masyarakat umum di televisi ataupun televisi berbayar. 179 responden atau lebih dari 44% mengatakan mereka cukup sering menonton

masalah poligami artis, pejabat maupun masyarakat umum, bahkan 13 responden mengatakan mereka sangat sering menonton masalah poligami artis, pejabat maupun masyarakat umum di televisi ataupun televisi berbayar hanya 16 responden yang mengatakan mereka tidak pernah menonton atau melihat isu poligami yang melibatkan artis, pejabat maupun masyarakat umum di televisi maupun televisi berbayar.

#### 4.2 . Analisis Pembentukan dan Keanggotaan Klaster

Hasil analisa pengelompokan dengan menggunakan metode Two Step Cluster, menunjukkan terbentuknya tiga kelompok diikuti oleh pembagian seluruh responden ke dalam tiga kelompok yang berbeda dengan proporsi yang berbeda pula. Frekuensi dan proporsi masing-masing klaster (kelompok ) terpaparkan dalam grafik berikut ini.

Grafik 4.2.1. Frekuensi dan Proporsi Keanggotaan Tiga Kelompok



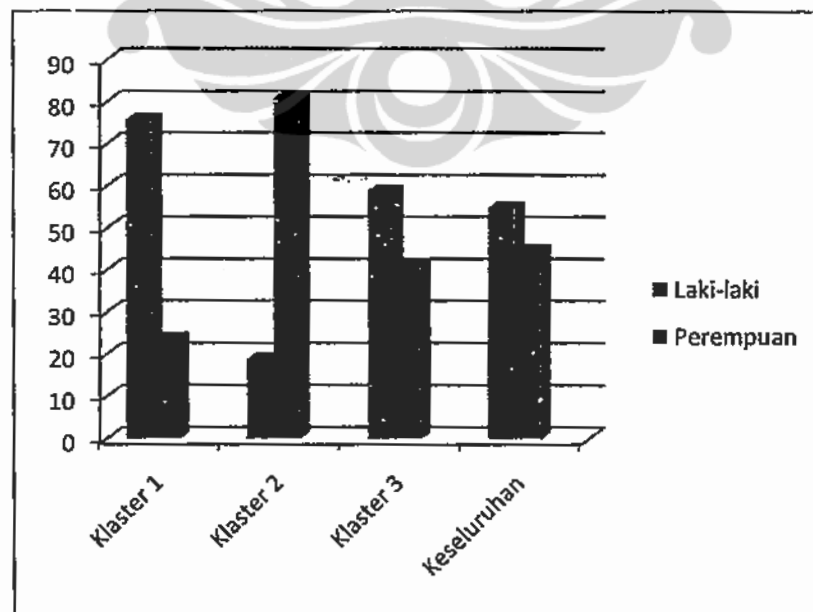
Berdasarkan pada grafik di atas, Klaster III merupakan kelompok yang memiliki anggota terbanyak dibandingkan dengan dua klaster lainnya. Kelompok ini terdiri dari 149 responden (37 %). Klaster II merupakan kelompok dengan jumlah anggota terkecil,

sebanyak 124 responden (31%). Sedangkan Klaster I memiliki keanggotaan 127 responden (32%).

Sekalipun keanggotaan masing-masing klaster tidak sama besar, namun dari sisi proporsi perbedaan ketiga klaster tersebut, baik antara klaster dengan proporsi terbesar maupun terkecil, tidak terlalu berjarak ekstrim. Kondisi demikian tergolong cukup baik, tidak berpotensi menghambat dalam penganalisisan selanjutnya, khususnya dalam menganalisis karakteristik dari masing-masing kelompok.

Perbedaan jumlah anggota masing-masing klaster diikuti pula oleh perbedaan karakteristik masing-masing kelompok tersebut. Berdasarkan jenis kelamin responden, misalnya, perbedaan masing-masing klaster tampak seperti yang dipaparkan pada grafik berikut ini

Grafik 4.2.2 Perbedaan Karakteristik Jenis Kelamin Responden Berdasarkan Klaster yang Terbentuk

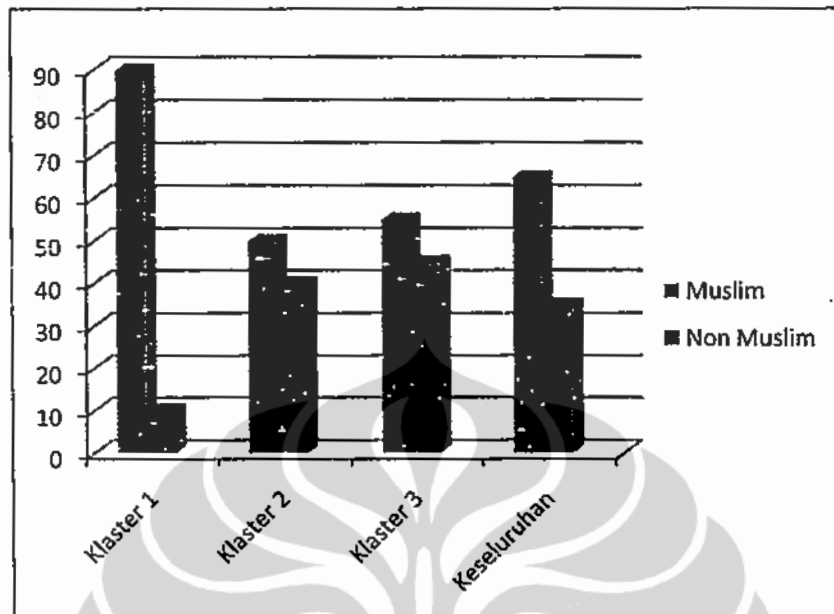


Berdasarkan jenis kelamin, proposi Klaster III mirip dengan perimbangan proposi keseluruhan, tidak terjadi perbedaan ekstrim antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam klaster. Dilihat dari grafik diatas Klaster I diisi oleh sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 97 responden (76%) sedangkan responden perempuan berjumlah 30 orang atau sebesar 24%. Di sisi lain, pada Klaster II proporsi mereka yang berjenis kelamin laki-laki tampak lebih kecil dari pada mereka yang berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 100 responden (81%) perempuan berada di kelompok II dan Laki-laki hanya 24 responden atau sebesar 19%. Hal berbeda juga terlihat pada Klaster III, kelompok ini dipenuhi oleh responden laki-laki tetapi tidak terlalu berbeda jauh, sebanyak 88 (59%) responden laki-laki ada dalam kelompok ini sedangkan responden perempuan berjumlah 61 orang atau sebesar 41%. Melihat karakteristik pengelompokan semacam ini, tampak benar bahwa jenis kelamin responden menjadi salah satu faktor yang membedakan pengelompokan masing-masing responden ke dalam kluster yang berbeda-beda.

Perbedaan karakteristik antar kelompok juga terjadi apabila dikaji berdasarkan karakteristik agama yang dianut oleh masing-masing responden. Berdasarkan karakteristik ini perimbangan proposi agama responden pada ketiga kelompok ini jauh berbeda dengan perimbangan proposi agama keseluruhan responden. Klaster I merupakan kelompok yang berisikan mayoritas responden beragama Islam. Di sisi lain, pada Klaster II dan III walaupun dipenuhi oleh responden yang beragama Islam tetapi proporsi Non Muslim jauh lebih banyak dibandingkan dengan Klaster I.

Perbandingan setiap klaster berdasarkan karakteristik agama dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.2.3 Perbedaan Karakteristik Agama Responden Berdasarkan Klaster yang Terbentuk

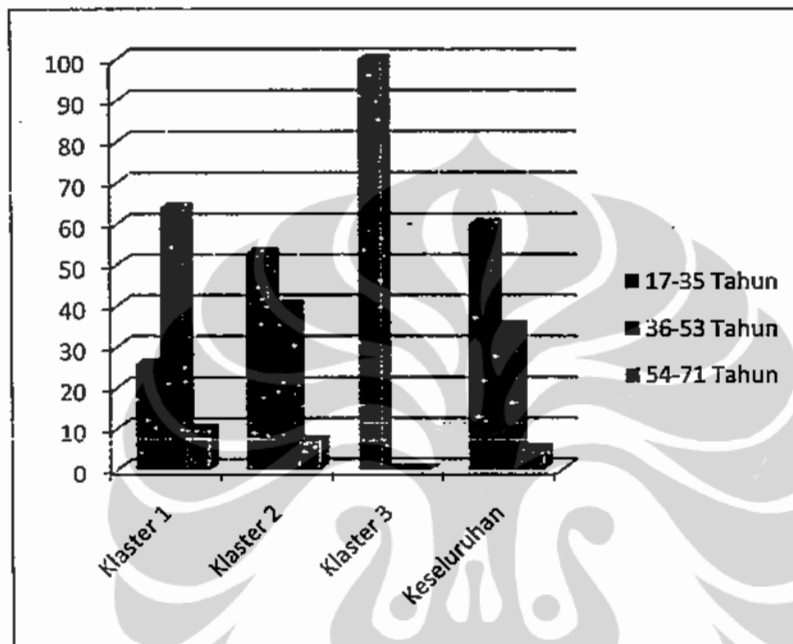


Berdasarkan pada grafik di atas, jumlah responden beragama Islam pada Klaster I sebesar 90% dan Non Muslim 10% sedangkan pada Klaster II jumlah responden beragama non muslim 40% dan Islam 50%. Klaster III jumlah responden muslim sebesar 55% dan Non Islam 45%.

Pada karakteristik usia setelah dilakukan analisa Two step cluster analysis memperlihatkan perimbangan proporsi keseluruhan jauh berbeda dengan perimbangan proporsi usia pada ketiga kelompok yang terbentuk. Berdasarkan karakteristik usia responden, terdapat dua kelompok yang menunjukkan persamaan dalam kelompok usia yaitu Klaster II dan Klaster III, kedua kelompok ini lebih banyak dipenuhi responden berusia antara 17-35 tahun. Rentang usia yang berbeda ada dalam Klaster I, responden yang masuk dalam kelompok ini semuanya berusia antara 17-35 tahun. Walaupun terjadi kesamaan karakteristik berdasarkan usia di dua kelompok, hal ini tidak merubah penilaian bahwa usia menjadi salah satu faktor yang membedakan pengelompokan masing-masing responden pada tiap-tiap klaster yang terbentuk.

Perbandingan setiap klaster berdasarkan usia dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.2.4 Perbedaan Kateristik Usia Responden berdasarkan Klaster yang Terbentuk



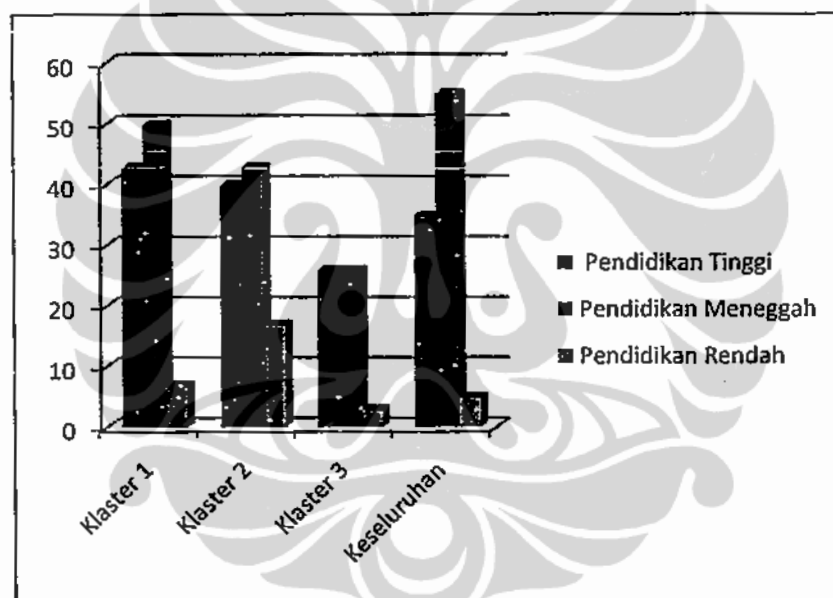
Berdasarkan grafik di atas, pada Klaster I sebanyak 81 responden (64%) berusia antara 36-53 tahun, 33 responden (26%) berusia antara 17-35 tahun dan 13 responden berusia 53-71 tahun atau sebesar 10%. Di Klaster II 66 responden (53%) masuk dalam kategori usia 17-35 tahun dan 50 responden (40%) berada dalam rentang usia 36-53 tahun hanya 8 responden (7%) yang berusia 53-71 tahun. Hal berbeda nampak pada Klaster III, kelompok ini diisi oleh responden berusia 17-35 tahun secara keseluruhan atau sebesar 100%.

Hasil analisis memperlihatkan berdasarkan kateristik pendidikan perimbangan proporsi responden tidak terlalu jauh berbeda dengan proporsi keseluruhan. Persamaan terlihat pada ketiga kelompok berdasarkan karakteristik pendidikan. Setelah dilakukan analisa, ketiga klaster yang terbentuk menunjukkan bahwa rata-rata responden yang

terdapat di Klaster I, II dan III lebih banyak berpendidikan menengah (lulus setingkat SMA).

Perbandingan setiap klaster berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.2.5 Perbedaan Kateristik Pendidikan Responden berdasarkan Klaster yang Terbentuk



Berdasarkan grafik di atas, karakteristik pendidikan memang memiliki kesamaan di tiap klaster tetapi persentase jumlah responden berdasarkan karakteristik pendidikan (Rendah, Menengah dan Tinggi) berbeda di ketiga klaster yang terbentuk. Jumlah responden berpendidikan menengah di Klaster I sebesar 50% atau sebanyak 64 responden dari jumlah total responden di Klaster I, untuk responden dengan pendidikan tinggi sebanyak 54 orang atau sebesar 43% dan pendidikan rendah sebanyak 9 orang atau sebesar 7%. Di Klaster II responden berpendidikan menengah sebanyak 43% atau 53 responden, responden berpendidikan tinggi sebesar 40% (50responden) sedangkan responden yang berpendidikan rendah sebanyak 21 orang (17%).

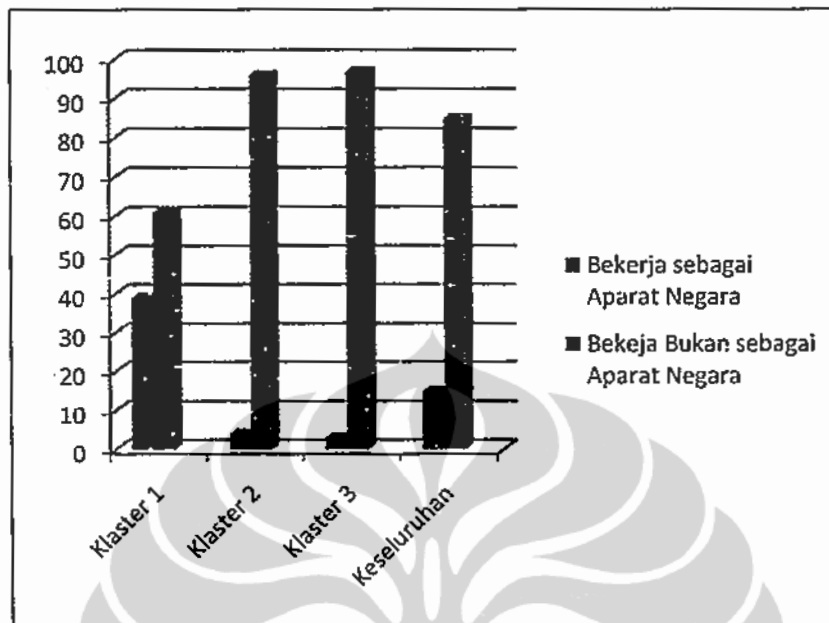


Perbedaan jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan juga terlihat di Klaster III. Pada kelompok ini responden dengan pendidikan tinggi berjumlah 26% atau sebanyak 37 responden, pendidikan menengah 26% atau 100 responden (71%) dan pendidikan rendah sebesar 3% atau 3 orang. Melihat karakteristik pengelompokan semacam ini walaupun memiliki kesamaan tetapi tampak benar dari perbedaan jumlah responden di setiap kelompok yang terbentuk menunjukkan pendidikan menjadi salah satu faktor pembeda dalam pengelompokan responden di tiap-tiap klaster.

Berdasarkan karakteristik pekerjaan hasil analisis menggambarkan perimbangan proporsi keseluruhan tidak terlalu berbeda jauh dengan proporsi klaster yang terbentuk. Selain itu terdapat persamaan antar kelompok bila dilihat dari karakteristik pekerjaan. Klaster I, II dan Klaster III lebih banyak berisikan responden yang bekerja Bukan Aparat Negara, artinya kebanyakan responden yang masuk ke dalam ketiga kelompok ini kemungkinan bekerja sebagai ibu rumah tangga, karyawan swasta asing, karyawan swasta nasional, tenaga lepas, aktivis, pedagang, wirausaha atau merupakan mahasiswa/pelajar. Kesamaan lain juga terlihat di Klaster II dan III, kedua kelompok ini jumlah responden yang bekerja sebagai Aparat Negara (anggota TNI/Polri, PNS atau bekerja di perusahaan BUMN) tidak terlalu berbeda jauh

Perbandingan setiap klaster berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada garfik dibawah ini

Grafik 4.2.6 Perbedaan Kateristik Pekerjaan berdasarkan Klaster yang Terbentuk.

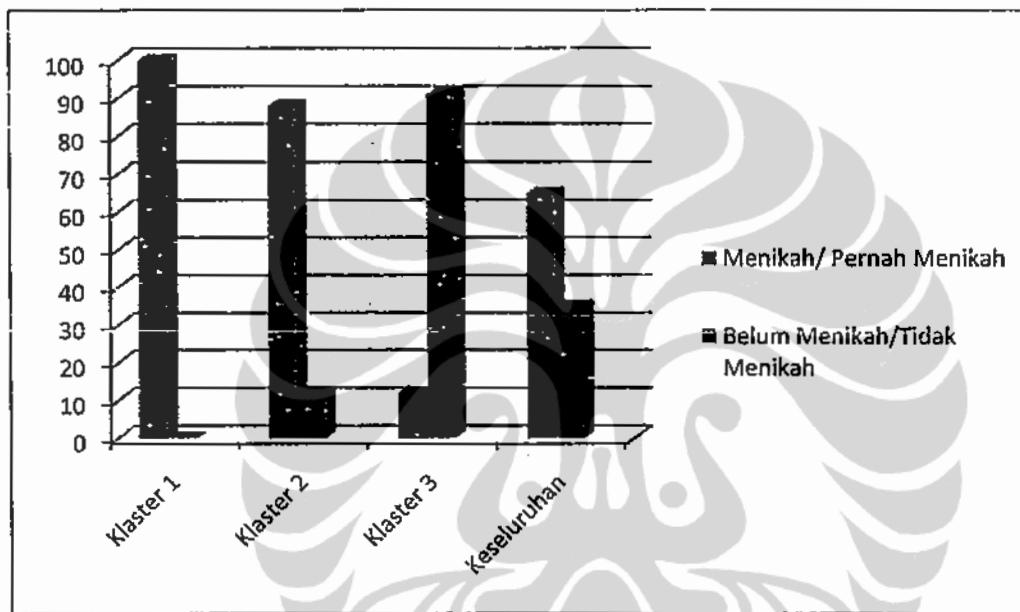


Berdasarkan grafik di atas, karakteristik berdasarkan pekerjaan memang memiliki kesamaan di tiap klaster tetapi persentase jumlah responden berdasarkan karakteristik ini ( Aparat Negara dan Bukan Aparat Negara) berbeda di ketiga klaster yang terbentuk. Di Kelompok I Sebanyak 77 responden (61%) bekerja Bukan sebagai Aparat Negara dan 50 responden atau sebesar 39% bekerja sebagai Aparat Negara, di Klaster II juga dipenuhi oleh responden yang bekerja Bukan sebagai Aparat Negara sebanyak 120 responden ayau sebesar 96% masuk dalam kategori ini hanya 4 responden yang bekerja sebagai Aparat Negara. Hal yang sama juga terlihat di Klaster III, klaster ini didominasi oleh responden yang bekerja Bukan sebagai Aparat Negara hanya 3 responden yang bekerja sebagai aparat negara.

Untuk karakteristik berdasarkan status pernikahan pertimbangan proposi keseluruhan dan klaster yang terbentuk sangat jauh berbeda. Klaster I secara keseluruhan dipenuhi oleh responden yang berstatus pernah menikah. Klaster II sedikit berbeda, di klaster ini terdapat sebagian kecil responden dengan status belum menikah. Sebaliknya, pada Klaster III lebih banyak dipenuhi oleh responden yang belum menikah dibandingkan dengan responden yang pernah menikah.

Perbandingan setiap klaster berdasarkan kateristik satus pernikahan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

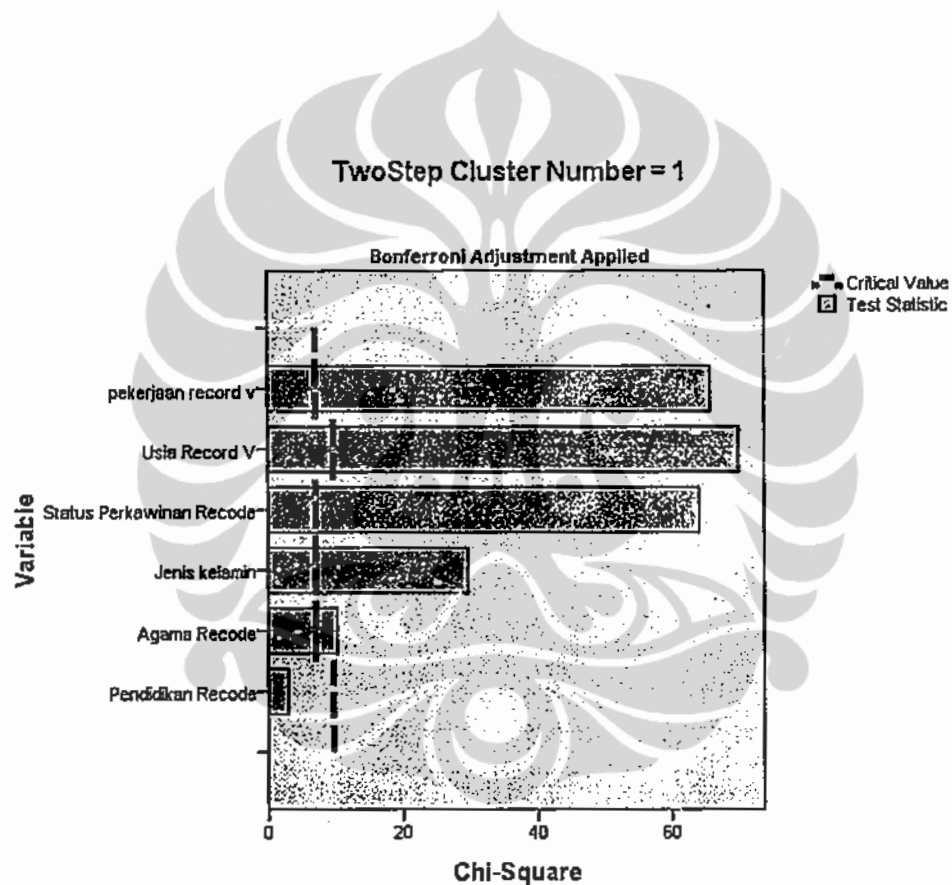
Grafik 4.2.7 Perbedaan Karakteristik Status Pernikahan Responden Berdasarkan Klaster yang Terbentuk



Berdasarkan grafik di atas jumlah responden berdasarkan status pernikahan berbeda antara tiap-tiap klaster yang terbentuk. Dalam Klaster I hanya diisi oleh responden dengan status pernah menikah sebanyak 127 responden. Pada Klaster II jauh lebih banyak diisi oleh responden yang berstatus pernah menikah sebanyak 109 responden dan hanya 15 responden belum menikah masuk dalam kelompok ini. Hal berbeda bila melihat Klaster III, klaster ini lebih banyak dipenuhi oleh responden dengan status belum menikah sebanyak 119 responden (91%) dibandingkan dengan responden yang berstatus pernah menikah hanya sebesar 8% atau 30 responden.

Hasil uji statistik dengan menggunakan metode Chi-Square, menunjukkan terbentuknya tiga kelompok (klaster) memiliki karakteristik identitas yang membedakan antar klaster yang terbentuk. Karakteristik yang menonjol pada setiap kelompok (klaster) dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

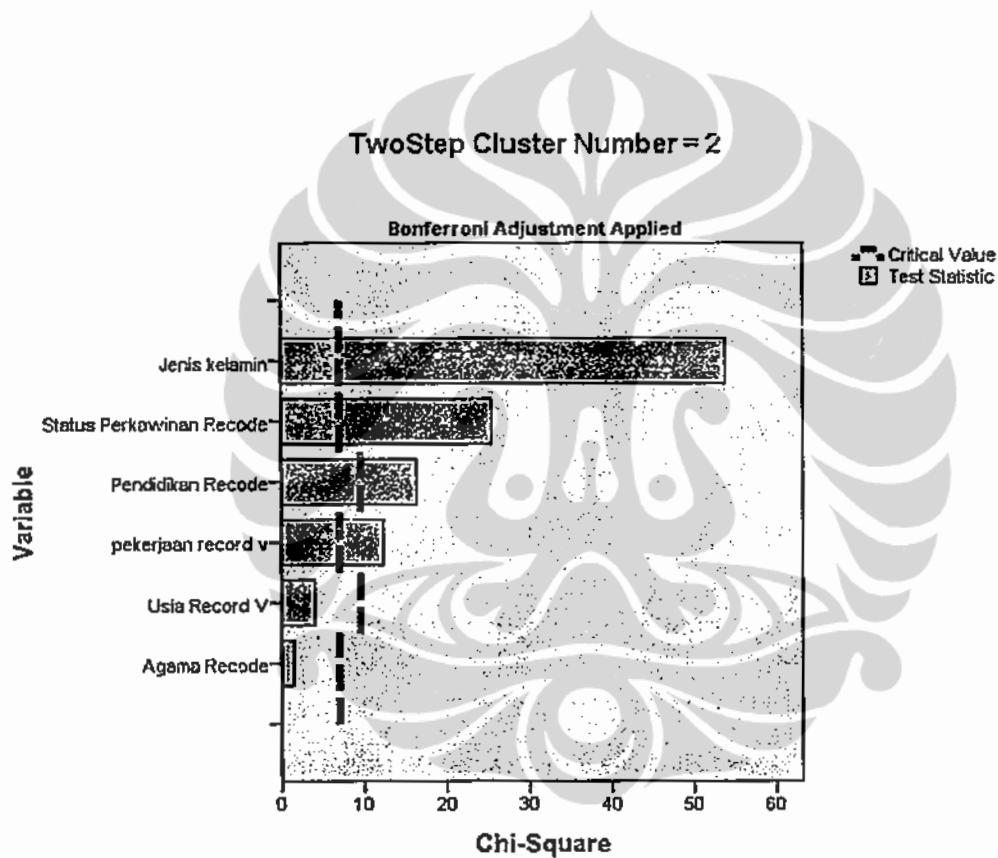
Grafik 4.2.8 Ciri Khas Karakteristik Identitas Responden di Klaster I



Berdasarkan grafik di atas dapat ditarik kesimpulan identitas responden yang menjadi pembeda atau merupakan ciri khas pada Klaster I adalah karakteristik identitas berdasarkan pekerjaan, usia, status perkawinan, jenis kelamin dan agama yang dianut responden dalam klaster ini. sedangkan karakteristik identitas berdasarkan pendidikan bukan pembeda atau bukan merupakan ciri khas Klaster I dibandingkan dengan klaster lainnya.

Hal yang sama juga dapat kita lihat pada Klaster II, di klaster ini karakteristik identitas yang menjadi ciri khas sedikit berbeda dengan karakteristik yang melekat di Klaster I. Karakteristik identitas yang menonjol pada Klaster II dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

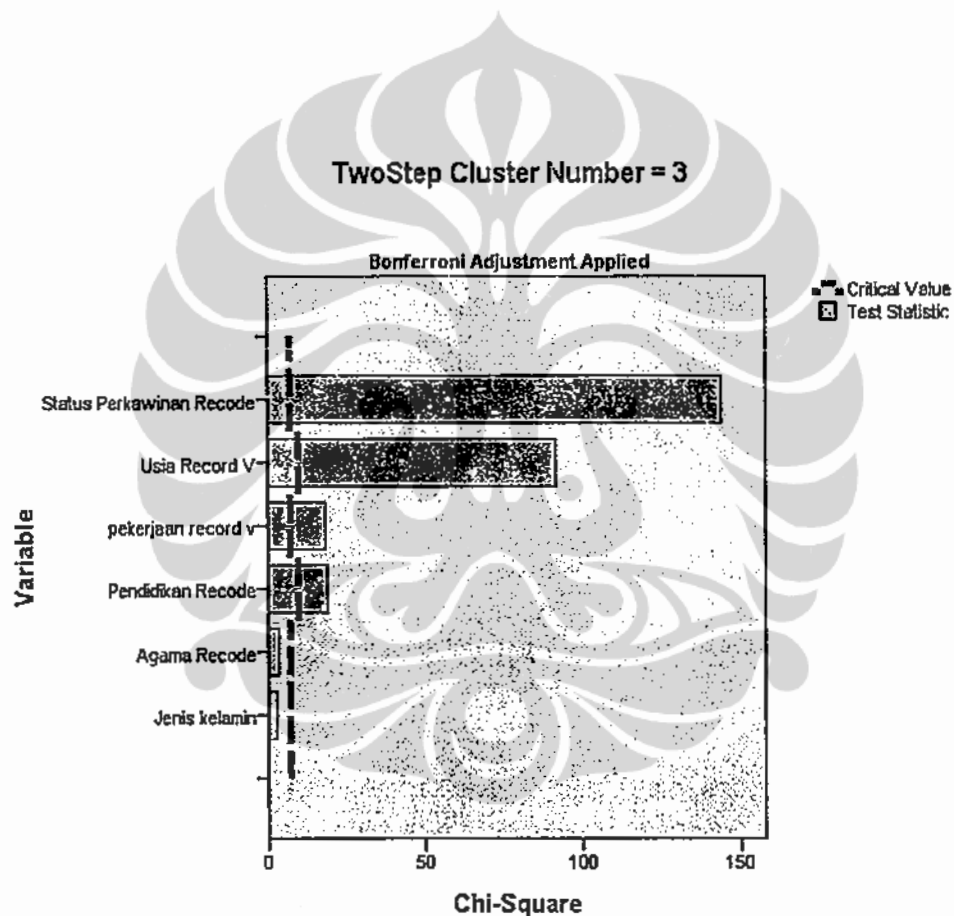
Grafik 4.2.9 Ciri Khas Karakteristik Identitas Responden di Klaster II



Bila dilihat pada grafik diatas maka identitas responden yang menjadi pembeda atau merupakan ciri khas yang berada di Klaster II adalah karakteristik identitas berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan dan pekerjaan. di Kluster ini usia dan agama bukanlah karakteristik yang menonjol atau pembeda bila dibandingkan dengan klaster lainnya.

Di sisi lain Klaster III juga memiliki karakteristik ciri khas yang membedakan klaster ini dengan klaster lainnya. Pada klaster ini jumlah karakteristik identitas yang menjadi pembeda sama dengan Klaster II. Karakteristik identitas yang menonjol pada Klaster III dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

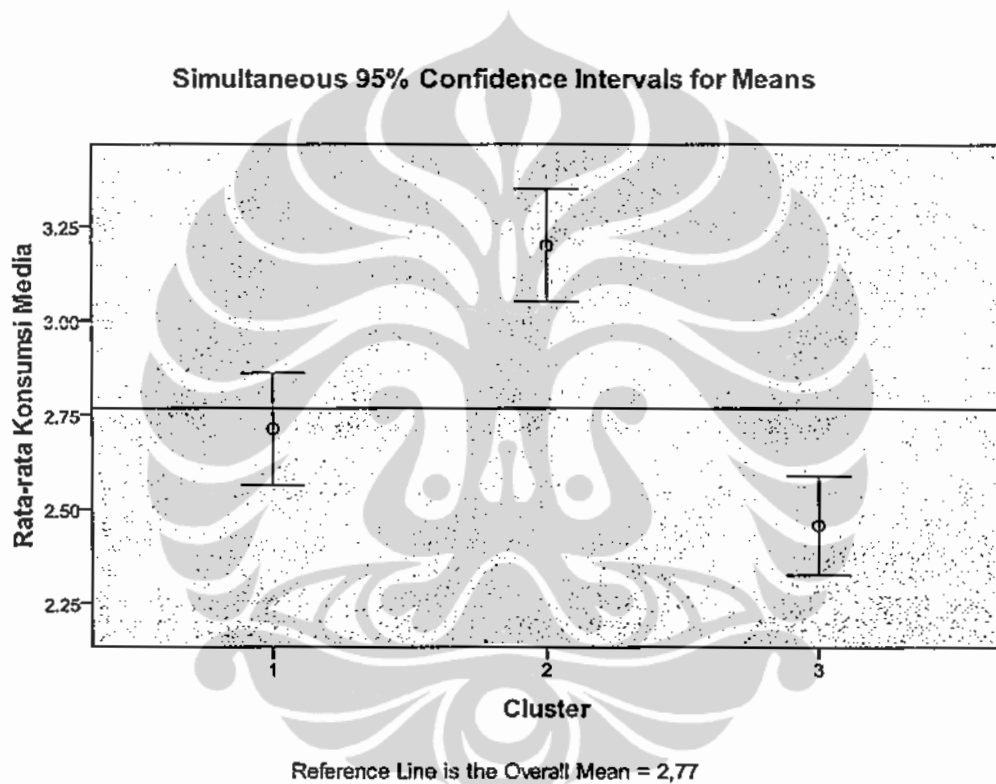
Grafik 4.2.10 Ciri Khas Karakteristik Identitas Responden di Klaster III



Apabila dilihat pada grafik di atas maka identitas responden yang menjadi pembeda atau merupakan ciri khas yang berada di Klaster III yaitu karakteristik identitas berdasarkan status perkawinan, usia, pekerjaan dan karakteristik identitas berdasarkan pendidikan. Dua variabel lainnya agama dan jenis kelamin tidak membedakan klaster ini dengan dua klaster lainnya.

Perbedaan karakteristik identitas yang ada pada responden diikuti pula oleh perbedaan kebiasaan responden dalam mengkonsumsi media. Dalam hal ini perbedaan masing-masing kelompok tampak seperti yang dipaparkan pada grafik berikut ini

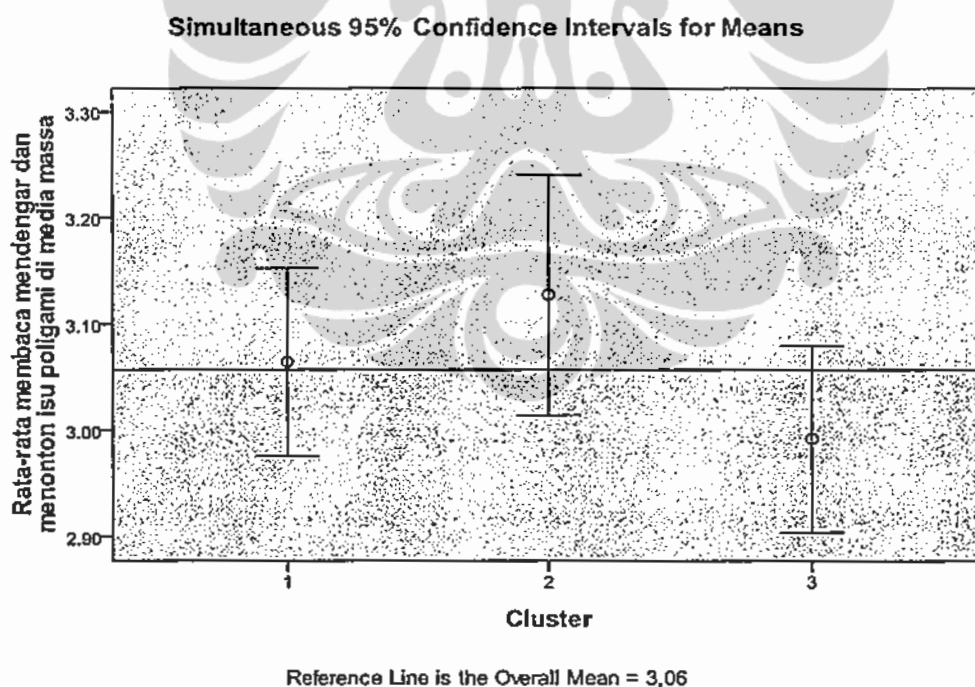
Grafik 4.2.11 Perbedaan Karakteristik Kebiasaan Responden dalam Mengkonsumsi Media Berdasarkan Klaster yang Terbentuk



Dilihat pada grafik di atas memang terdapat perbedaan dari pola kebiasaan dalam mengkonsumsi media di tiap-tiap klaster yang terbentuk. Berdasarkan grafik, Klaster II merupakan kelompok yang paling jarang mencari informasi di media massa. Di sisi lain, Klaster III adalah kelompok yang responden di dalamnya aktif menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhan mereka akan informasi. Klaster I merupakan kelompok yang dipenuhi oleh responden dengan kebiasaan cukup sering mencari informasi dengan menggunakan media massa.

Pola kebiasaan mengonsumsi media tidak hanya dilihat dari berapa sering responden mencari informasi di media massa tetapi intensitas mereka membaca, mendengar atau menonton isu yang berkaitan dengan poligami artis, pejabat dan masyarakat juga menjadi salah satu karakteristik pembeda di setiap kelompok yang terbentuk. Perbedaan masing-masing klaster berdasarkan intensitas membaca, mendengar dan menonton isu poligami terlihat pada grafik dibawah ini

Grafik 4.2.12. Perbedaan Karakteristik Responden Dalam Hal Intensitas Membaca, Mendengar dan Menonton Isu Poligami Berdasarkan Klaster yang Terbentuk



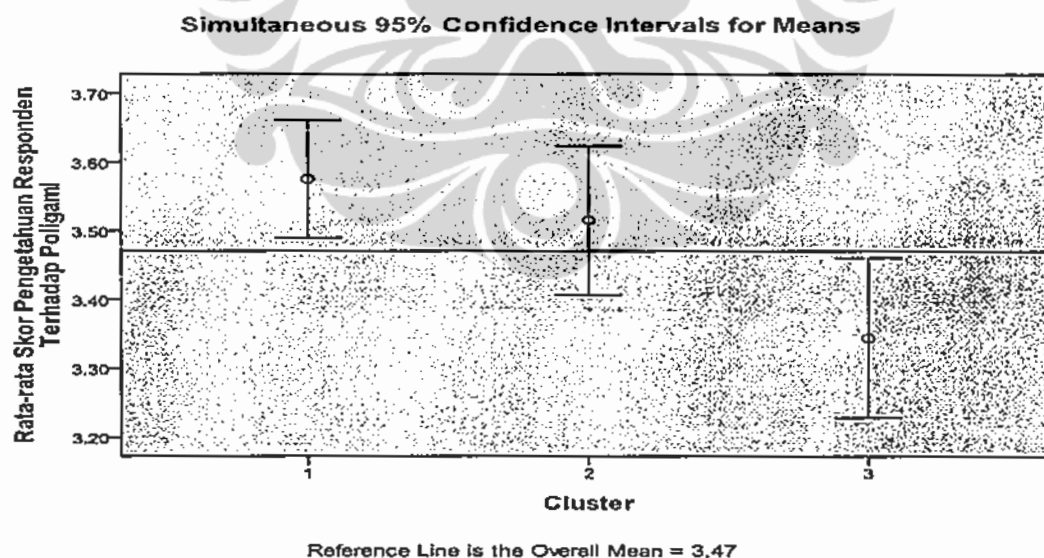
Berdasarkan grafik di atas perbedaan pola konsumsi media diikuti pula oleh perbedaan membaca, mendengar atau menonton isu poligami di media massa. Grafik di atas memperlihatkan bahwa Klaster II merupakan kelompok yang paling jarang diterpa



isu poligami oleh media massa sedangkan Klaster III merupakan kelompok yang dipenuhi oleh responden yang mengaku sangat sering mendengar, melihat ataupun menonton isu poligami di media massa. Di Klaster II, rata-rata responden yang masuk dalam klaster ini menyatakan bahwa mereka tidak terlalu sering mendengar, membaca maupun menonton isu poligami yang berkaitan dengan artis, pejabat maupun masyarakat umum.

Perbedaan dan beberapa persamaan karakteristik identitas responden dalam klaster atau kelompok yang terbentuk tidak hanya diikuti oleh perbedaan pola konsumsi media tetapi juga diikuti oleh perbedaan tingkat pemahaman dan penyikapan terhadap poligami di masing-masing kelompok. Perbedaan tingkat pemahaman mengenai poligami terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.2.13 Perbedaan Tingkat Pemahaman Responden Mengenai Poligami Berdasarkan Klaster yang Terbentuk

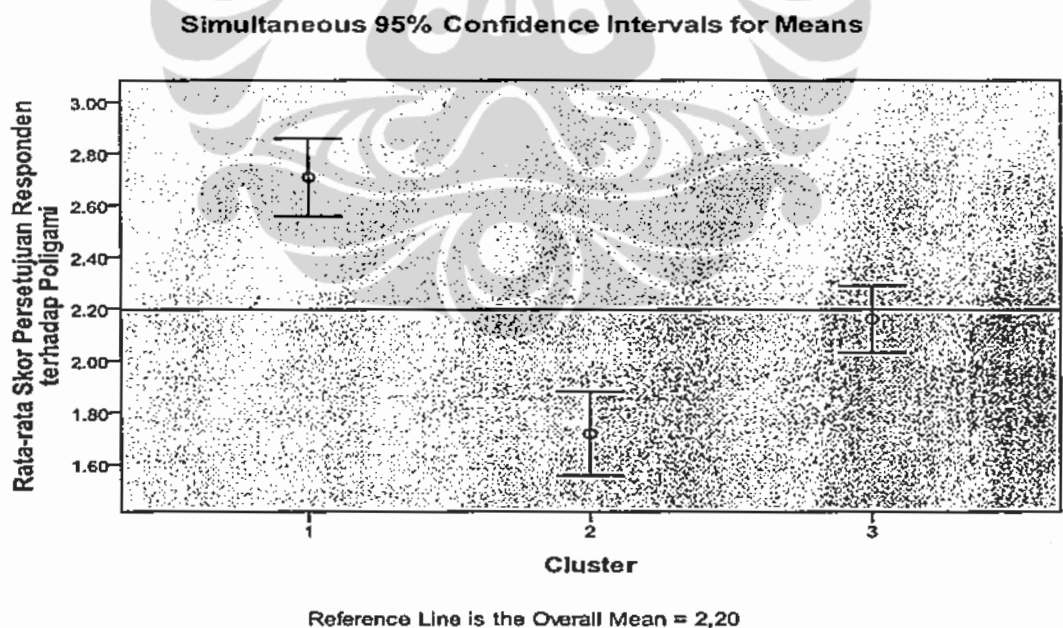


Berdasarkan grafik di atas Klaster I merupakan kelompok dengan tingkat pemahaman paling tinggi sedangkan Klaster III merupakan kelompok dengan pemahaman paling rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya. Untuk Klaster II

pemahaman responden dalam kelompok ini diatas rata-rata tetapi masih di bawah Klaster I. Hal ini menunjukkan semua responden di tiap-tiap klaster sangat memahami permasalahan yang menyangkut poligami mulai dari pengertian, perbedaan poligami dan poliandri, perspektif agama tentang poligami dan aturan-aturan yang ada mengenai poligami di Indonesia.

Perbedaan tingkat pemahaman responden diikuti juga oleh perbedaan dalam persetujuan terhadap poligami. Sikap persetujuan masing-masing kelompok mengenai poligami dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 4.2.14. Perbedaan Sikap Responden Terhadap Poligami Berdasarkan Kelompok yang Terbentuk

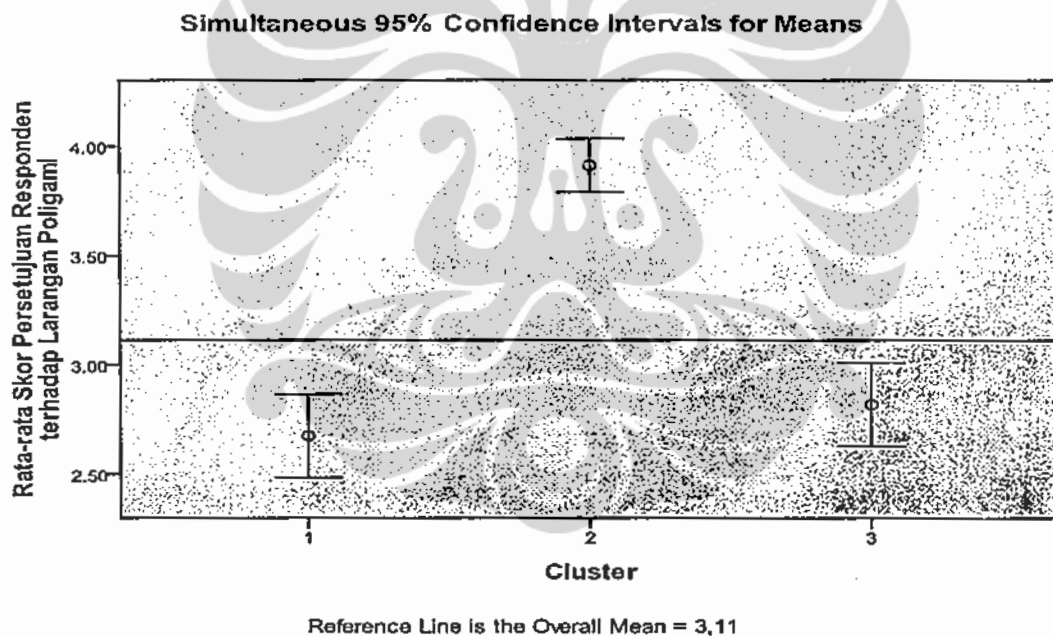


Berdasarkan grafik di atas, Klaster I menunjukkan sikap ketertesujuannya terhadap poligami, hal sebaliknya terjadi pada responden yang berada di Kelompok II, kelompok ini sangat tidak setuju dengan praktek poligami. Sikap abu-abu (menolak atau

mendukung poligami) sepertinya diperlihatkan oleh responden yang berada dalam Kelompok III, rata-rata skor yang berjumlah sama besar dengan nilai tengah sebesar 2,2 menunjukkan bahwa kelompok ini lebih condong ke sikap agak setuju dengan poligami.

Perbedaan tidak hanya terjadi pada perbedaan sikap mengenai poligami, perbedaan juga diikuti oleh perbedaan sikap mengenai ketersetujuan terhadap larangan poligami. Perbedaan sikap ini terlihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 4.2.15. Perbedaan Sikap Responden Terhadap Larangan Poligami Berdasarkan Klaster yang Terbentuk

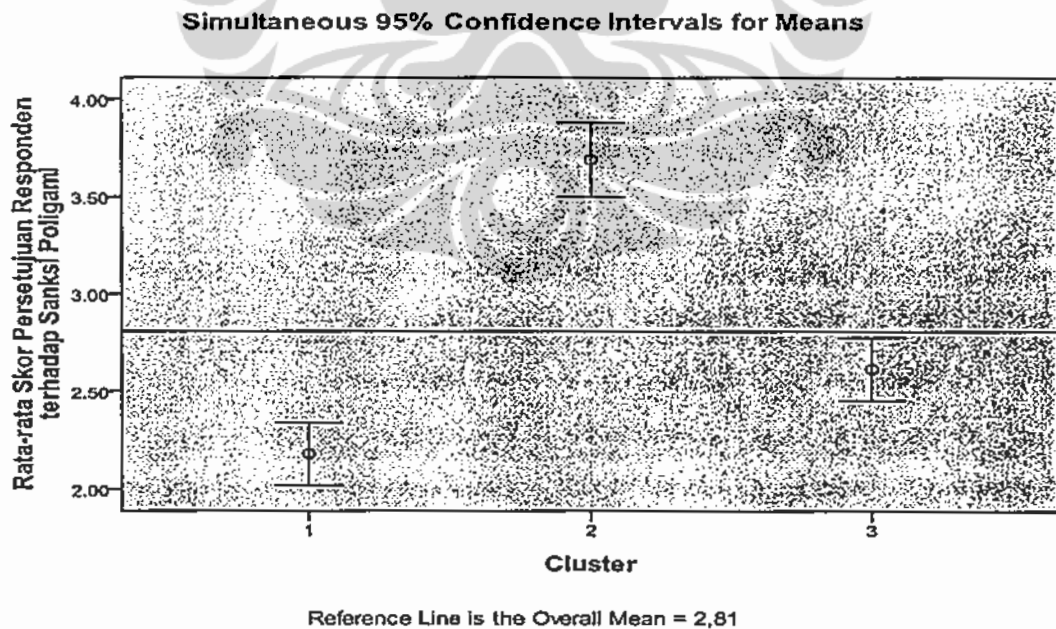


Dilihat pada grafik diatas, Klaster II menunjukkan sikap ketersetuannya terhadap larangan poligami sesuai dengan sikapnya yang menolak poligami. Responden dalam klaster ini setuju bila media massa yang ada tidak perlu memberitakan masalah yang menyangkut poligami, perlunya pemuka agama menghimbau jemaahnya untuk tidak melakukan poligami dan semua responden setuju dengan peraturan mengenai poligami bahkan mendukung rencana revisi peraturan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebaliknya, Klaster I dan III tidak setuju dengan pelarangan poligami yang ada, hal ini sesuai dengan sikap mereka yang cenderung setuju dengan praktek poligami. Kedua klaster ini menolak bentuk-bentuk pelarangan yang sudah ada dan tidak mendukung rencana pemerintah untuk merivisi UU Perkawinan tahun 1974.

Kesesuaian sikap juga terlihat pada ketersetujuan pemberian sanksi bagi pelaku poligami. Sikap-sikap yang terbentuk di setiap kelompok konsisten dengan sikap mereka terhadap pelarangan bagi poligami. Perbedaan sikap dalam hal pemberian sanksi dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 4.2.16. Perbedaan Sikap Responden Terhadap Sanksi bagi Pelaku Poligami Berdasarkan Klaster yang Terbentuk

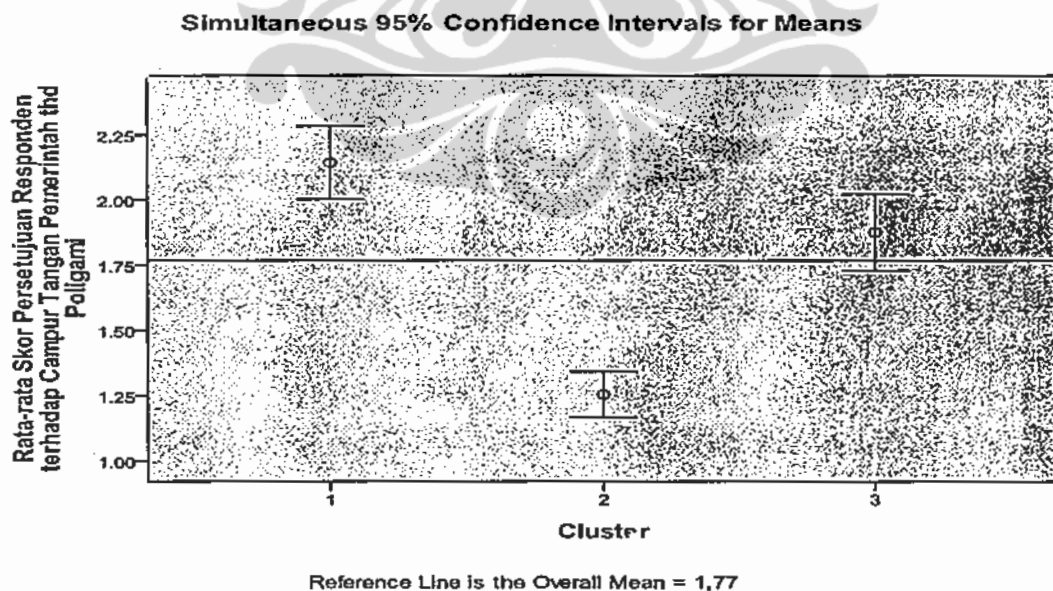


Bila dilihat pada grafik di atas, Klaster I dan III adalah klaster yang tidak setuju diberikannya sanksi bagi pelaku poligami, ketidaksetujuan mereka terhadap

pemberian sanksi sesuai dengan sikap mereka yang setuju poligami dan menolak pelarangan poligami. Responden dalam kedua klaster ini cenderung tidak setuju bila masyarakat memberikan sanksi sosial bagi pelaku poligami atau mereka diberikan sanksi administratif di tempat mereka bekerja apabila mereka berpoligami dan mereka sangat tidak setuju bila karena berpoligami mereka harus di penjara. Sebaliknya Klaster II adalah responden yang sangat setuju dengan adanya sanksi yang jelas bagi pelaku poligami, sikap ini juga konsisten dengan sikap sebelumnya yaitu tidak setuju poligami dan setuju adanya pelarangan bagi praktek poligami.

Perbedaan sikap klaster nampak juga pada perlu atau tidak pemerintah ikut campur dalam masalah poligami. Perbedaan sikap dalam hal perlu atau tidak pemerintah campur tangan dalam masalah poligami terpaparkan pada grafik di bawah ini

Grafik 4.2.17. Perbedaan Sikap Responden mengenai Campur Tangan Pemerintah dalam Poligami Berdasarkan Klaster yang Terbentuk

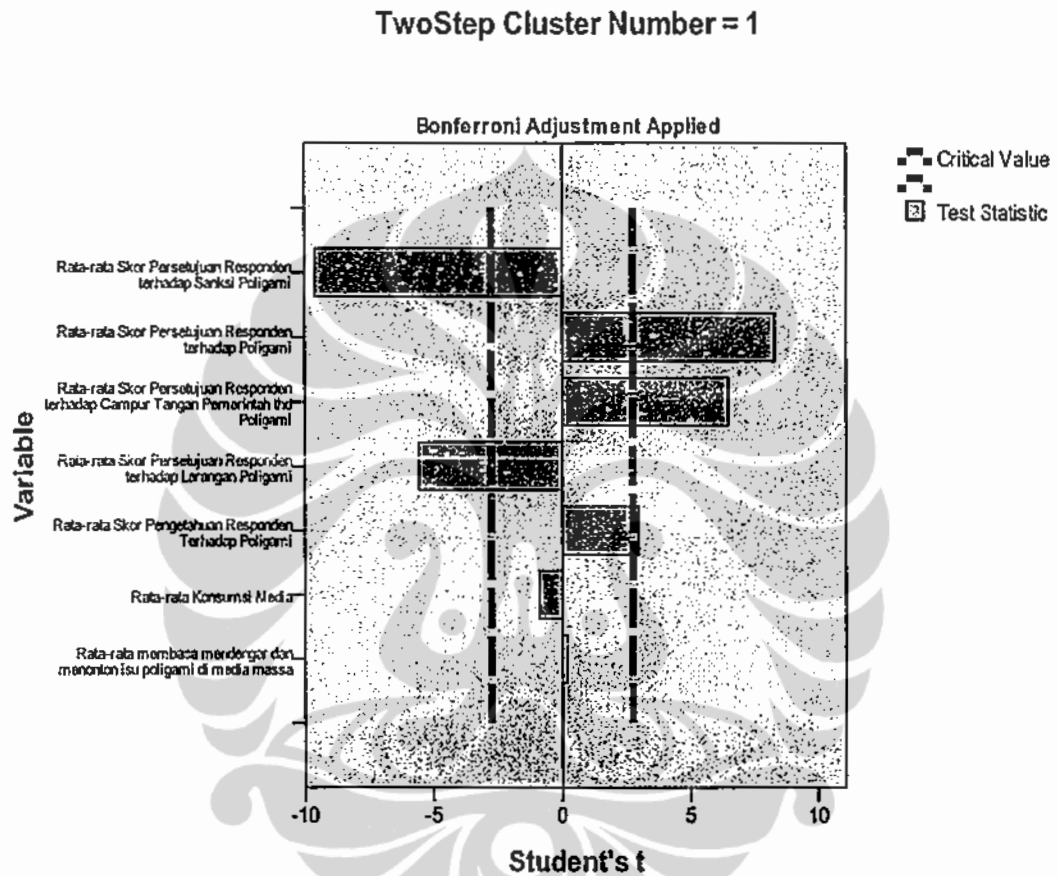


Berdasarkan grafik di atas, Klaster I merupakan kelompok yang menginginkan campur tangan pemerintah dalam bentuk membebaskan praktek poligami di Indonesia sikap ini sesuai dengan sikap ketersetujuan terhadap poligami dan menolak bentuk pelarangan dan pemberian sanksi bagi pelaku poligami.

Klaster II juga menginginkan perlunya campur tangan pemerintah dalam masalah poligami. Berbeda dengan Klaster I yang menginginkan pemerintah membebaskan poligami, responden dalam Klaster II menginginkan sebaliknya yaitu adanya larangan untuk praktek-praktek poligami di Indonesia sikap ini juga sesuai dengan sikap-sikap sebelumnya yang menolak poligami dan setuju bila ada pelarangan dan pemberian sanksi bagi pelaku poligami. Klaster III berbeda dengan dua klaster lainnya yang menginginkan adanya campur tangan, kelompok ini lebih cenderung menginginkan pemerintah tidak ikut campur dalam masalah yang berkaitan dengan poligami.

Hasil uji statistik dengan menggunakan metode t-test significance (uji T) menunjukkan terbentuknya tiga kelompok atau klaster memiliki karakteristik yang membedakan pada tiap-tiap klaster yang terbentuk. Variabel yang diuji seperti konsumsi media, intensitas melihat isu, tingkat pemahaman terhadap poligami dan beberapa penyikapan dalam hal poligami akan menjadi pembeda atau merupakan ciri khas dari masing-masing klaster yang terbentuk. Karakteristik yang menonjol pada setiap klaster dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

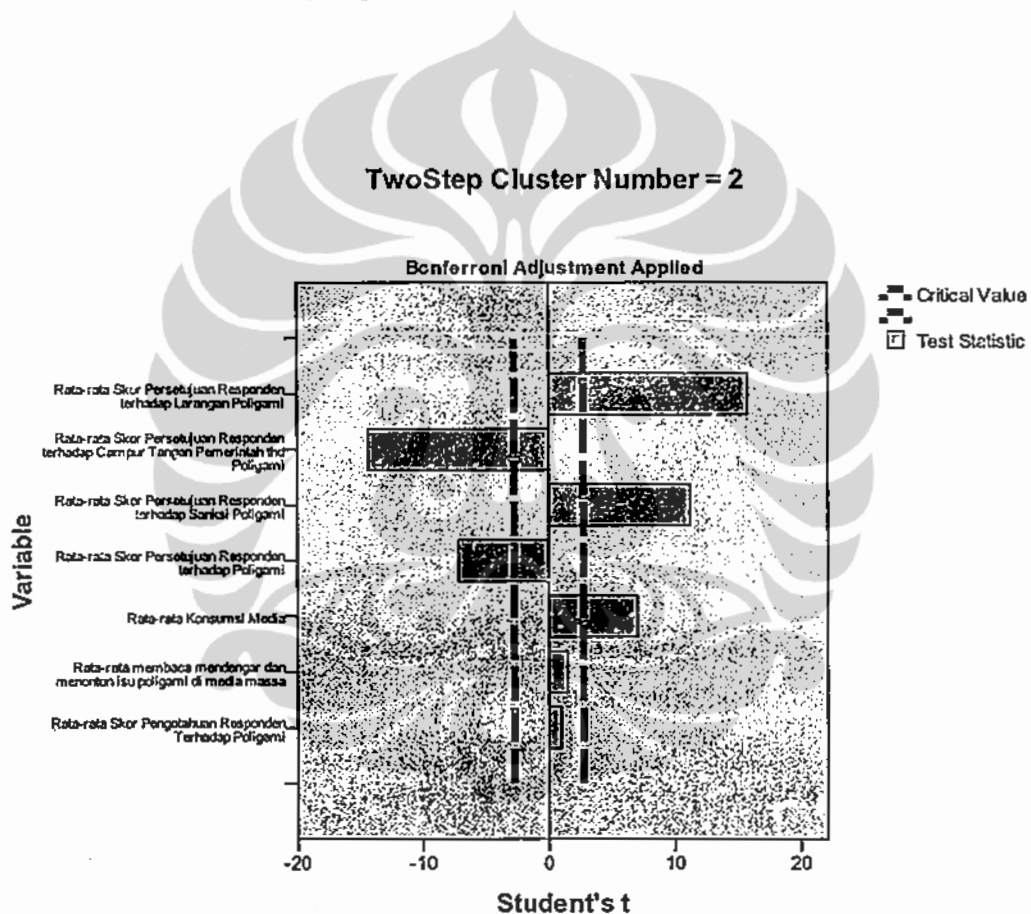
Grafik 4.2.18. Ciri Khas Penyikapan Responden di Klaster I



Berdasarkan pada grafik di atas maka penyikapan responden yang menjadi pembeda atau merupakan ciri khas yang berada di Klaster I yaitu sikap mengenai persetujuan responden terhadap sanksi poligami, sikap persetujuan responden terhadap poligami, sikap atau persetujuan responden terhadap campur tangan pemerintah terhadap poligami, sikap responden terhadap larangan poligami dan tingkat pemahaman responden mengenai poligami. Dua variabel lainnya kebiasaan mengkonsumsi media dan intensitas responden dalam membaca, mendengar ataupun menonton isu poligami di media massa tidak membedakan atau bukan merupakan ciri khas klaster ini.

Hal yang sama juga dapat kita lihat pada Klaster II, di klaster ini kebiasaan mengkonsumsi media dan penyikapan yang menjadi pembeda atau yang merupakan ciri khas berbeda sedikit dengan kateristik yang melekat di Klaster I. Kateristik penyikapan yang menonjol pada Klaster II dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 4.2.19 Ciri Khas Penyikapan Responden di Klaster II



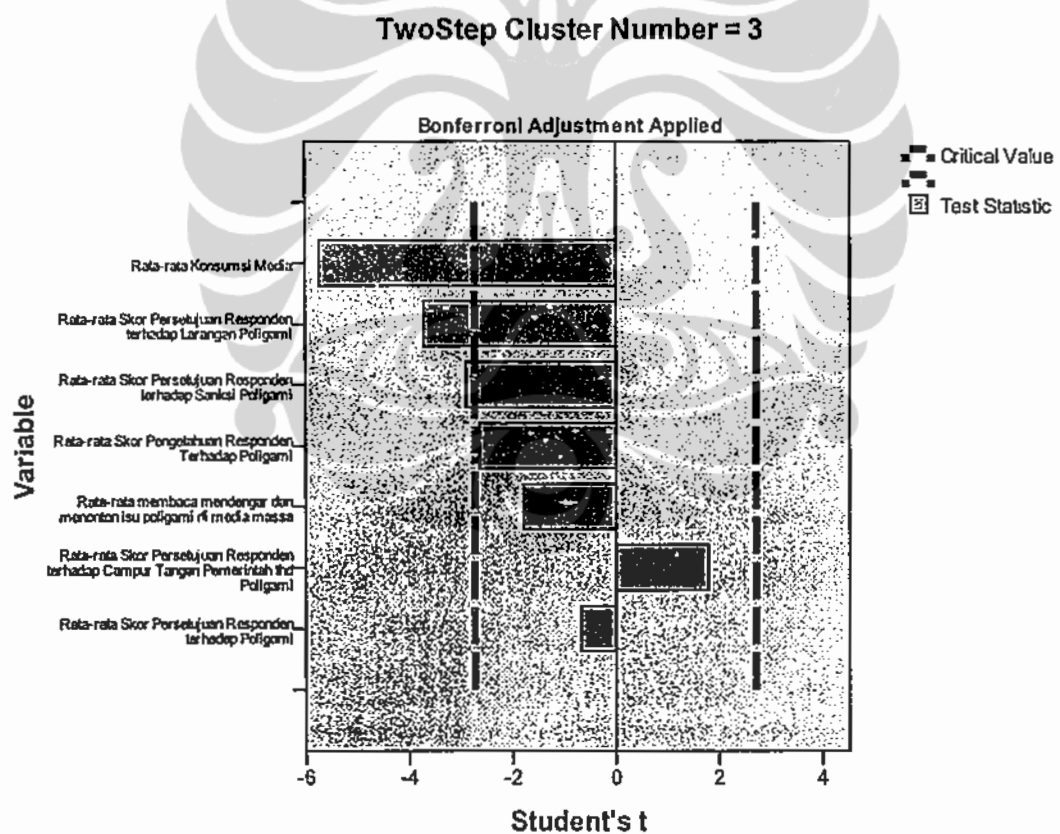
Berdasarkan pada grafik di atas, penyikapan responden yang menjadi pembeda atau yang merupakan ciri khas Klaster II yaitu sikap atau persetujuan responden terhadap larangan poligami, sikap terhadap campur tangan pemerintah dalam hal poligami, persetujuan responden terhadap sanksi poligami, persetujuan responden terhadap poligami dan kebiasaan responden mengkonsumsi media. Sedangkan yang bukan



merupakan ciri khas klaster ini intensitas mereka membaca, mendengar ataupun menonton isu poligami dan tingkat pengetahuan mereka mengenai poligami.

Hal berbeda bila kita lihat pada Klaster III, di klaster ini hanya ada tiga variabel yang merupakan ciri khas klaster ini. Karakteristik penyikapan yang menonjol pada Klaster III dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.2.20. Ciri Khas Penyikapan Responden di Klaster III



Berdasarkan pada grafik di atas, penyikapan responden yang menjadi pembeda atau yang merupakan ciri khas Klaster III yaitu, kebiasaan dalam mengkonsumsi media, sikap terhadap larangan poligami, persetujuan responden mengenai larangan poligami

dan pengetahuan responden mengenai poligami. Sedangkan yang bukan merupakan ciri khas klaster ini pengetahuan responden terhadap poligami, intensitas mereka membaca, mendengar ataupun menonton isu poligami, sikap terhadap campur tangan pemerintah dalam poligami dan persetujuan responden terhadap poligami.



## BAB V INTERPRETASI DATA

Hasil analisis pengelompokan responden dalam kajian ini menunjukkan bahwa karakteristik identitas, kebiasaan bermedia dan penyikapan terhadap poligami yang melekat pada klaster-klaster yang terbentuk cenderung berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan karakteristik identitas, kebiasaan bermedia dan penyikapan pada tiap-tiap klaster seperti dijelaskan di bawah ini

Klaster I merupakan klaster yang lebih banyak dipenuhi oleh responden laki-laki, beragama Islam dengan proporsi berimbang antara responden yang berpendidikan menengah dan tinggi. Dari sisi pekerjaan, anggota kelompok ini bekerja sebagai TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan BUMN, Karyawan Swasta Nasional, karyawan Swasta Asing, Pedagang, Wirausaha atau Karyawan Lepas. Responden dalam klaster ini berstatus menikah atau pernah menikah.

Dari sisi pola konsumsi media, responden dalam klaster ini cukup aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka akan informasi. Mereka juga merupakan kalangan yang cukup sering diterpa oleh media massa mengenai isu-isu poligami yang berkembang di masyarakat.

Tingkat pemahaman responden di klaster ini sangat tinggi, responden dalam klaster ini jauh lebih memahami poligami dibandingkan dengan dua klaster lainnya. Mereka cenderung setuju dengan poligami. Sikap ketersetujuan mereka terhadap poligami diikuti oleh sikap penolakan mereka terhadap pelarangan dan pemberian sanksi bagi pelaku poligami. Kelompok ini cenderung menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk adanya jaminan kebebasan untuk melakukan poligami.

Di sisi lain, kelompok ini menginginkan agar pemerintah tidak melakukan sensor terhadap media, pemuka agama dan tenaga pendidik untuk berbicara mengenai poligami. Mereka juga mengharapkan pemerintah membebaskan siapapun untuk berpoligami karena bagi mereka, berpoligami merupakan hak setiap warga negara. Jaminan kebebasan yang mereka inginkan dalam berpoligami harus tertulis jelas dalam peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Klaster II merupakan kelompok responden yang dipenuhi oleh responden berjenis kelamin perempuan. Proporsi cukup merata terlihat dalam karakteristik agama, yaitu responden dalam klaster ini sebagian beragama Islam dan sebagian lain beragama Non Islam. Hal yang sama dengan usia, sebagian responden berusia antara 17-35 tahun dan sebagian lain berusia antara 36-53 tahun. Begitu juga dengan pendidikan, untuk sebagian responden berpendidikan tinggi dan sebagian lainnya berpendidikan menengah. Status pernikahan dalam kelompok ini sebagian besar menikah dan dari sisi pekerjaan, bagian terbesar sebagai Ibu rumah tangga, Mahasiswa/pelajar, Pedagang, Karyawan swasta Nasional, Karyawan Swasta Asing dan Aktivistis LSM.

Dalam hal kebiasaan mengkonsumsi media, anggota klaster ini cenderung tidak terlalu sering menggunakan media untuk mencari informasi dan mereka pun mengatakan jarang membaca, mendengar ataupun menonton isu-isu poligami yang dilakukan artis, pejabat maupun masyarakat umum.

Khusus mengenai tingkat pemahaman mengenai poligami, pemahaman kelompok ini di atas rata-rata. Dapat dikatakan klaster ini paham mengenai hal-hal yang berkaitan dengan poligami. Pemahaman mereka yang baik mengenai poligami diikuti oleh sikap penolakan terhadap poligami. Klaster ini cenderung tidak setuju dengan praktik poligami, sikap ketidaksetujuan mereka terhadap poligami sesuai dengan sikap ketidaktersetujuan mereka terhadap larangan dan pemberian sanksi bagi pelaku poligami. Mereka yang berada dalam klaster ini sangat mendukung bila pelaku poligami diberikan sanksi sosial dan sanksi hukum.

Anggota klaster ini juga menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam masalah poligami. Berbeda dengan Klaster I yang menginginkan adanya kebebasan untuk melakukan poligami, klaster ini cenderung sebaliknya yaitu menginginkan pemerintah melarang adanya bentuk perkawinan poligami. Mereka setuju bila pemerintah melakukan sensor terhadap media, pemuka agama ataupun tenaga pendidik untuk tidak membicarakan poligami kepada khalayak umum. Mereka juga menginginkan pemerintah melarang warga negaranya melakukan perkawinan poligami. Bagi kelompok ini, larangan terhadap poligami harus tertulis secara jelas dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah atas kesepakatan bersama sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum perempuan.

Pada Klaster III diisi oleh proposi yang cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan, begitupun dengan agama sebagian responden beragama Non Islam dan sebagian lainnya memeluk agama Islam. Responden dalam klaster ini berusia antara 17-35 Tahun, berpendidikan menengah dan bekerja sebagai Mahasiswa/Pelajar, Tenaga Lepas, atau Karyawan Swasta Nasional. Mereka sangat aktif menggunakan media massa untuk mencari informasi dan mereka juga mengatakan sangat sering membaca, mendengar ataupun menonton isu poligami yang ada di masyarakat.

Sekalipun tingkat pemahaman mereka mengenai poligami paling rendah dibandingkan dua klaster lainnya tetapi dapat dikatakan cukup memahami hal-hal yang menyangkut poligami. Responden dalam klaster ini cenderung kurang setuju dengan poligami. Namun, dalam pemberian sanksi terhadap pelaku poligami mereka kurang menyetujuinya. Dalam hal campur tangan pemerintah dalam masalah poligami, klaster ini cenderung menginginkan pemerintah tidak ikut campur dalam masalah kontroversial seperti poligami. Mereka mengharapkan pemerintah tidak ikut campur dengan media massa, pemuka agama ataupun tenaga pendidik yang berhubungan dengan isu-isu poligami, mereka juga berharap pemerintah tidak ikut campur dalam bentuk apapun untuk membebaskan ataupun melarang poligami dan klaster ini juga menginginkan

pemerintah tidak ikut campur tangan dalam menerbitkan peraturan yang memperbolehkan atau melarang poligami di Indonesia.

Terkait dengan kajian utama penelitian ini maka hasil analisis di atas menunjukkan bahwa dalam masalah perlu atau tidaknya campur tangan negara dalam masalah kontroversial seperti poligami sikap masyarakat pada kenyataannya terpecah menjadi tiga kelompok yaitu: Pertama, kelompok yang menginginkan adanya campur tangan negara agar membebaskan praktek poligami. Kedua, kelompok yang menginginkan campur tangan negara agar melarang perkawinan poligami. Ketiga, kelompok yang menginginkan tidak adanya campur tangan negara dalam masalah poligami.

Hasil temuan ini konsisten dengan hipotesis penelitian yang dibangun dari teori Lambe dan Reineke (2002) yang mengatakan dalam masalah-masalah kontroversial adanya campur tangan negara akan membentuk tiga penyikapan berbeda di masyarakat yaitu *Protector* untuk kelompok yang menginginkan kebebasan berpendapat, *Censorship* untuk kelompok yang menginginkan pembatasan dalam pernyataan pendapat dan *Allowers* untuk kelompok yang menginginkan pemerintah tidak ikut campur. Dalam hal ini, sesuai rumusan hipotesis penelitian ini, dalam menyikapi isu kontroversial poligami, akan terpolakan tiga pengelompokan sikap dalam masyarakat yaitu kelompok yang menginginkan pemerintah menjamin kebebasan setiap warganya -dalam berpoligami, kelompok yang menginginkan pemerintah melarang poligami, dan kelompok yang menginginkan pemerintah tidak ikut campur dalam masalah poligami. Apabila dikaitkan dengan teori Lambe dan Reineke, maka Kelompok I masuk dalam kategori *Protector*, Kelompok II adalah *Censorship* dan Kelompok III merupakan *Allowers*.

Kelompok *Protectors* yang dalam penelitian ini sebesar 31% dengan identitas laki-laki, beragama Islam, berusia 36-53 tahun dengan tingkat pendidikan dari menengah hingga tinggi, sudah menikah atau pernah menikah. Bekerja sebagai TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan BUMN, Karyawan Swasta Nasional,

karyawan Swasta Asing, Pedagang, Wirausaha. Aktif dalam mencari informasi di media massa dan cukup sering mendapatkan informasi mengenai poligami dari media massa. Kelompok *Protectors* memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai poligami, mereka setuju dengan praktek perkawinan poligami dan menolak segala bentuk pelarangan poligami dan pemberian sanksi bagi pelaku poligami. *Protectors* menginginkan adanya kebebasan dalam berpoligami di Indonesia.

Bila dilihat kelompok *Protectors* berjenis kelamin laki-laki memiliki usia yang cukup matang yaitu berusia antara 35 tahun hingga 53 tahun. Telah menikah, berpendidikan baik dan memiliki pekerjaan yang sangat baik. Faktor-faktor inilah yang mendorong mereka bersikap cenderung setuju dengan poligami. Dilihat dari faktor usia kelompok ini merupakan kelompok yang bisa dikatakan cukup matang atau dewasa, memiliki pemahaman dan pengalaman untuk melihat berpoligami dari berbagai perspektif. Status mereka yang telah menikah, menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki pengalaman dalam berumah tangga.

Usia yang matang dalam kelompok *Protectors* didukung dengan pekerjaan yang cukup baik. Artinya secara ekonomi mereka memiliki kehidupan yang cukup layak. Keberhasilan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan pilihan berpoligami atau tidak. Alasan selama ini yang digunakan laki-laki ketika memutuskan memiliki isteri dalam waktu yang bersamaan adalah kesiapan mental dan berkecukupan secara ekonomi. Penulis berasumsi empat faktor ini yaitu jenis kelamin laki-laki, menikah, berpendidikan baik dan memiliki kehidupan ekonomi yang bagus membuat kelompok ini cenderung memilih pemerintah berperan memberikan kebebasan berpoligami.

Hal menarik lainnya bila dilihat dari identitas pekerjaan dalam kelompok ini ditemukan responden yang bekerja sebagai TNI/Polri. Instansi yang memiliki peraturan sangat ketat mengenai poligami, dalam penelitian ini mereka menginginkan adanya jaminan kebebasan berpoligami hal yang sangat bertolak belakang dengan peraturan

yang ada di tempat mereka bekerja. Kenyataan ini sama persis dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Purwantiningsih, PSSKM Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, dalam penelitiannya Sri menemukan bahwa PNS, TNI/Polri cenderung melanggar PP No 10/1983 dengan melakukan pernikahan siri. Pada dasarnya bila dilihat dari dua penelitian ini baik PNS maupun TNI/Polri tidak setuju dengan campur tangan negara melalui PP no 10/1983 yang mengatur praktek pernikahan mereka.

Kelompok *Censorship* dalam penelitian ini sebesar 32% dengan identitas Perempuan, tidak hanya beragama Islam tetapi juga Non Islam, berusia 17-53 tahun, berpendidikan dari tingkat menengah hingga tinggi dan sudah menikah atau pernah menikah. Bekerja sebagai Ibu rumah tangga, Mahasiswa/pelajar, Pedagang, Karyawan swasta Nasional, Karyawan Swasta Asing dan Aktivis LSM. Kelompok *Censorship* tidak terlalu aktif menggunakan media massa dalam mencari informasi dan jarang mendapatkan informasi mengenai poligami dari media massa. Kelompok *Censorship* memiliki pemahaman baik mengenai poligami mereka menolak praktek perkawinan poligami dan setuju segala bentuk pelarangan terhadap poligami dan pemberian sanksi bagi pelaku poligami. Kelompok *Censorship* menginginkan adanya pelarangan berpoligami di Indonesia.

Kelompok *Censorship* merupakan kelompok yang bertolak belakang dengan Kelompok *Protector* mengenai peran yang seharusnya pemerintah lakukan berkaitan dengan poligami. Kelompok ini merupakan kelompok kaum perempuan yang telah menikah, berusia muda hingga matang, berpendidikan baik dengan latar belakang pekerjaan ibu rumah tangga. Posisi perempuan dalam kelompok ini dapat dikatakan sangat wajar karena memang poligami merupakan isu perempuan. Sejak kemunculannya ke arena publik, perempuanlah melalui organisasi perempuan yang selalu teriak lantang agar pemerintah melarang praktek poligami di Indonesia.

Sikap beberapa organisasi perempuan agar pemerintah melarang poligami tidak berbeda jauh dengan sikap perempuan dalam masyarakat. Mereka cenderung menolak



kehadiran poligami di Indonesia. Sikap mereka didukung oleh pengalaman mereka yang telah menikah. Pada dasarnya perempuan sangat sulit menerima kenyataan berbagi suami dan kehidupan dengan perempuan lain. Pekerjaan mereka yang rata-rata sebagai ibu rumah tangga memperkuat asumsi ini, bahwa penolakan bukan hanya terbatas berbagi suami tetapi berbagi kehidupan ekonomi dengan perempuan lain. Beragam masalah yang muncul karena memiliki isteri lebih dari satu perempuan juga mendorong kaum perempuan menolak kehadiran perempuan lain dalam rumah tangganya.

Kelompok *Allowers* dalam penelitian ini sebesar 37% dengan identitas tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan, berusia 17-36 tahun, beragam Islam dan Non Islam dengan tingkat pendidikan menengah dan belum menikah. Bekerja sebagai Mahasiswa/pelajar, Tenaga Lepas, atau Karyawan Swasta Nasional. Kelompok *Allowers* sangat aktif menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan mereka juga sangat sering mendapatkan informasi mengenai poligami dari media massa. Tingkat pemahaman kelompok ini mengenai poligami cukup baik dan mereka cenderung kurang setuju dengan poligami. Namun, sikap ketidaksetujuan mereka terhadap poligami diikuti oleh sikap penolakan mereka terhadap bentuk-bentuk pelanggaran dan pemberian sanksi bagi pelaku poligami. Kelompok *Allowers* menginginkan pemerintah tidak ikut campur dalam masalah poligami.

Hal menarik bila melihat Kelompok *Allowers*, Kelompok-*Allowers* tidak hanya dipenuhi oleh laki-laki tetapi juga perempuan memiliki usia yang cukup muda yaitu berusia antara 17 tahun hingga 34 tahun. Belum menikah, berpendidikan cukup baik dan memiliki pekerjaan yang cukup baik. Berusia muda, dan belum menikah. Penulis asumsikan merupakan beberapa faktor utama yang mendorong mereka bersikap cenderung setuju dengan poligami. Dilihat dari faktor usia kelompok ini merupakan kelompok yang bisa dikatakan belum cukup matang, dan cenderung melihat poligami mungkin hanya dari satu perspektif. Status mereka yang belum menikah, memperkuat asumsi bahwa bahwa kelompok ini belum memiliki pengalaman dalam berumah tangga dan belum mengetahui betapa kompleksnya kehidupan dalam pernikahan.

Kelompok *Allowers* dengan pekerjaan yang cukup baik. Artinya secara ekonomi mereka tidak terlalu memiliki kehidupan yang berlebihan secara ekonomi. Hal ini menarik karena biasanya persetujuan terhadap poligami didukung oleh ekonomi yang kuat sehingga mereka yakin ketika berpoligami. Hal menarik juga terlihat ketika kelompok ini diisi tidak hanya oleh laki-laki tetapi juga perempuan, karena pada dasarnya perempuan sangat anti poligami dan menginginkan pemerintah ikut melarang poligami. Kelompok *Allowers* merupakan kelompok yang jauh berbeda dibandingkan dua kelompok sebelumnya. Sikap mereka sangat sesuai dengan teori demokrasi yang selama ini ada yaitu pemisahan antara Negara dan urusan private warga negaranya. Kelompok ini cenderung memilih pemerintah tidak ikut campur dalam poligami

Hasil analisis klaster di atas juga menunjukkan bahwa anggota masyarakat memiliki konsep yang berbeda mengenai peran yang seharusnya pemerintah lakukan dalam masalah poligami. Di satu pihak terdapat kelompok *Allowers* yang cenderung mendukung pandangan libertarian bahwa hal yang terbaik yang dilakukan pemerintah berkenaan dengan masalah-masalah ekspresif seperti poligami adalah tetap berada di luar permasalahan tersebut. *Censorship*, di lain pihak, cenderung mendukung larangan atau pembatasan pemerintah terhadap kebebasan berpoligami. Para anggota dari kelompok ini tampaknya berusaha mendapatkan perhatian pemerintah dan masyarakat bahwa bentuk perkawinan poligami lebih banyak menyengsarakan perempuan dan menimbulkan kekerasan bagi perempuan.

Di sisi lain, terdapat Kelompok *Protectors* yang merupakan kelompok yang mewakili suatu konseptualisasi paling baru di dalam alam kebebasan menyatakan pendapat. Para anggota kelompok ini meminta agar pemerintah campur tangan untuk memastikan kebebasan berekspresi diizinkan dan dilindungi oleh negara.

Apabila dikaji, kelompok *Allowers* dan *Protectors* merupakan dua kelompok yang memiliki kesamaan dalam hal adanya kebebasan dalam menyatakan pendapat dan berekspresi khususnya dalam masalah poligami. Dua kelompok ini bertentangan dengan

kelompok *Censorship* yang cenderung menginginkan pemerintah melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.

Berdasarkan kajian data, penelitian ini pun meneguhkan hipotesis kedua yang dibangun yaitu bahwa pembentukan kelompok-kelompok penyikapan terhadap isu poligami ini terbentuk oleh karena adanya kesamaan-kesamaan karakteristik sosial ekonomi yang melekat di masing-masing individu. Dalam hal ini, lantaran isu poligami merupakan isu yang bersinggungan dengan eksistensi sosial kalangan perempuan ataupun laki-laki, maka karakteristik jenis kelamin individu merupakan faktor yang signifikan berperan dalam pembentukan kelompok ataupun yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Hasil pembentukan klaster dalam penelitian ini konsisten dengan hipotesis yang diajukan dan sesuai pula dengan teori Lambe dan Reineke yang menguatkan adanya perbedaan penyikapan dengan dasar perbedaan jenis kelamin responden. Dalam hal ini, mereka yang berjenis kelamin perempuan cenderung memiliki *willingness to censorship* yang tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Lambe dan Sullivan sebelumnya bahwa perempuan memiliki kecenderungan kuat untuk melakukan sensor. Pembuktian ini dapat dilihat dari karakteristik yang terdapat di Klaster II atau Kelompok *Censorship* yang mayoritas berisikan perempuan. Sebaliknya Lambe dan Reineke juga mengatakan bahwa laki-laki cenderung tidak memiliki keinginan dalam melakukan sensor, asumsi ini juga konsisten dengan hasil dalam Kelompok *Protector* yang secara keseluruhan dipenuhi oleh laki-laki.

Di sisi lain, didapati pula dalam penelitian Lambe dan Reineke variabel usia tidak membedakan secara tegas kelompok *Protector* dan *Censorship*. Dalam penelitian ini variabel usia merupakan salah satu variabel identitas yang membedakan kelompok

*Protectors* dan *Censorship*. Kedua kelompok ini memiliki rentang usia yang cukup berbeda, Kelompok *Protector* lebih banyak diisi oleh anggota yang berusia 17-35 tahun dan sebaliknya kelompok *Censorship* dipenuhi oleh anggota dengan usia lebih matang yaitu 36-53 tahun.

Dalam hal tingkat pengetahuan, Lambe dan Reineke menggunakan variabel pengetahuan politik karena mereka melihat dari perspektif kebebasan berpendapat sedangkan dalam penelitian ini pengetahuan yang digunakan berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai poligami. Lambe dan Reineke mengatakan mereka yang memiliki pengetahuan politik yang sangat baik akan cenderung menolak sensor pemerintah. Hal ini juga konsisten dengan hasil penelitian ini bahwa kelompok *Protector* dengan pemahaman yang sangat baik mengenai poligami cenderung menolak bentuk-bentuk sensor pemerintah.

Melihat hasil temuan di atas yang memperlihatkan terbentuk tiga penyikapan yang berbeda dengan kateorisitas identitas yang berbeda di setiap kelompok dalam masalah poligami, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memperhatikan hal ini apabila ingin membuat keputusan yang menyangkut perkawinan khususnya mengenai praktek poligami. Menghadapi Kelompok *Protectors* dengan proporsi sebesar 31% dengan identitas dan penyikapan di atas pemerintah akan kesulitan bila berencana merevisi UU Perkawinan tahun 1974 yang melarang praktek poligami bagi setiap warga negara tidak terkecuali.

Kelompok *Protectors* dapat dipastikan tidak mendukung rencana pemerintah. Kelompok ini sangat menginginkan adanya kebebasan dalam berpoligami. Dilihat dari tingkat pemahaman yang sangat baik mengenai poligami, berpendidikan dan memiliki ekonomi baik bila dilihat dari pekerjaan, kelompok ini akan memiliki kecenderungan melanggar bila rencana pemerintah benar diwujudkan. Ruang alternatif yang masih dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi kelompok ini tanpa perlu memberikan kebebasan seperti yang mereka inginkan adalah membuat peraturan memperbolehkan

berpoligami dengan syarat tertentu misalnya dengan persetujuan isteri tertua karena perkawinan menyangkut masalah anak dan penghidupan yang layak bagi mereka yang terlibat.

Dalam aturan itu harus dijabarkan secara jelas semua kewajiban yang harus mereka lakukan bila memiliki isteri lebih dari satu perempuan dalam waktu bersamaan dan negara berhak ikut campur bila dalam perjalanannya mereka tidak berhasil bertanggung jawab bagi keduanya. Pemerintah harus menyakinkan kelompok ini bahwa poligami adalah pilihan dan merupakan hak individu, karena walaupun mereka setuju dengan poligami belum tentu mereka ingin mempraktekan poligami.

Pada sisi lain, rencana revisi UU Perkawinan tahun 1974 akan didukung penuh oleh *Censorship* karena mereka sangat anti poligami. Pelarangan poligami bagi siapa pun pasti akan mereka dukung. Hal ini akan terus menjadi polemik karena *Protectors* dan *Allowers* akan menolak rencana ini, kendati dengan alasan yang berbeda-beda. Menghadapi masalah ini pemerintah harus mampu menguntungkan semua pihak khususnya kelompok perempuan yang diasumsikan paling merasakan dampak negatif dari perkawinan poligami. Menghadapi *Censorship* pemerintah harus mampu menyakinkan kelompok ini bahwa peraturan yang akan dikeluarkan berfungsi untuk melindungi kaum perempuan walaupun peraturan yang akan dikeluarkan pemerintah tidak melarang poligami secara tegas.

Peraturan pemerintah itu harus memuaskan kelompok perempuan akan jaminan perlindungan hak mereka sebagai perempuan. Bentuk peraturan itu harus mengikat artinya diperlakukan secara umum dan tidak terlalu memudahkan laki-laki untuk berpoligami. Persyaratan jelas dan tanggung jawab yang harus laki-laki emban bila memiliki isteri lebih dari satu harus tertera dalam peraturan itu. Syarat dan tanggung jawab itu harus tertulis dan disetujui semua pihak yang terlibat termasuk keluarga isteri tertua sebelum dilakukan pernikahan lagi. Pelarangan berpoligami oleh pemerintah seperti yang diharapkan *Censorship* akan cenderung terus dilanggar dengan berbagai alasan dan

kebutuhan. Terlebih, larangan berpoligami akan menimbulkan komplikasi lain, syariat agama misalnya, yang cenderung memperbolehkannya.

*Allowers* merupakan kelompok paling liberal dalam hal ini. Kelompok ini berpikir pemerintah tidak perlu ikut campur dalam masalah semacam ini. Menghadapi kelompok ini pemerintah akan mempunyai kendala bila berencana mengeluarkan revisi UU Perkawinan Tahun 1974. Kelompok ini akan cenderung tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan pemerintah, karena mereka tidak setuju bila pemerintah campur tangan dalam masalah ini.

Hal yang harus dilakukan pemerintah dengan kelompok ini karena mereka berusia muda, belum menikah dengan tingkat pendidikan menengah, harus dijelaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan bagi setiap warga negara bukan bentuk intervensi yang bersifat merugikan warga negaranya. Diperlukan aturan yang jelas untuk memenuhi kepentingan setiap orang berkaitan dengan masalah poligami walaupun banyak yang menuntut haknya bahwa mereka memiliki kebebasan untuk berpoligami tetapi mereka perlu diingatkan tanggung jawabnya karena berpoligami

## BAB VI KESIMPULAN

Penelitian yang telah penulis lakukan mengenai sikap masyarakat terhadap campur tangan negara dalam masalah poligami menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam masalah kontroversial seperti poligami, masyarakat di Indonesia memiliki konsep yang berbeda mengenai peran yang seharusnya pemerintah lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Isu poligami memang telah menjadi polemik selama 80 tahun terakhir tepatnya ketika organisasi perempuan mulai mengangkat isu ini ke permukaan. Sejak saat itu peran negara agar terlibat dalam penyelesaian masalah poligami tidak pernah disepakati, baik dari tubuh pemerintah sendiri maupun di kalangan masyarakat. Hal inilah yang seakan membuat langkah pemerintah ambigu untuk menyelesaikan masalah ini.

Polemik ini memang timbul-tenggelam, setiap kali terjadi peristiwa yang berkaitan dengan poligami, pada saat itulah polemik setuju-tidak setuju dengan poligami muncul. Pernikahan Presiden Soekarno dengan Hartini pada tahun 1954 merupakan contoh besar polemik poligami timbul ke permukaan saat itu. Hal yang sama terjadi 52 tahun kemudian ketika pemuka agama yang begitu melekat di hati jemaahnya, memutuskan untuk memiliki isteri lebih dari satu perempuan. Polemik poligami kembali muncul, pemberitaan di media massa secara terus-menerus, aksi demonstrasi menolak sang ustadz, siaran pers, debat terbuka, intruksi presiden dan wacana revisi UUP tahun 1974 menandai polemik poligami di masyarakat tahun 2006 lalu.

Polemik ini diikuti dengan sikap pro dan kontra terhadap negara yang berencana mengatur poligami di Indonesia. Sikap masyarakat terbelah menghadapi hal ini, ada

sebagian kalangan yang setuju dengan pemerintah, disisi lain terdapat juga kalangan yang cenderung menolak campur tangan negara dalam masalah poligami. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat dalam menanggapi perlu atau tidaknya campur tangan dalam masalah poligami tidak hanya terpecah menjadi dua kelompok yang berseberangan, yaitu kelompok yang mendukung langkah pemerintah dan kelompok yang menolak langkah pemerintah selain itu terdapat juga kelompok yang menginginkan pemerintah menjamin kebebasan bagi setiap warga negaranya berpoligami. Hal ini menunjukkan apa yang terjadi di Indonesia tidak berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika ketika Lambe dan Reineke mengadakan penelitian terkait kecendrungan sikap masyarakat mengenai isu yang sifatnya kontroversial.

Dalam teorinya Lambe dan Jennifer mengatakan dalam masalah kontroversial sikap masyarakat akan cenderung terpecah menjadi tiga kelompok. Hal ini dibuktikan dalam penelitian ini, bahwa dalam isu kontroversial seperti poligami kecendrungan masyarakat di Indonesia terpecah menjadi tiga kelompok. Meminjam istilah Lambe dan Reineke, ketiga kelompok tersebut yaitu, *Protector*, kelompok yang menginginkan pemerintah menjamin kebebasan dalam berpoligami. *Censorship*, kelompok yang menginginkan pemerintah melarang poligami dan *Allowers*, kelompok yang menginginkan pemerintah tidak ikut campur.

Kedua, Lambe dan Reineke mengatakan dalam teori individu yang terdapat dalam kelompok penyikapan terbentuk memiliki kemiripan dalam karakteristik sosial ekonomi tertentu. Penelitian ini juga mendapati kesimpulan yang sama dengan teori Lambe dan Reineke. Ketiga kelompok penyikapan terbentuk karena memiliki kemiripan karakteristik sosial ekonomi yang melekat pada setiap individu. Kemiripan karakteristik sosial ekonomi pada individu dalam satu kelompok, sedikit berbeda dengan karakteristik sosial ekonomi yang melekat pada kelompok lainnya. Pada kelompok protectors faktor jenis kelamin, usia, status perkawinan, agama dan pekerjaan menjadi karakteristik pembentuk kelompok Protectors. Kelompok ini menginginkan adanya jaminan pemerintah dalam kebebasan berpoligami. Di sisi lain, kelompok Censorship terbentuk berdasarkan



kemiripan karakteristik menurut jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan dan pekerjaan. Kelompok Censorship menginginkan pemerintah ikut campur dalam masalah ini dengan melarang praktek poligami di Indonesia. Untuk kelompok Allowers, kelompok ini terbentuk karena kemiripan karakteristik berdasarkan status perkawinan, usia, pekerjaan dan pendidikan. Kelompok ini menginginkan pemerintah tidak ikut campur dalam masalah poligami

Ketiga, Isu poligami tidak pernah lepas dari kaum perempuan, mencuatnya isu ini ke arena sosial juga merupakan peran kaum perempuan yang tergabung dalam beberapa organisasi perempuan tahun 1920an. Di tahun itu, banyak kaum perempuan yang merasakan praktek perkawinan poligami merupakan bentuk kekerasan yang paling nyata terhadap perempuan. Desakan agar pemerintah campur tangan pun tidak dapat dihindarkan, kaum perempuan merasakan perlunya peran negara untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini tentu saja tidak mudah, benturan pandangan dalam tubuh organisasi perempuan mengenai poligami menjadi salah satu kendala besar, peran yang seharusnya negara lakukan tidak pernah terwujud hingga 50 tahun kemudian.

Selain perbedaan pandangan didalam tubuh organisasi perempuan sendiri, budaya patriaki yang ada di Indonesia juga merupakan faktor kendala, bagi kalangan laki-laki memiliki isteri banyak bukan merupakan sesuatu yang salah terlebih agama Islam tidak melarang. Intrepetasi terhadap budaya dan agama inilah yang membuat poligami marak di masyarakat. Banyak kaum laki-laki mengintrepetasikan poligami merupakan anjuran agama dan sebagai penganut yang taat, maka mereka mempraktekan perkawinan poligami. Hal ini tentu saja ditentang oleh kaum perempuan yang merasakan tidak ada keadilan dalam intrepetasi tersebut, belum lagi masalah kekerasan yang timbul karena adanya praktek poligami.

Perbedaan pandangan dan sikap antara laki-laki dan perempuan dalam masalah poligami tergambar jelas dalam penelitian ini. Jenis kelamin laki-laki cenderung menginginkan kebebasan dalam berpoligami dan sebaliknya perempuan menginginkan

adanya larangan berpoligami. Dapat ditarik kesimpulan dalam masalah kontroversial seperti poligami jenis kelamin merupakan faktor signifikan yang membedakan sikap yang berseberangan. Hasil penelitian ini juga menggambarkan dua kelompok yang berseberangan sikap dalam masalah poligami yaitu Kelompok Censorship, kelompok yang memiliki *willingness to censor* yang tinggi dipenuhi oleh perempuan. Kelompok ini tidak setuju dengan poligami, setuju dengan pelarangan dan pemberian sanksi bagi pelaku poligami dan menginginkan pemerintah berperan agar melarang praktek poligami di Indonesia. Sebaliknya, Kelompok Protector dipenuhi oleh laki-laki, kelompok ini setuju dengan poligami, tidak setuju dengan pelarangan poligami dan menolak diberikannya sanksi bagi pelaku poligami, kelompok ini menginginkan pemerintah memberikan jaminan kebebasan berpoligami.

### Rekomendasi

Kajian ini memperkenalkan adanya tiga pengelompokan sikap dalam masyarakat dengan konsep yang berbeda tentang apa yang seharusnya negara lakukan dalam situasi yang melibatkan kebebasan menyatakan pendapat seperti masalah poligami. Apa yang dilakukan negara dalam masalah ini akan mempengaruhi opini publik tentang isu poligami di masyarakat. Kajian ini bermanfaat untuk melihat dan meningkatkan pemahaman kita akan bentuk-bentuk penyensoran yang dilakukan pemerintah dalam kebebasan menyatakan pendapat khususnya dalam masalah poligami.

Masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, penelitian selanjutnya diharapkan memasukan aktifitas politik khususnya keterlibatan di partai politik. Aktifitas politik akan menjadi salah satu indikator penting dalam masalah ini, apalagi di Indonesia terdapat partai Islam yang beberapa anggotanya secara terbuka mengakui bahwa mereka melakukan praktek poligami seperti. Sudah diketahui secara umum bahwa PKS merupakan partai politik dimana hampir seluruh anggotanya memutuskan berpoligami atau dipoligami, hal ini seperti tertulis dalam buku Bahagiakan diri dengan satu isteri yang ditulis oleh salah satu anggota Majelis Syura PKS, Cahyadi Takariawan.

Keterlibatan individu dalam partai ini memiliki konsep-konsep khusus mengenai peran yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam masalah poligami. Selain itu pada penelitian selanjutnya juga diharapkan diteliti latar belakang individu mengenai poligami dan mencari tahu alasan individu bersikap menolak atau mendukung campur tangan negara dalam masalah. Tidak terbatas hanya melihat karakteristik sosial-ekonomi yang melekat pada individu.

Jelaslah, dalam penelitian mendatang mengenai pengelompokan sikap masyarakat mengenai campur tangan negara dalam isu kontroversial poligami harus mengkaji bentuk-bentuk penyensoran apa saja yang harus pemerintah lakukan bila menginginkan adanya sensor dalam masalah poligami dan bentuk-bentuk kebebasan seperti apa yang masyarakat inginkan bila mengharapkan kebebasan dalam berpoligami.

## Buku

- Arbaningsih, Dri. Kartini dari sisi lain. Kompas Gramedia, 2005
- Blackburn, Susan. Kongres Perempuan Pertama. Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Burhan, Bungin. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kencana Predana Media Group, 2005
- Istibsyaroh. Poligami dalam Cita dan Fakta. Blantika: Mizan, 2004
- Flick, Uwe. *The Psychology Of The Social*. Cambridge University Press, 1998
- Kanuk, Leslie Lazar & Schiffman, Leon g. *Consumer Behavior*. Pearson Education International, 2007
- Kaid, Lynda Lee. Handbook of Political Communication Research. Lawrence Erlbaum Associates, 2004
- Locke, John. *Second Treatises of Civil Government*. London Printed, 1962
- Mulia, Siti Musdah. Islam Mengungkat Poligami. Gramedia, 2005
- Mill, John Stuart. On Liberty. In Revitch, Diane & Thernstrom Abigail (Ed). *Demokrasi Klasik dan Modern* (pp. 125-131). Grafika Mardi Yuana
- Priyatno, Dwi. Belajar Olah Data dengan SPSS 17. ANDI Yogyakarta, 2009
- Purwantiningsih, Sri. Gaya PNS Berpoligami. PSKK UGM, 2005
- Rakhmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya, 2000
- Riant, Nugroho. Analisis Kebijakan. PT Elex Media Komputindo, 2007
- Riant, Nugroho. Public Policy. PT Elex Media Komputindo, 2009

Rosenberg, M.J. and G.I.Hovland. 1960. *Cognitive, Affective, and Behavioral Components of Attitudes*. In *M.J. Rosenberg. Attitude Organization and Change*. New Haven, Conn. Yale University Press. London.

Santoso, Sinngih. *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. PT Gramedia, 2010

Sarwono, Sarlito W. & Meinarno, Eko A. *Psikologi Sosial*. Salemba Humanika, 2009

Suryochondro, Sukanti. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Rajawali, 1984

Theodoulou, Stella,Z & Cahn, Matthew A. *Public Policy*. Prentice Hall, 2005

Wieringa, Saskia Eleonora. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Arba Budaya, 1999

#### Artikel Jurnal

Hayes, Andrew F., & Reineke, Jason, B ( 2007) *The Effect of Government Censorship of War-Related News Coverage on Interest in the Censored Coverage: A test Competing Theories*. *Journal of Mass Communication and Society*

Lambe, Jennifer, L. & Reineke, Jason, B (2009). *Government Involvement in expressive Controversies*. *Journal of Communication*, 59, 225-242

Thompson, Margareth, E. Chaffee, Steven, H. & Oshagan, Hay, G. ( 1990) *Regulating Pornographi: A public Dilemma*. *Journal Of Comminucation*, 40, 73-83

#### Artikel Majalah

Tim Rahima (2007, April) *Menelaah Poligami dalam Teks dan Konteks*. *Suara Rahima*, 6-12









No.Responden	
--------------	--

(hanya diisi oleh Editor)

## Kuesioner Campur Tangan Negara dalam Poligami

Selamat Pagi/Siang/Sore/ Malam Bapak/Ibu/Sdr/Sdri, Kami dari PascaSarjana Fisip UI sedang mengadakan penelitian tentang campur tangan Negara dalam poligami. Rumah ini merupakan salah satu dari 400 rumah di wilayah kecamatan Kebayoran Lama yang dipilih secara acak. Mengingat pentingnya penelitian ini, Kami mengharapkan partisipasi Anda dalam menjawab pertanyaan berikut ini.

**Petunjuk Penetapan Responden:** Urutkan mulai dari yang tertua hingga yang termuda semua penghuni rumah yang berusia minimal 17 tahun atau sudah/pemah menikah, *tetapi* bukan TNI/Polisi aktif, bukan tamu, bukan pembantu rumah. Tarik garis mendatar di bawah nama orang terakhir, kemudian tarik garis ke bawah dari nomor yang dilingkari. Pertemuan antara kedua garis tersebut menunjukkan responden yang terpilih.

NAMA	USIA	NO.	RUMAH TANGGA										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	
		3	3	3	2	2	1	3	1	3	1	2	
		4	4	1	3	4	3	1	2	2	1	2	
		5	1	1	5	3	2	2	4	5	4	3	
		6	6	4	1	5	4	1	2	6	3	5	
		7	5	2	3	1	7	7	3	2	6	4	
		8	2	5	4	1	6	3	5	4	8	7	
		9	3	4	6	7	5	8	2	9	2	6	
		10	7	8	3	2	4	10	6	1	5	9	

Nama Responden	:	
Alamat	:	
		RT: Kelurahan/Desa:
		Kota/Kabupaten:
No.Telpon	:	Rumah:
		Handphone:
Nama & Alamat Kantor	:	Telp:

Pewawancara	:	
Tgl. Wawancara	:	
Waktu Wawancara	:	Pk. .... s/d .....

Editor	:	
Entri	:	

## I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Status anda dalam keluarga:
1. Orang Tua Laki-Laki      2. Orang Tua Perempuan  
3. Anak Laki-Laki      4. Anak Perempuan
2. Jenis Kelamin Anda:
1. Laki-Laki      2. Perempuan
3. Usia:
- Tahun
4. Pendidikan Formal Terakhir ditamatkan
1. Tidak Sekolah      6. Tamat Madrasah Tsanawiyah  
2. Tidak Tamat SD      7. Tamat SLTA  
3. Tamat SD      8. Tamat Madrasah aliyah  
4. Tamat Madrasah Ibtidaiyah      9. Tamat Perguruan Tinggi  
5. Tamat SLTP      10. Tamat Pasca sarjana
5. Anda termasuk dalam kelompok suku bangsa apa?
1. Jawa      6. Minang/Padang      11. Lainnya  
2. Betawi      7. Bugis/ Makasr  
3. Sunda      8. Melayu  
4. Cina/Tionghoa      9. Ambon  
5. Batak/Tapanuli      10. Campuran
6. Apa Agama Anda?
1. Islam      6. Konghucu  
2. Kristen Protestan      7. Kepercayaan  
3. Kristen Katholik      8. Lainnya,  
4. Hindu  
5. Budha
7. Seberapa sering Anda melakukan ibadah seperti sholat, puasa atau pergi ke tempat ibadah seperti Gereja, Wihara
1. Tidak Pernah      4. Rutin  
2. Sesekali      5. Tidak Pernah Tidak
8. Apakah Anda mengikuti aktivitas keagamaan seperti pengajian, perkumpulan doa
1. Tidak Pernah      3. Rutin  
2. Sesekali      4. Tidak Pernah Tidak
9. Bagaimana status pernikahan Anda?
1. Belum Menikah      4. Janda/duda Cerai  
2. Tidak menikah      5. Janda/duda kematian  
3. Menikah
10. Usia Pernikahan
- Tahun

11. Jumlah Anak Orang
12. Jumlah Tanggungan: Orang
13. Jumlah Pekerja rumah Anda (Misalnya supir, pembantu) Orang
14. Apa status rumah yang anda tempati saat ini?  
 1. Milik sendiri                      4. Menumpang rumah ortu/saudara/teman  
 2. Sewa/Kontrak                      5. Lainnya,  
 3. Rumah dinas
15. Apa pekerjaan utama anda?  
 1. TNI/POLRI, berpangkat perwira ke atas( ditambahkan perwira tinggi, menengah)  
 2. TNI/POLRI berpangkat prajurit atau dibawah perwira  
 3. PNS, golongan dibawah IIIA (IA hingga IID)  
 4. PNS, golongan III ke atas  
 5. Karyawan BUMN  
 6. Karyawan Swasta Nasional  
 7. Karyawan Swasta Asing  
 8. Staf/Pegawai/Aktivis Lembaga Sosial Non Pemerintah (LSM, Yayasan, dsb)  
 9. Pedagang  
 10. Pengusaha/Wirausaha  
 11. Karyawan lepas/free lancer/honoror  
 12. Pelajar/ Mahasiswa  
 13. Ibu rumah tangga  
 14. Tidak bekerja
16. Jika Anda pegawai swasta, BUMN, Pedagang, pengusaha ataupun wirausaha, apa jabatan anda?  
 1. Tenaga Lepas/honoror                      7. Direktur  
 2. Karyawan Biasa                              8. Presiden Direktur (CEO)  
 3. Kepala Bagian/supervisor                9. Komisaris  
 4. Asisten Manajer                              10. Presiden Komisaris  
 5. Manajer                                         11. Pemilik Usaha  
 6. General Manajer                              12. Profesional

## II. KONSUMSI MEDIA

	Dalam sebulan terakhir, apakah Anda biasa mencari informasi dari Media cetak dengan	<p>Frekuensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap hari</li> <li>2. Beberapa hari dalam seminggu</li> <li>3. 1x seminggu</li> <li>4. &lt; 4 kali sebulan</li> <li>5. Tidak Pernah</li> </ol>	<p>Jika Anda membaca seberapa sering Anda membaca tentang isu-isu poligami Artis, Pejabat Pemerintah ataupun masyarakat umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat Sering</li> <li>2. Sering</li> <li>3. Jarang</li> <li>4. Tidak Pernah</li> </ol>
17	Koran		
18	Tabloid		
19	Majalah		
20	Internet		

	Dalam sebulan terakhir apakah Anda biasa mencari informasi dari media elektronik ini dengan	<p>Frekuensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap hari</li> <li>2. Beberapa hari dalam seminggu</li> <li>3. 1x seminggu</li> <li>4. &lt; 4 kali sebulan</li> <li>5. Tidak pernah</li> </ol>	<p>Jenis program/acara yang paling sering Anda ikuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita/Informasi</li> <li>2. Hiburan</li> <li>3. Berita dan Hiburan</li> <li>4. Tidak mengikuti</li> </ol>	<p>Jika Anda Mendengar/ Menonton seberapa sering Anda mendengar/ menonton masalah poligami Artis, Pejabat Pemerintah ataupun masyarakat umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat Sering</li> <li>2. Sering</li> <li>3. Jarang</li> <li>4. Tidak Pernah</li> </ol>
21	Radio			
22	Televisi/Televisi Berbayar			

### III. TINGKAT PEMAHAMAN RESPONDEN TENTANG POLIGAMI

Sejauh mana Anda Tahu atau Tidak Tahu dengan pernyataan berikut?

Untuk setiap pernyataan berikut, apakah Anda akan menyatakan:

1. Sangat Tidak Tahu
2. Tidak Tahu
3. Agak Tahu
4. Tahu
5. Sangat Tahu

1. Sangat Tidak Tahu ..... 5. Sangat Tahu

23	Poligami sering diartikan bila laki-laki yang telah menikah memutuskan untuk menikah lagi. Seberapa tahukah Anda tentang pengertian poligami ini	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
24	Laki-Laki dikatakan melakukan poligami apabila memiliki isteri sah lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan. Tahu atau tidak tahukah Anda tentang pengertian poligami ini	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
25	Poliandri adalah sebutan untuk perempuan yang menikani laki-laki lebih dari satu, seberapa tahukah Anda tentang pengertian ini	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
26	Poliandri dan Poligami merupakan sebutan untuk orang-orang yang melakukan pernikahan lebih dari satu kali dalam waktu bersamaan, poligami sebutan untuk suami yang memiliki isteri banyak sedangkan poliandri sebutan untuk isteri yang memiliki suami lebih dari satu, seberapa tahukah Anda dengan istilah ini	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
27	Di Indonesia, bila laki-laki berkeinginan untuk memiliki isteri lebih dari satu perempuan harus mendapatkan persetujuan dari isteri pertamanya, tahukah Anda tentang ketentuan ini	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
28	Di Negara ini, poligami diperbolehkan apabila isteri tertua tidak melarang suaminya menikah lagi, tahu atau tidak tahukah Anda tentang hal ini	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
29	Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pemerintah di Indonesia yang ingin melakukan pernikahan lebih dari satu kali harus memiliki izin dari atasannya, seberapa tahukah Anda akan hal ini	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
30	Tahu atau tidak tahukah Anda tentang ketentuan di negara kita, apabila Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Pemerintah yang ingin memiliki isteri lebih dari satu perempuan harus sepengetahuan isteri tertua dan mendapatkan izin dari atasannya	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
31	Seberapa tahukah Anda bahwa dalam Islam poligami tidak dilarang	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
32	Dalam Islam setiap laki-laki diperbolehkan memiliki isteri lebih dari satu perempuan, tahukah Anda akan hal ini	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>

33	Berbeda dengan Islam, Agama Kristen, Hindu dan Budha melarang umat Laki-lakinya melakukan poligami seberapa tahukah Anda tentang ketentuan ini	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
34	Tahu atau tidak tahukah Anda tentang ketentuan Agama di luar Islam tidak memperbolehkan poligami	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
35	Seberapa tahukah Anda bahwa poligami akan mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
36	Keadaan ekonomi keluarga akan berubah dengan berpoligami, Tahukah Anda akan hal ini?	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
37	Tahu atau tidak tahukah Anda bahwa poligami akan mempengaruhi keutuhan keluarga	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
38	Seberapa Tahukah Anda bahwa Poligami akan mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
39	Tahu atau tidak tahukah Anda bahwa orang-orang yang melakukan poligami cenderung sulit diterima masyarakat banyak	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
40	Seberapa tahukah Anda bahwa orang-orang yang memiliki isteri lebih dari satu sulit diterima oleh masyarakat	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
41	Tahu atau tidak tahukah Anda bahwa di negara demokrasi negara (pemerintah) tidak ikut campur dalam urusan pribadi (perkawinan)	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
42	Tahu atau tidak tahukah Anda di negara yang di melakukan pemilihan Presiden secara langsung, pemerintahnya tidak mengurus urusan perkawinan	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
43	Seberapa tahukah Anda dalam negeri demokrasi pemerintah tidak mengurus permasalahan yang berkaitan dengan agama	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
44	di negara yang di melakukan pemilihan Presiden secara langsung, pemerintahnya tidak mengurus urusan keagamaan tahukah Anda akan hal ini	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
45	Tahu atau tidak tahukah Anda mengenai UU Perkawinan di Indonesia khususnya tentang poligami	1	2	3	4	5	<input type="text"/>
46	Seberapa tahukah Anda tentang aturan-aturan poligami yang ada di Indonesia	1	2	3	4	5	<input type="text"/>

IV.PERSETUJUAN RESPONDEN DENGAN POLIGAMI

Sejauh mana Anda Setuju atau Tidak setuju dengan pernyataan berikut?

Untuk setiap pernyataan berikut, apakah Anda akan menyatakan:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Agak Setuju
4. Setuju
5. Sangat Setuju

1. Sangat Tidak Setuju ..... 5. Sangat Setuju

47	Setuju atau tidak setujukah bila Anda sendiri melakukan poligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
48	Menurut Anda, apakah Anda setuju untuk memiliki isteri lebih dari 1 perempuan	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
49	Setuju atau tidak setujukah Anda, apabila Anda berpoligami kemudian menyarankan orang untuk berpoligami juga	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
50	Bila Anda memiliki isteri lebih dari satu, setujukah Anda menyarankan orang lain agar mengikuti apa yang Anda lakukan	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
51	Setuju atau tidak setujukah Anda apabila salah satu keluarga (Kakek, Ayah, Suami, Kakak Laki-laki, Adik Laki-laki, Om atau sepupu Laki-laki) melakukan poligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
52	Bila ada keluarga terdekat Anda yang memutuskan berpoligami, setujukah Anda?	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
53	Setuju atau tidak setujukah Anda, apabila Keluarga Anda (Kakek, Ayah, Kakak, Laki-laki, Adik Laki-laki, Om, Sepupu Laki-laki) yang berpoligami kemudian menyarankan orang lain untuk berpoligami juga	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
54	Bila keluarga terdekat Anda ada yang memiliki isteri lebih dari satu, kemudian menyarankan orang lain agar mengikuti apa yang keluarga terdekat Anda lakukan setujukah Anda	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
55	Setuju atau tidak setujukah Anda Apabila di lingkungan Anda tinggal ada Laki-laki yang mempraktekan poligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
56	Seberapa setujukah Anda bila hidup bertetangga dengan orang yang berpoligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
57	Setuju atau tidak setujukah Anda, apabila orang yang hidup dilingkungan Anda tinggal berpoligami kemudian menyarankan orang untuk berpoligami juga	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
58	Seberapa setujukah Anda, bila tetangga Anda ada yang	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>

	memiliki isteri lebih dari satu, kemudian menyarankan orang lain agar mengikuti apa yang tetangga Anda lakukan						
59	Setuju atau tidak setujukah Anda Apabila di masyarakat luas ada yang mempraktekan poligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
60	Seberapa setujukah Anda bila masyarakat luas banyak Laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu perempuan	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
61	Setuju atau tidak setujukah Anda, apabila di masyarakat luas ada yang berpoligami kemudian menyarankan orang untuk berpoligami juga	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
62	Seberapa setujukah Anda, bila di masyarakat luas ada yang memiliki isteri lebih dari satu, kemudian menyarankan orang lain agar mengikuti apa yang ia lakukan	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
63	Setuju atau tidak setujukah Anda Pemimpin Negara mempraktekan poligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
64	Seberapa setujukah Anda bila Pemimpin Negara memiliki isteri lebih dari satu perempuan	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
65	Setuju atau tidak setujukah Anda, apabila Pemimpin Negara berpoligami kemudian menyarankan orang untuk berpoligami juga	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
66	Seberapa setujukah Anda, bila Pemimpin Negara memiliki isteri lebih dari satu, kemudian menyarankan orang lain agar berpoligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>

#### V. PERSETUJUAN RESPONDEN TERHADAP LARANGAN POLIGAMI

Sejauh mana Anda Setuju atau Tidak setuju dengan pernyataan berikut?

Untuk setiap pernyataan berikut, apakah Anda akan menyatakan:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Agak Setuju
4. Setuju
5. Sangat Setuju

1. Sangat Tidak Setuju ..... 5. Sangat Setuju

67	Setuju atau tidak setujukah Anda Surat Kabar yang ada di Indonesia tidak perlu memuat berita-berita tentang poligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
68	Seberapa setujukah Anda apabila koran yang ada saat ini tidak seharusnya memberitakan masalah-masalah poligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
69	Setuju atau tidak setujukah Anda Stasiun Televisi yang ada di Indonesia tidak perlu memuat berita-berita tentang poligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>



70	Seberapa setujuakah Anda apabila RCTI,SCTV,TVONE, TPI, MetroTV, GlobalTV tidak memberitakan masalah-masalah yang berkaitan dengan poligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
71	Setuju atau tidak setujuakah Radio yang ada di Indonesia tidak perlu memuat berita-berita tentang poligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
72	Seberapa setujuakah Anda apabila Radio yang ada saat ini tidak seharusnya memberitakan masalah-masalah poligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
73	Seberapa setujuakah Anda dengan PP no 10 Tahun 1983 yang bertujuan mempersulit PNS dan pejabat negara memiliki isteri lebih dari 1	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
74	Setuju atau tidak setujuakah Anda dengan Peraturan Presiden yang dikeluarkan mantan Presiden Soeharto pada tahun 1983 yang berusaha mengatur praktek perkawinan khususnya poligami bagi PNS dan pejabat Negara	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
75	Setuju atau tidak setujuakah Anda dengan UU Perkawinan tahun 1974 yang memperbolehkan setiap laki-laki memiliki isteri lebih dari satu perempuan dengan syarat di izinkan oleh isteri tertua atau isteri tertua tidak dapat memberikan keturunan	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
76	Seberapa setujuakah anda dengan UU Perkawinan tahun 1974 yang tidak mempermasalahkan laki-laki menikah laki dengan syarat tertentu	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
77	Setuju atau tidak setujuakah anda dengan rencana pemerintah yang akan merivisi PP no 10 dan UU Pekawinan. Pemerintah berencana menerapkan larangan poligami tidak hanya untuk PNS dan Pejabat Negara tetapi juga untuk masyarakat luas	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
78	Seberapa setujuakah Anda dengan rencana pemerintah merevisi peraturan tentang poligami dan menerapkannya pada masyarakat luas tidak terbatas pada PNS dan Pejabat Negara	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
79	Setuju atau tidak setujukan Anda dengan himbauan tokoh Agama (Ustadz, Pendeta) untuk tidak berpoligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
80	Seberapa setujuakah Anda dengan tokoh Agama yang menginggalkan Anda untuk tidak memiliki isteri lebih dari satu perempuan	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>

#### VI. PERSETUJUAN RESPONDEN TERHADAP SANKSI POLIGAMI

Sejauh mana Anda Setuju atau Tidak setuju dengan pernyataan berikut?

Untuk setiap pernyataan berikut, apakah Anda akan menyatakan:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Agak Setuju
4. Setuju
5. Sangat Setuju

1. Sangat Tidak Setuju ..... 5. Sangat Setuju

81	Setuju atau tidak setujuakah anda Apabila Anda berpoligami kemudian masyarakat tidak menerima Anda dan perilaku	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
----	---	---	---	---	---	---	--------------------------

	poligami Anda dengan baik						
82	Seberapa setujuakah Anda bila masyarakat disekitar Anda sulit menerima Anda karena Anda berpoligami	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
83	Seberapa setujuakah Anda bila di masyarakat terdapat orang yang melakukan praktek poligami dan masyarakat tidak menerima dengan baik orang tersebut	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
84	Setuju atau tidak setujuakah Anda bila di masyarakat ada sebagian orang yang memutuskan berpoligami tetapi sulit diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat yang lain	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
85	Setujukah Anda bila Anda berpoligami harus dihukum penjara	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
86	Seberapa setujuakah Anda bila Anda memiliki isteri banyak Anda harus dihukum penjara	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
87	Seberapa setujuakah Anda bila di masyarakat terdapat orang yang melakukan praktek poligami dan orang tersebut harus di penjara	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
88	Setuju atau tidak setujuakah Anda bila di masyarakat ada sebagian orang yang memutuskan memiliki isteri lebih dari satu tetapi harus dipenjara	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
89	Setuju atau tidak setujuakah anda Apabila Pejabat Negara berpoligami kemudian masyarakat tidak menerima Pejabat Negara dan perilaku poligaminya dengan baik	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
90	Seberapa setujuakah Anda bila ada Pejabat Negara yang melakukan praktek poligami dan masyarakat tidak menerima dengan baik orang tersebut	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
91	Setujukah Anda bila Pejabat Negara berpoligami harus dihukum penjara	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
92	Seberapa setujuakah Anda bila Pejabat Negara yang memiliki isteri banyak harus dihukum penjara	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
93	Setujukah Anda bila Pejabat Negara berpoligami harus mendapatkan sanksi administratif (penurunan jabatan)	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>
94	Setujukah Anda bila Pejabat Negara berpoligami harus mendapatkan sanksi administratif (di non aktifkan dari jabatannya)	1	2	3	4	5	<input type="checkbox"/>

## VII. PERSETUJUAN RESPONDEN TERHADAP CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM POLIGAMI

Lingkari Pernyataan dibawah ini yang sesuai dengan pendapat Anda

95. Setujukah Anda jika pemerintah melakukan sensor terhadap Surat kabar (Koran) mengenai pemberitaan poligami yang ada di masyarakat

1. Saya setuju jika pemerintah melakukan sensor pemberitaan mengenai poligami yang ada di Surat Kabar
2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur dalam hal pemberitaan mengenai poligami di Surat Kabar
3. Saya setuju jika pemerintah tidak mensensor pemberitaan mengenai poligami yang ada di surat Kabar

96. Setujukah Anda jika pemerintah melakukan sensor terhadap Radio yang menyiarkan isu-isu poligami yang ada di masyarakat

1. Saya setuju jika pemerintah melakukan sensor pemberitaan atau isu-isu mengenai poligami yang disiarkan di Radio
2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur dalam hal pemberitaan mengenai poligami yang disiarkan di Radio
3. Saya setuju jika pemerintah tidak mensensor pemberitaan mengenai poligami yang ada disiarkan di Radio

97. Setujukah Anda jika pemerintah melakukan sensor terhadap Televisi yang menyiarkan dan menampilkan permasalahan poligami yang ada di masyarakat

1. Saya setuju jika pemerintah melakukan sensor pemberitaan atau permasalahan mengenai poligami yang disiarkan dan ditampilkan di Televisi
2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur dalam hal pemberitaan mengenai poligami yang disiarkan dan ditampilkan di Televisi
3. Saya setuju jika pemerintah tidak mensensor pemberitaan atau permasalahan mengenai poligami yang ada disiarkan dan ditampilkan di Televisi

98. Setujukah Anda jika pemerintah melakukan sensor terhadap situs-situs di Internet yang menampilkan permasalahan poligami yang ada di masyarakat

1. Saya setuju jika pemerintah melakukan sensor terhadap situs-situs internet yang menampilkan permasalahan mengenai poligami
2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur dalam hal permasalahan poligami yang beredar di Internet
3. Saya setuju jika pemerintah tidak mensensor situs-situs Internet yang menampilkan permasalahan poligami

99. Setujukah Anda jika pemerintah melarang para pemuka agama (Ustadz, Pendeta) berkhotbah mengenai poligami

1. Saya setuju jika pemerintah melarang pemuka agama berkhotbah mengenai poligami didepan jemaahnya maupun masyarakat yang lebih luas
2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur dalam khutbah yang diberikan oleh pemuka agama kepada jemaahnya ataupun masyarakat yang lebih luas
3. Saya setuju jika pemerintah tidak melarang para pemuka agama berkhotbah mengenai poligami didepan jemaahnya ataupun masyarakat yang lebih luas

100. Setujukah Anda jika pemerintah melarang tenaga pendidik (Guru, Dosen) mendiskusikan poligami dengan anak didiknya ataupun di masyarakat luas

1. Saya setuju jika pemerintah membatasi tenaga pendidik untuk tidak mendiskusikan poligami dengan anak didiknya maupun masyarakat luas
2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur dengan apa yang di diskusikan oleh tenaga pendidik dengan anak didiknya maupun dengan masyarakat luas
3. Saya setuju jika pemerintah membebaskan tenaga pendidik mendiskusikan masalah poligami dengan anak didiknya maupun masyarakat luas

101. Setujukah Anda jika pemerintah tidak mengizinkan Artis melakukan poligami

1. Saya setuju jika pemerintah melarang Artis berpoligami
2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur dengan urusan yang berkaitan dengan perkawinan warga negaranya
3. Saya setuju jika pemerintah membebaskan Artis untuk berpoligami

102. Setujukah Anda jika pemerintah tidak mengizinkan Pejabat Negara (Presiden, Menteri, Kepala Daerah, Bupati, Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RT) melakukan poligami
1. Saya setuju jika pemerintah melarang Pejabat Negara (Presiden, Menteri, Kepala Daerah, Bupati, Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RT) berpoligami
  2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur dengan urusan yang berkaitan dengan perkawinan warga negaranya
  3. Saya setuju jika pemerintah membebaskan Pejabat Negara ((Presiden, Menteri, Kepala Daerah, Bupati, Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RT) untuk berpoligami
103. Setujukah Anda jika pemerintah tidak mengizinkan Aparat Negara ( PNS) melakukan poligami
1. Saya setuju jika pemerintah melarang PNS berpoligami
  2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur dengan urusan yang berkaitan dengan perkawinan warga negaranya
  3. Saya setuju jika pemerintah membebaskan PNS untuk berpoligami
104. Setujukah Anda jika pemerintah tidak mengizinkan Pemuka Agama (Ustadz, Pendeta) melakukan poligami
1. Saya setuju jika pemerintah melarang Pemuka Agama (Ustadz, pendeta) berpoligami
  2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur dengan urusan yang berkaitan dengan perkawinan warga negaranya
  3. Saya setuju jika pemerintah membebaskan Pemuka Agama (Ustadz, pendeta) untuk berpoligami
105. Setujukah Anda jika pemerintah tidak mengizinkan Tenaga pendidik ( dosen, Guru) melakukan poligami
1. Saya setuju jika pemerintah melarang Tenaga Pendidik (Dosen, Guru) berpoligami
  2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur dengan urusan yang berkaitan dengan perkawinan warga negaranya
  3. Saya setuju jika pemerintah membebaskan Tenaga Pendidik (dosen, Guru) untuk berpoligami
106. Setujukah Anda jika pemerintah tidak mengizinkan Masyarakat Umum melakukan poligami
1. Saya setuju jika pemerintah melarang Masyarakat Umum berpoligami
  2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur dengan urusan yang berkaitan dengan perkawinan warga negaranya
  3. Saya setuju jika pemerintah membebaskan Masyarakat Umum untuk berpoligami
107. Setujukah Anda jika pemerintah menerbitkan peraturan tertulis seperti Peraturan pemerintah (PP), Undang-Undang (UU) atau Keputusan presiden (Keppres) untuk melarang poligami
1. Saya setuju jika pemerintah menerbitkan peraturan (PP, UU, Kepres) untuk melarang poligami
  2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur tangan dalam menerbitkan peraturan yang memperbolehkan atau melarang poligami
  3. Saya setuju jika pemerintah menerbitkan peraturan yang memperbolehkan poligami
108. Setujukah Anda jika pemerintah membuat konsensus (keepakatan bersama dengan Pemuka agama dan masyarakat umum) untuk melarang poligami
1. Saya setuju jika pemerintah berkonsensus dengan ulama dan masyarakat umum melarang poligami
  2. Saya setuju jika pemerintah tidak ikut campur tangan dalam bentuk apapun dalam memperbolehkan atau melarang poligami
  3. Saya setuju jika pemerintah berkonsensus dengan Pemuka Agama dan masyarakat memperbolehkan poligami
109. Setujukah Anda memberikan sanksi terhadap Artis yang berpoligami





**Statistics**

		Status Dalam Keluarga	Mencari informasi melalui Tabloid	Persetujuan memberikan sanksi bagi Tenaga Pendidik yang berpoligami	Persetujuan memberikan sanksi bagi Masyarakat Umum yang berpoligami
N	Valid	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0
	Mean		3.7575	1.7350	1.8000
	Std. Deviation		1.21135	.76893	.77879

**Statistics**

		Persetujuan memberikan sanksi bagi Pemuka Agama yang berpoligami	Persetujuan Televisi tidak memuat berita poligami	Persetujuan memberikan sanksi bagi Masyarakat Umum yang berpoligami	Persetujuan memberikan sanksi bagi Tenaga Pendidik yang berpoligami	Sanksi Administratif bagi Pejabat Negara yang berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	1.8025	3.0325			
	Std. Deviation	.76482	1.13121			

**Statistics**

		Persetujuan memberikan sanksi bagi Pemuka Agama yang berpoligami	Persetujuan memberikan sanksi bagi Aparat Negara yang berpoligami	Persetujuan sensor pemerintah di Radio	Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Pejabat Negara berpoligami	Persetujuan memberikan sanksi bagi Aparat Negara yang berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean			1.8350		1.6675
	Std. Deviation			.83638		.76708

**Statistics**

		Persetujuan bila pemerintah menerbitkan peraturan tertulis untuk melarang poligami	Persetujuan bila pemerintah menerbitkan peraturan tertulis untuk melarang poligami	Persetujuan memberikan sanksi bagi Pejabat Negara yang berpoligami	Persetujuan memberikan sanksi bagi artis yang berpoligami	Persetujuan memberikan sanksi bagi Pejabat Negara yang berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean		1.7200			1.6550
	Std. Deviation		.76029			.77296





**Statistics**

		Persetujuan bila pemerintah membuat konsensus melarang poligami	Persetujuan memberikan sanksi bagi artis yang berpoligami	Persetujuan bila pemerintah membuat konsensus melarang poligami	Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Masyarakat Umum berpoligami	Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Tenaga Pendidik berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean		1.7825	1.7425		
	Std. Deviation		.77569	.76332		

**Statistics**

		Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Masyarakat Umum berpoligami	Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Tenaga Pendidik berpoligami	Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Pemuka Agama berpoligami	Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Pemuka Agama berpoligami	Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Aparat Negara berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	1.7700	1.7100		1.7775	
	Std. Deviation	.76391	.75653		.76777	

**Statistics**

		Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Aparat Negara berpoligami	Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Pejabat Negara berpoligami	Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Artis berpoligami	Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Artis berpoligami	Persetujuan sensor pemerintah terhadap tenaga pengajar untuk tidak mendiskusikan poligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	1.6650	1.6550		1.7575	
	Std. Deviation	.76107	.74992		.74504	

**Statistics**

		Persetujuan sensor pemerintah terhadap tenaga pengajar untuk tidak mendiskusikan poligami	Persetujuan sensor pemerintah terhadap khutbah pemuka agama mengenai poligami	Persetujuan sensor pemerintah terhadap khutbah pemuka agama mengenai poligami	Persetujuan sensor pemerintah di SK	Persetujuan sensor pemerintah di Internet
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	1.8775		1.9150		
	Std. Deviation	.83621		.84532		

**Statistics**

		Persetujuan sensor pemerintah di Internet	Persetujuan sensor pemerintah di Televisi	Persetujuan sensor pemerintah di Televisi	Persetujuan sensor pemerintah di Radio	Persetujuan sensor pemerintah di SK
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	1.8400		1.8200		1.8300
	Std. Deviation	.84034		.83627		.83237

**Statistics**

		Sanksi Sosial bagi Pejabat Negara yang berpoligami	Sanksi penjara bagi Pejabat Negara yang berpoligami	Sanksi Administratif bagi Pejabat Negara yang berpoligami	Sanksi Administratif bagi Pejabat Negara yang berpoligami	Sanksi Administratif bagi Pejabat Negara yang berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	2.9425		3.1925	3.1925	
	Std. Deviation	1.16730		1.22237	1.22237	

**Statistics**

		Sanksi penjara bagi Pejabat Negara yang berpoligami	Sanksi penjara bagi Pejabat Negara yang berpoligami	Sanksi penjara bagi Pejabat Negara yang berpoligami	Sanksi penjara bila masyarakat berpoligami	Sanksi Sosial bagi Pejabat Negara yang berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	2.7275		2.7250	2.5400	
	Std. Deviation	1.16690		1.16738	1.20292	

**Statistics**

		Sanksi Sosial bagi Pejabat Negara yang berpoligami	Sanksi Sosial bagi Pejabat Negara yang berpoligami	Sanksi penjara bila masyarakat berpoligami	Sanksi penjara bila responden berpoligami	Sanksi penjara bila responden berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	2.9900				2.5200
	Std. Deviation	1.16761				1.19086

**Statistics**

		Sanksi penjara bila masyarakat berpoligami	Sanksi penjara bila masyarakat berpoligami	Sanksi penjara bila responden berpoligami	Sanksi penjara bila responden berpoligami	Persetujuan dengan rencana pemerintah merevisi aturan poligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	2.5450			2.5275	3.0950
	Std. Deviation	1.20690			1.18438	1.23076

**Statistics**

		Persetujuan pemuka agama mengimbau agar tidak berpoligami	Persetujuan sanksi sosial bagi masyarakat yang berpoligami	Persetujuan sanksi sosial bagi masyarakat yang berpoligami	Persetujuan sanksi sosial bagi masyarakat yang berpoligami	Persetujuan sanksi sosial bagi masyarakat yang berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	3.1650			2.8475	2.8425
	Std. Deviation	1.25767			1.11461	1.11391

**Statistics**

		Persetujuan sanksi bila responden berpoligami	Persetujuan pemuka agama mengimbau agar tidak berpoligami	Persetujuan dengan rencana pemerintah merevisi aturan poligami	Persetujuan sanksi bila responden berpoligami	Persetujuan sanksi bila responden berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	2.8675	3.1650	3.1100	2.8675	
	Std. Deviation	1.12611	1.25767	1.22950	1.12611	

**Statistics**

		Pegetahuan Responden tentang beda Poliandri dan poligami	Persetujuan sanksi bila responden berpoligami	Persetujuan pemuka agamamengh imbau agar tidak berpoligami	Persetujuan dengan UUP/74 mengenai poligami	Persetujuan dengan UUP/74 mengenai poligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	3.3750			3.1500	3.1550
	Std. Deviation	1.05696			1.10024	1.09954

**Statistics**

		Persetujuan pemuka agamamengh imbau agar tidak berpoligami	Persetujuan dengan rencana pemerintah merevisi aturan poligami	Persetujuan dengan rencana pemerintah merevisi aturan poligami	Persetujuan dengan PP no10/83	Persetujuan dengan UUP/74 mengenai poligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0

**Statistics**

		Persetujuan dengan UUP/74 mengenai poligami	Persetujuan dengan PP no10/83	Persetujuan dengan PP no10/83	Persetujuan dengan PP no10/83	Persetujuan Radio tidak memuat berita poligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean		3.2825	3.2825		3.0200
	Std. Deviation		1.15587	1.15587		1.12372

**Statistics**

		Persetujuan Radio tidak memuat berita poligami	Persetujuan Responden untuk berpoligami	Persetujuan Radio tidak memuat berita poligami	Persetujuan Televisi tidak memuat berita poligami	Persetujuan SK tidak memuat berita poligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean		2.2300			3.0275
	Std. Deviation		1.10006			1.11348

Statistics

		Persetujuan Radio tidak memuat berita poligami	Persetujuan Televisi tidak memuat berita poligami	Persetujuan SK tidak memuat berita poligami	Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami	Persetujuan SK tidak memuat berita poligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	3.0125	3.0325	3.0375	2.0425	
	Std. Deviation	1.12048	1.13121	1.09960	.99154	

Statistics

		Persetujuan SK tidak memuat berita poligami	Persetujuan Televisi tidak memuat berita poligami	Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami	Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami dan menyarankan ke orang lain
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0

Statistics

		Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami	Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas dan menyarankan ke orang lain
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	1.8450		2.0450	1.8450	2.1050
	Std. Deviation	.85017		.99269	.85017	.84899

Statistics

		Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas	Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden bila dirinya berpoligami dan menyarankan ke orang lain
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean				2.1175	
	Std. Deviation				.86346	

**Statistics**

		Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas	Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas	Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean		2.6500		2.1500	2.6575
	Std. Deviation		1.10705		.92447	1.10827

**Statistics**

		Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami	Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean				2.1475	
	Std. Deviation				.93698	

**Statistics**

		Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami	Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami	Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami	Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	2.6650	2.0650	2.6575		
	Std. Deviation	1.10944	.91809	1.11278		

Statistics

		Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami	Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami	Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami	Pemahaman Responden tentang arti poligami	Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	2.0150	2.2700			2.2725
	Std. Deviation	.88132	1.09091			1.10739

Statistics

		Persetujuan Responden bila dirinya berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden bila dirinya berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden bila dirinya berpoligami dan menyarankan ke orang lain	Persetujuan Responden untuk berpoligami	Persetujuan Responden untuk berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	1.9950		1.9600		2.2100
	Std. Deviation	.87572		.83074		1.09494

Statistics

		Pemahaman responden tentang sanksi sosial bagi pelaku poligami	Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan perkawinan	Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan keagamaan	Persetujuan Responden untuk berpoligami	Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan keagamaan
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0

Statistics

		Pemahaman Responden tentang aturan poligami yang ada di Indonesia	Pemahaman Responden tentang aturan poligami yang ada di Indonesia	Pemahaman Responden tentang aturan poligami yang ada di Indonesia	Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan perkawinan	Pemahaman Responden tentang aturan poligami yang ada di Indonesia
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean			2.8875		2.9200
	Std. Deviation			.92844		.93046

Statistics

		Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan keagamaan	Pemahaman responden tentang sanksi sosial bagi pelaku poligami	Pemahaman responden tentang sanksi sosial bagi pelaku poligami	Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan keagamaan	Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan perkawinan
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	2.9500	3.4650		2.9500	3.0375
	Std. Deviation	.93256	.94393		.93256	.99427

Statistics

		Pemahaman Responden tentang arti poligami	Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan perkawinan	Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal keutuhan keluarga	Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal keutuhan keluarga	Pemahaman Responden tentang arti poligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	3.8600	3.0875			
	Std. Deviation	.70116	1.00117			

Statistics

		Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal keutuhan keluarga	Pemahaman responden tentang sanksi sosial bagi pelaku poligami	Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal keutuhan keluarga	Pemahaman Responden tentang arti poligami	Pengetahuan Responden mengenai ketentuan agama di luar Islam tentang poligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	3.9275	3.4800	3.9350	3.8250	2.9975
	Std. Deviation	.68806	.92831	.69063	.73534	1.02963

Statistics

		Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal ekonomi	Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal ekonomi	Pengetahuan Responden mengenai ketentuan agama di luar Islam tentang poligami	Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal ekonomi	Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal ekonomi
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	3.9600				3.9375
	Std. Deviation	.67790				.70344



Statistics

		Pengetahuan Responden mengenai ketentuan agama di luar Islam tentang poligami	Pengetahuan responden tentang ketentuan PNS dan pejabat berpoligami	Pengetahuan Responden mengenai ketentuan agama di luar Islam tentang poligami	Pengetahuan Responden tentang Islam memperbolehkan poligami	Pengetahuan Responden tentang Islam memperbolehkan poligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	3.0050	3.3950			3.8600
	Std. Deviation	1.02597	.95722			.77905

Statistics

		Pengetahuan Responden tentang Islam memperbolehkan poligami	Pengetahuan Responden tentang Islam memperbolehkan poligami	Pengetahuan responden tentang ketentuan PNS dan pejabat berpoligami	Pengetahuan responden tentang ketentuan PNS dan pejabat berpoligami	Pengetahuan responden tentang ketentuan PNS dan pejabat berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean		3.8675		3.4150	
	Std. Deviation		.76577		.94870	

Statistics

		Pengetahuan Responden tentang ketentuan berpoligami	Pengetahuan Responden tentang ketentuan berpoligami	Intensitas melihat isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Televisi	Pengetahuan Responden tentang ketentuan berpoligami	Pengetahuan Responden tentang ketentuan berpoligami
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean		3.8900			3.8850
	Std. Deviation		.72402			.73014

Statistics

		Pegetahuan Responden tentang beda Poliandri dan poligami	Pegetahuan Responden tentang beda Poliandri dan poligami	Pegetahuan Responden tentang beda Poliandri dan poligami	Jenis Acara yang sering diikuti	Intensitas melihat isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Televisi
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean		3.3725			2.5325
	Std. Deviation		1.05666			.62844

Statistics

		Intensitas mendengar isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Radio	Mencari informasi melalui Televisi/televi si berbayar	Mencari informasi melalui Televisi/televi si berbayar	Intensitas mendengar isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Radio	Jenis Acara yang sering diikuti
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	3.1450		1.1325		
	Std. Deviation	.76841		.39412		

Statistics

		Mencari informasi melalui Radio	Mencari informasi melalui Radio	Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Internet	Mencari informasi melalui Internet	Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Internet
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean		2.5500			3.1400
	Std. Deviation		1.63683			.72575

Statistics

		Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Majalah	Mencari informasi melalui Internet	Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Majalah	Mencari informasi melalui Majalah	Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Tabloid
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	3.2375	2.8950		3.7225	
	Std. Deviation	.68357	1.69445		1.15925	

Statistics

		Mencari informasi melalui Majalah	Mencari informasi melalui Tabloid	Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Tabloid	Jenis kelamin	Usia
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean			3.2825		33.3325
	Std. Deviation			.71692		11.16529

**Statistics**

		Pendidikan Formal	Suku Bangsa	Agama	Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di koran	Intensitas Ibadah
N	Valid	400	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean					3.2175
	Std. Deviation					.71517

**Statistics**

		Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di koran	Mencari informasi melalui Koran	Mencari informasi melalui Koran	Responden Berpoligami	Alasan
N	Valid	400	400	400	399	1
	Missing	0	0	0	1	399
	Mean	3.0050	2.5500			
	Std. Deviation	.67164	1.52424			

**Statistics**

		Jabatan jika pegawai BUMN, Pengusaha dan pedagang	Saudara Berpoligami	Orangtua Berpoligami	Pekerjaan Utama	Status Rumah
N	Valid	187	399	395	400	400
	Missing	213	1	5	0	0

**Statistics**

		Jumlah Pekerja Rumah	Jumlah Tanggungan	Usia Pemikahan	Jumlah Anak	Status Pemikahan
N	Valid	101	150	257	223	400
	Missing	299	250	143	177	0
	Mean	1.1386	2.1733	10.6848	2.4484	
	Std. Deviation	.42496	.94653	9.94427	1.23237	

**Statistics**

		Aktivitas Keagamaan	Aktivitas Keagamaan	Intensitas Ibadah
N	Valid	400	400	400
	Missing	0	0	0
	Mean		2.4125	
	Std. Deviation		.74749	

**Frequency Table**

**Status Dalam Keluarga**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Orang Tua Laki-laki	138	34.5	34.5	34.5
	Orang tua perempuan	108	27.0	27.0	61.5
	Anak Laki-laki	78	19.5	19.5	81.0
	Anak Perempuan	76	19.0	19.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Tabloid**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	1.8	1.8	1.8
	2.00	78	19.5	19.5	21.3
	3.00	77	19.3	19.3	40.5
	4.00	81	20.3	20.3	60.8
	5.00	157	39.3	39.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan memberikan sanksi bagi Tenaga Pendidik yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	185	46.3	46.3	46.3
	2.00	136	34.0	34.0	80.3
	3.00	79	19.8	19.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan memberikan sanksi bagi Masyarakat Umum yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	169	42.3	42.3	42.3
	2.00	142	35.5	35.5	77.8
	3.00	89	22.3	22.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan memberikan sanksi bagi Pemuka Agama yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	164	41.0	41.0	41.0
	2.00	151	37.8	37.8	78.8
	3.00	85	21.3	21.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Televisi tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	31	7.8	7.8	7.8
	2.00	128	32.0	32.0	39.8
	3.00	66	16.5	16.5	56.3
	4.00	147	36.8	36.8	93.0
	5.00	28	7.0	7.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan memberikan sanksi bagi Masyarakat Umum yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah memberikan sanksi untuk masyarakat umum yang berpoligami	169	42.3	42.3	42.3
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	142	35.5	35.5	77.8
	Setuju jika pemerintah tidak memberikan sanksi bagi Masyarakat Umum yang berpoligami	89	22.3	22.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan memberikan sanksi bagi Tenaga Pendidik yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah memberikan sanksi untuk Tenaga Pendidik yang berpoligami	185	46.3	46.3	46.3
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	136	34.0	34.0	80.3
	Setuju jika pemerintah tidak memberikan sanksi bagi Tenaga Pendidik yang berpoligami	79	19.8	19.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi Administratif bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	32	8.0	8.0	8.0
	Tidak Setuju	115	28.8	28.8	36.8
	Agak Setuju	71	17.8	17.8	54.5
	Setuju	117	29.3	29.3	83.8
	Sangat Setuju	65	16.3	16.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan memberikan sanksi bagi Pemuka Agama yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah memberikan sanksi untuk Pemuka agamayang berpoligami	167	41.8	41.8	41.8
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	148	37.0	37.0	78.8
	Setuju jika pemerintah tidak memberikan sanksi bagi Pemuka agama yang berpoligami	85	21.3	21.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan memberikan sanksi bagi Aparat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah memberikan sanksi untuk Aparat Negara yang berpoligami	206	51.5	51.5	51.5
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	121	30.3	30.3	81.8
	Setuju jika pemerintah tidak membernkan sanksi bagi Aparat Negara yang berpoligami	73	18.3	18.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sensor pemerintah di Radio**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	178	44.5	44.5	44.5
	2.00	110	27.5	27.5	72.0
	3.00	112	28.0	28.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Pejabat Negara berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah melarang Pejabat Negara poligami	205	51.3	51.3	51.3
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	128	32.0	32.0	83.3
	Setuju jika pemerintah membebaskan Pejabat Negara berpoligami	67	16.8	16.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan memberikan sanksi bagi Aparat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	206	51.5	51.5	51.5
	2.00	121	30.3	30.3	81.8
	3.00	73	18.3	18.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan bila pemerintah menerbitkan peraturan tertulis untuk melarang poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju jika pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang poligami	187	46.8	46.8	46.8
	Setuju pemerintah tidak ikut campur	138	34.5	34.5	81.3
	Setuju jika pemerintah menerbitkan peraturan yang memperbolehkan poligami	75	18.8	18.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan bila pemerintah menerbitkan peraturan tertulis untuk melarang poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	187	46.8	46.8	46.8
	2.00	138	34.5	34.5	81.3
	3.00	75	18.8	18.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan memberikan sanksi bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah memberikan sanksi untuk Pejabat Negara yang berpoligami	212	53.0	53.0	53.0
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	114	28.5	28.5	81.5
	Setuju jika pemerintah tidak memberikan sanksi bagi Pejabat Negara yang berpoligami	74	18.5	18.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan memberikan sanksi bagi artis yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah memberikan sanksi untuk artis yang berpoligami	173	43.3	43.3	43.3
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	141	35.3	35.3	78.5
	Setuju jika pemerintah tidak memberikan sanksi bagi artis yang berpoligami	86	21.5	21.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan memberikan sanksi bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	212	53.0	53.0	53.0
	2.00	114	28.5	28.5	81.5
	3.00	74	18.5	18.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan bila pemerintah membuat konsensus melarang poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju jika pemerintah membuat konsensus yang melarang poligami	181	45.3	45.3	45.3
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	141	35.3	35.3	80.5
	Setuju jika pemerintah membuat konsensus yang memperbolehkan poligami	78	19.5	19.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	



**Persetujuan memberikan sanksi bagi artis yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	173	43.3	43.3	43.3
	2.00	141	35.3	35.3	78.5
	3.00	86	21.5	21.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan bila pemerintah membuat konsensus melarang poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	181	45.3	45.3	45.3
	2.00	141	35.3	35.3	80.5
	3.00	78	19.5	19.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Masyarakat Umum berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah melarang Masyarakat Umum poligami	173	43.3	43.3	43.3
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	146	36.5	36.5	79.8
	Setuju jika pemerintah membebaskan Masyarakat Umum berpoligami	81	20.3	20.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Tenaga Pendidik berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah melarang Tenaga pendidik poligami	189	47.3	47.3	47.3
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	138	34.5	34.5	81.8
	Setuju jika pemerintah membebaskan Tenaga pendidik berpoligami	73	18.3	18.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Masyarakat Umum berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	173	43.3	43.3	43.3
	2.00	146	36.5	36.5	79.8

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Masyarakat Umum berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	81	20.3	20.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Tenaga Pendidik berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	189	47.3	47.3	47.3
	2.00	138	34.5	34.5	81.8
	3.00	73	18.3	18.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Pemuka Agama berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah melarang Pemuka Agama poligami	172	43.0	43.0	43.0
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	145	36.3	36.3	79.3
	Setuju jika pemerintah membebaskan Pemuka Agama berpoligami	83	20.8	20.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Pemuka Agama berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	172	43.0	43.0	43.0
	2.00	145	36.3	36.3	79.3
	3.00	83	20.8	20.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Aparat Negara berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah melarang Aparat Negara poligami	205	51.3	51.3	51.3
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	124	31.0	31.0	82.3
	Setuju jika pemerintah membebaskan Aparat Negara berpoligami	71	17.8	17.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Aparat Negara  
berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	205	51.3	51.3	51.3
	2.00	124	31.0	31.0	82.3
	3.00	71	17.8	17.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Pejabat Negara  
berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	205	51.3	51.3	51.3
	2.00	128	32.0	32.0	83.3
	3.00	67	16.8	16.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Artis berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah melarang artis poligami	171	42.8	42.8	42.8
	Setuju jika pemerintah tidak ikut campur	155	38.8	38.8	81.5
	Setuju jika pemerintah membebaskan artis berpoligami	74	18.5	18.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan terhadap pemerintah mengizinkan Artis berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	171	42.8	42.8	42.8
	2.00	155	38.8	38.8	81.5
	3.00	74	18.5	18.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sensor pemerintah terhadap tenaga pengajar untuk tidak mendiskusikan poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju dengan sensor pemerintah	167	41.8	41.8	41.8
	Setuju pemerintah tidak ikut campur	115	28.8	28.8	70.5
	Setuju pemerintah tidak menyensor	118	29.5	29.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sensor pemerintah terhadap tenaga pengajar untuk tidak mendiskusikan poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	167	41.8	41.8	41.8
	2.00	115	28.8	28.8	70.5
	3.00	118	29.5	29.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sensor pemerintah terhadap khutbah pemuka agama mengenai poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju dengan sensor pemerintah	161	40.3	40.3	40.3
	Setuju pemerintah tidak ikut campur	112	28.0	28.0	68.3
	Setuju pemerintah tidak menyensor	127	31.8	31.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sensor pemerintah terhadap khutbah pemuka agama mengenai poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	161	40.3	40.3	40.3
	2.00	112	28.0	28.0	68.3
	3.00	127	31.8	31.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sensor pemerintah di SK**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju dengan sensor pemerintah	178	44.5	44.5	44.5
	Setuju pemerintah tidak ikut campur	112	28.0	28.0	72.5
	Setuju pemerintah tidak menyensor	110	27.5	27.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sensor pemerintah di Internet**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju dengan sensor pemerintah	178	44.5	44.5	44.5
	Setuju pemerintah tidak ikut campur	108	27.0	27.0	71.5

**Persetujuan sensor pemerintah di Internet**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju pemerintah tidak menyensor	114	28.5	28.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sensor pemerintah di Internet**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	178	44.5	44.5	44.5
	2.00	108	27.0	27.0	71.5
	3.00	114	28.5	28.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sensor pemerintah di Televisi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju dengan sensor pemerintah	184	46.0	46.0	46.0
	Setuju pemerintah tidak ikut campur	108	27.0	27.0	73.0
	Setuju pemerintah tidak menyensor	108	27.0	27.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sensor pemerintah di Televisi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	182	45.5	45.5	45.5
	2.00	108	27.0	27.0	72.5
	3.00	110	27.5	27.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sensor pemerintah di Radio**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju dengan sensor pemerintah	178	44.5	44.5	44.5
	Setuju pemerintah tidak ikut campur	110	27.5	27.5	72.0
	Setuju pemerintah tidak menyensor	112	28.0	28.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sensor pemerintah di SK**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	178	44.5	44.5	44.5
	2.00	112	28.0	28.0	72.5
	3.00	110	27.5	27.5	100.0
Total		400	100.0	100.0	

**Sanksi Sosial bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	37	9.3	9.3	9.3
	2.00	141	35.3	35.3	44.5
	3.00	62	15.5	15.5	60.0
	4.00	128	32.0	32.0	92.0
	5.00	32	8.0	8.0	100.0
Total		400	100.0	100.0	

**Sanksi penjara bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	40	10.0	10.0	10.0
	Tidak Setuju	182	45.5	45.5	55.5
	Agak Setuju	64	16.0	16.0	71.5
	Setuju	75	18.8	18.8	90.3
	Sangat Setuju	39	9.8	9.8	100.0
	Total		400	100.0	100.0

**Sanksi Administratif bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	29	7.3	7.3	7.3
	2.00	115	28.8	28.8	36.0
	3.00	71	17.8	17.8	53.8
	4.00	120	30.0	30.0	83.8
	5.00	65	16.3	16.3	100.0
Total		400	100.0	100.0	

**Sanksi Administratif bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	29	7.3	7.3	7.3
	2.00	115	28.8	28.8	36.0
	3.00	71	17.8	17.8	53.8
	4.00	120	30.0	30.0	83.8

**Sanksi Administratif bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	65	16.3	16.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi Administratif bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	29	7.3	7.3	7.3
	Tidak Setuju	115	28.8	28.8	36.0
	Agak Setuju	71	17.8	17.8	53.8
	Setuju	120	30.0	30.0	83.8
	Sangat Setuju	65	16.3	16.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi penjara bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	40	10.0	10.0	10.0
	2.00	182	45.5	45.5	55.5
	3.00	64	16.0	16.0	71.5
	4.00	75	18.8	18.8	90.3
	5.00	39	9.8	9.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi penjara bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	40	10.0	10.0	10.0
	Tidak Setuju	183	45.8	45.8	55.8
	Agak Setuju	63	15.8	15.8	71.5
	Setuju	75	18.8	18.8	90.3
	Sangat Setuju	39	9.8	9.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi penjara bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	40	10.0	10.0	10.0
	2.00	183	45.8	45.8	55.8
	3.00	63	15.8	15.8	71.5
	4.00	75	18.8	18.8	90.3
	5.00	39	9.8	9.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi penjara bila masyarakat berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	65	16.3	16.3	16.3
	2.00	188	47.0	47.0	63.3
	3.00	53	13.3	13.3	76.5
	4.00	54	13.5	13.5	90.0
	5.00	40	10.0	10.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi Sosial bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	35	8.8	8.8	8.8
	Tidak Setuju	135	33.8	33.8	42.5
	Agak Setuju	63	15.8	15.8	58.3
	Setuju	133	33.3	33.3	91.5
	Sangat Setuju	34	8.5	8.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi Sosial bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	35	8.8	8.8	8.8
	2.00	135	33.8	33.8	42.5
	3.00	63	15.8	15.8	58.3
	4.00	133	33.3	33.3	91.5
	5.00	34	8.5	8.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi Sosial bagi Pejabat Negara yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	35	8.8	8.8	8.8
	Tidak Setuju	143	35.8	35.8	44.5
	Agak Setuju	62	15.5	15.5	60.0
	Setuju	126	31.5	31.5	91.5
	Sangat Setuju	34	8.5	8.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi penjara bila masyarakat berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	65	16.3	16.3	16.3
	Tidak Setuju	186	46.5	46.5	62.8



**Sanksi penjara bila masyarakat berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Agak Setuju	53	13.3	13.3	76.0
	Setuju	56	14.0	14.0	90.0
	Sangat Setuju	40	10.0	10.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi penjara bila responden berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	67	16.8	16.8	16.8
	Tidak Setuju	184	46.0	46.0	62.8
	Agak Setuju	54	13.5	13.5	76.3
	Setuju	61	15.3	15.3	91.5
	Sangat Setuju	34	8.5	8.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi penjara bila responden berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	70	17.5	17.5	17.5
	2.00	181	45.3	45.3	62.8
	3.00	54	13.5	13.5	76.3
	4.00	61	15.3	15.3	91.5
	5.00	34	8.5	8.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi penjara bila masyarakat berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	65	16.3	16.3	16.3
	2.00	188	47.0	47.0	63.3
	3.00	51	12.8	12.8	76.0
	4.00	56	14.0	14.0	90.0
	5.00	40	10.0	10.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi penjara bila masyarakat berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	65	16.3	16.3	16.3
	Tidak Setuju	188	47.0	47.0	63.3
	Agak Setuju	51	12.8	12.8	76.0
	Setuju	56	14.0	14.0	90.0

**Sanksi penjara bila masyarakat berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	40	10.0	10.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi penjara bila responden berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	70	17.5	17.5	17.5
	Tidak Setuju	181	45.3	45.3	62.8
	Agak Setuju	54	13.5	13.5	76.3
	Setuju	61	15.3	15.3	91.5
	Sangat Setuju	34	8.5	8.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Sanksi penjara bila responden berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	67	16.8	16.8	16.8
	2.00	184	46.0	46.0	62.8
	3.00	54	13.5	13.5	76.3
	4.00	61	15.3	15.3	91.5
	5.00	34	8.5	8.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan dengan rencana pemerintah merevisi aturan poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	38	9.5	9.5	9.5
	2.00	125	31.3	31.3	40.8
	3.00	44	11.0	11.0	51.8
	4.00	147	36.8	36.8	88.5
	5.00	46	11.5	11.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan pemuka agama menghimbau agar tidak berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	40	10.0	10.0	10.0
	2.00	112	28.0	28.0	38.0
	3.00	46	11.5	11.5	49.5
	4.00	146	36.5	36.5	86.0
	5.00	56	14.0	14.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sanksi sosial bagi masyarakat yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	25	6.3	6.3	6.3
	Tidak Setuju	177	44.3	44.3	50.5
	Agak Setuju	66	16.5	16.5	67.0
	Setuju	100	25.0	25.0	92.0
	Sangat Setuju	32	8.0	8.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sanksi sosial bagi masyarakat yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	25	6.3	6.3	6.3
	Tidak Setuju	178	44.5	44.5	50.8
	Agak Setuju	66	16.5	16.5	67.3
	Setuju	99	24.8	24.8	92.0
	Sangat Setuju	32	8.0	8.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sanksi sosial bagi masyarakat yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	25	6.3	6.3	6.3
	2.00	176	44.0	44.0	50.3
	3.00	66	16.5	16.5	66.8
	4.00	101	25.3	25.3	92.0
	5.00	32	8.0	8.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sanksi sosial bagi masyarakat yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	25	6.3	6.3	6.3
	2.00	177	44.3	44.3	50.5
	3.00	66	16.5	16.5	67.0
	4.00	100	25.0	25.0	92.0
	5.00	32	8.0	8.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sanksi bila responden berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	23	5.8	5.8	5.8
	2.00	182	45.5	45.5	51.3

**Persetujuan sanksi bila responden berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	52	13.0	13.0	64.3
	4.00	111	27.8	27.8	92.0
	5.00	32	8.0	8.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan pemuka agama menghimbau agar tidak berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	40	10.0	10.0	10.0
	2.00	112	28.0	28.0	38.0
	3.00	46	11.5	11.5	49.5
	4.00	146	36.5	36.5	86.0
	5.00	56	14.0	14.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan dengan rencana pemerintah merevisi aturan poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	38	9.5	9.5	9.5
	2.00	122	30.5	30.5	40.0
	3.00	44	11.0	11.0	51.0
	4.00	150	37.5	37.5	88.5
	5.00	46	11.5	11.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sanksi bila responden berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	23	5.8	5.8	5.8
	2.00	182	45.5	45.5	51.3
	3.00	52	13.0	13.0	64.3
	4.00	111	27.8	27.8	92.0
	5.00	32	8.0	8.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sanksi bila responden berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	23	5.8	5.8	5.8
	Tidak Setuju	182	45.5	45.5	51.3
	Agak Setuju	52	13.0	13.0	64.3
	Setuju	111	27.8	27.8	92.0

**Persetujuan sanksi bila responden berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	32	8.0	8.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pegetahuan Responden tentang beda Poliandri dan poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	12	3.0	3.0	3.0
	2.00	102	25.5	25.5	28.5
	3.00	48	12.0	12.0	40.5
	4.00	200	50.0	50.0	90.5
	5.00	38	9.5	9.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan sanksi bila responden berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	23	5.8	5.8	5.8
	Tidak Setuju	182	45.5	45.5	51.3
	Agak Setuju	52	13.0	13.0	64.3
	Setuju	111	27.8	27.8	92.0
	Sangat Setuju	32	8.0	8.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan pemuka agamamenghimbau agar tidak berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	40	10.0	10.0	10.0
	Tidak Setuju	112	28.0	28.0	38.0
	Agak Setuju	46	11.5	11.5	49.5
	Setuju	146	36.5	36.5	86.0
	Sangat Setuju	56	14.0	14.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan dengan UUP/74 mengenai poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	28	7.0	7.0	7.0
	2.00	96	24.0	24.0	31.0
	3.00	100	25.0	25.0	56.0
	4.00	140	35.0	35.0	91.0
	5.00	36	9.0	9.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan dengan UUP/74 mengenai poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	28	7.0	7.0	7.0
	2.00	95	23.8	23.8	30.8
	3.00	100	25.0	25.0	55.8
	4.00	141	35.3	35.3	91.0
	5.00	36	9.0	9.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan pemuka agamamenghimbau agar tidak berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	40	10.0	10.0	10.0
	Tidak Setuju	112	28.0	28.0	38.0
	Agak Setuju	46	11.5	11.5	49.5
	Setuju	146	36.5	36.5	86.0
	Sangat Setuju	56	14.0	14.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan dengan rencana pemerintah merevisi aturan poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	38	9.5	9.5	9.5
	Tidak Setuju	122	30.5	30.5	40.0
	Agak Setuju	44	11.0	11.0	51.0
	Setuju	150	37.5	37.5	88.5
	Sangat Setuju	46	11.5	11.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan dengan rencana pemerintah merevisi aturan poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	38	9.5	9.5	9.5
	Tidak Setuju	122	30.5	30.5	40.0
	Agak Setuju	44	11.0	11.0	51.0
	Setuju	150	37.5	37.5	88.5
	Sangat Setuju	46	11.5	11.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan dengan PP no10/83**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	26	6.5	6.5	6.5
	Tidak Setuju	98	24.5	24.5	31.0

**Persetujuan dengan PP no10/83**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Agak Setuju	63	15.8	15.8	46.8
	Setuju	163	40.8	40.8	87.5
	Sangat Setuju	50	12.5	12.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan dengan UUP/74 mengenai poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	28	7.0	7.0	7.0
	Tidak Setuju	96	24.0	24.0	31.0
	Agak Setuju	100	25.0	25.0	56.0
	Setuju	140	35.0	35.0	91.0
	Sangat Setuju	36	9.0	9.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan dengan UUP/74 mengenai poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	28	7.0	7.0	7.0
	Tidak Setuju	95	23.8	23.8	30.8
	Agak Setuju	100	25.0	25.0	55.8
	Setuju	141	35.3	35.3	91.0
	Sangat Setuju	36	9.0	9.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan dengan PP no10/83**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	26	6.5	6.5	6.5
	2.00	98	24.5	24.5	31.0
	3.00	63	15.8	15.8	46.8
	4.00	163	40.8	40.8	87.5
	5.00	50	12.5	12.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan dengan PP no10/83**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	26	6.5	6.5	6.5
	2.00	98	24.5	24.5	31.0
	3.00	63	15.8	15.8	46.8
	4.00	163	40.8	40.8	87.5

**Persetujuan dengan PP no10/83**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	50	12.5	12.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan dengan PP no10/83**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	26	6.5	6.5	6.5
	Tidak Setuju	98	24.5	24.5	31.0
	Agak Setuju	63	15.8	15.8	46.8
	Setuju	163	40.8	40.8	87.5
	Sangat Setuju	50	12.5	12.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Radio tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	28	7.0	7.0	7.0
	2.00	135	33.8	33.8	40.8
	3.00	67	16.8	16.8	57.5
	4.00	141	35.3	35.3	92.8
	5.00	29	7.3	7.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Radio tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	28	7.0	7.0	7.0
	Tidak Setuju	135	33.8	33.8	40.8
	Agak Setuju	67	16.8	16.8	57.5
	Setuju	141	35.3	35.3	92.8
	Sangat Setuju	29	7.3	7.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden untuk berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	105	26.3	26.3	26.3
	2.00	185	46.3	46.3	72.5
	3.00	37	9.3	9.3	81.8
	4.00	59	14.8	14.8	96.5
	5.00	14	3.5	3.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	



**Persetujuan Radio tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	28	7.0	7.0	7.0
	Tidak Setuju	136	34.0	34.0	41.0
	Agak Setuju	67	16.8	16.8	57.8
	Setuju	141	35.3	35.3	93.0
	Sangat Setuju	28	7.0	7.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Televisi tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	31	7.8	7.8	7.8
	Tidak Setuju	128	32.0	32.0	39.8
	Agak Setuju	66	16.5	16.5	56.3
	Setuju	147	36.8	36.8	93.0
	Sangat Setuju	28	7.0	7.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan SK tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	28	7.0	7.0	7.0
	2.00	130	32.5	32.5	39.5
	3.00	73	18.3	18.3	57.8
	4.00	141	35.3	35.3	93.0
	5.00	28	7.0	7.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Radio tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	28	7.0	7.0	7.0
	2.00	136	34.0	34.0	41.0
	3.00	67	16.8	16.8	57.8
	4.00	141	35.3	35.3	93.0
	5.00	28	7.0	7.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Televisi tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	31	7.8	7.8	7.8
	2.00	128	32.0	32.0	39.8

**Persetujuan Televisi tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	66	16.5	16.5	56.3
	4.00	147	36.8	36.8	93.0
	5.00	28	7.0	7.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan SK tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	24	6.0	6.0	6.0
	2.00	134	33.5	33.5	39.5
	3.00	73	18.3	18.3	57.8
	4.00	141	35.3	35.3	93.0
	5.00	28	7.0	7.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	127	31.8	31.8	31.8
	2.00	186	46.5	46.5	78.3
	3.00	34	8.5	8.5	86.8
	4.00	49	12.3	12.3	99.0
	5.00	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan SK tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	28	7.0	7.0	7.0
	Tidak Setuju	130	32.5	32.5	39.5
	Agak Setuju	73	18.3	18.3	57.8
	Setuju	141	35.3	35.3	93.0
	Sangat Setuju	28	7.0	7.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan SK tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	24	6.0	6.0	6.0
	Tidak Setuju	134	33.5	33.5	39.5
	Agak Setuju	73	18.3	18.3	57.8
	Setuju	141	35.3	35.3	93.0

**Persetujuan SK tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	28	7.0	7.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Televisi tidak memuat berita poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	31	7.8	7.8	7.8
	Tidak Setuju	128	32.0	32.0	39.8
	Agak Setuju	66	16.5	16.5	56.3
	Setuju	147	36.8	36.8	93.0
	Sangat Setuju	28	7.0	7.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	127	31.8	31.8	31.8
	Tidak Setuju	185	46.3	46.3	78.0
	Agak Setuju	35	8.8	8.8	86.8
	Setuju	49	12.3	12.3	99.0
	Sangat Setuju	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	145	36.3	36.3	36.3
	Tidak Setuju	203	50.8	50.8	87.0
	Agak Setuju	25	6.3	6.3	93.3
	Setuju	23	5.8	5.8	99.0
	Sangat Setuju	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	145	36.3	36.3	36.3
	Tidak Setuju	203	50.8	50.8	87.0
	Agak Setuju	25	6.3	6.3	93.3
	Setuju	23	5.8	5.8	99.0

**Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	145	36.3	36.3	36.3
	2.00	203	50.8	50.8	87.0
	3.00	25	6.3	6.3	93.3
	4.00	23	5.8	5.8	99.0
	5.00	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	127	31.8	31.8	31.8
	Tidak Setuju	186	46.5	46.5	78.3
	Agak Setuju	34	8.5	8.5	86.8
	Setuju	49	12.3	12.3	99.0
	Sangat Setuju	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	127	31.8	31.8	31.8
	2.00	185	46.3	46.3	78.0
	3.00	35	8.8	8.8	86.8
	4.00	49	12.3	12.3	99.0
	5.00	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	145	36.3	36.3	36.3
	2.00	203	50.8	50.8	87.0
	3.00	25	6.3	6.3	93.3
	4.00	23	5.8	5.8	99.0

**Persetujuan Responden mengenai Pemimpin Negara berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	76	19.0	19.0	19.0
	2.00	250	62.5	62.5	81.5
	3.00	35	8.8	8.8	90.3
	4.00	34	8.5	8.5	98.8
	5.00	5	1.3	1.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	76	19.0	19.0	19.0
	Tidak Setuju	250	62.5	62.5	81.5
	Agak Setuju	35	8.8	8.8	90.3
	Setuju	34	8.5	8.5	98.8
	Sangat Setuju	5	1.3	1.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	76	19.0	19.0	19.0
	Tidak Setuju	248	62.0	62.0	81.0
	Agak Setuju	34	8.5	8.5	89.5
	Setuju	37	9.3	9.3	98.8
	Sangat Setuju	5	1.3	1.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	62	15.5	15.5	15.5
	Tidak Setuju	145	36.3	36.3	51.8
	Agak Setuju	65	16.3	16.3	68.0
	Setuju	124	31.0	31.0	99.0

**Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	76	19.0	19.0	19.0
	2.00	248	62.0	62.0	81.0
	3.00	34	8.5	8.5	89.5
	4.00	37	9.3	9.3	98.8
	5.00	5	1.3	1.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden bila dirinya berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	110	27.5	27.5	27.5
	Tidak Setuju	222	55.5	55.5	83.0
	Agak Setuju	32	8.0	8.0	91.0
	Setuju	32	8.0	8.0	99.0
	Sangat Setuju	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	64	16.0	16.0	16.0
	Tidak Setuju	143	35.8	35.8	51.8
	Agak Setuju	66	16.5	16.5	68.3
	Setuju	123	30.8	30.8	99.0
	Sangat Setuju	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	64	16.0	16.0	16.0
	2.00	143	35.8	35.8	51.8
	3.00	66	16.5	16.5	68.3
	4.00	123	30.8	30.8	99.0
	5.00	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	80	20.0	20.0	20.0
	Tidak Setuju	235	58.8	58.8	78.8
	Agak Setuju	36	9.0	9.0	87.8
	Setuju	41	10.3	10.3	98.0
	Sangat Setuju	8	2.0	2.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	80	20.0	20.0	20.0
	2.00	237	59.3	59.3	79.3
	3.00	34	8.5	8.5	87.8
	4.00	41	10.3	10.3	98.0
	5.00	8	2.0	2.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden mengenai praktek poligami di masyarakat luas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	64	16.0	16.0	16.0
	2.00	141	35.3	35.3	51.3
	3.00	67	16.8	16.8	68.0
	4.00	124	31.0	31.0	99.0
	5.00	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	84	21.0	21.0	21.0
	Tidak Setuju	231	57.8	57.8	78.8
	Agak Setuju	35	8.8	8.8	87.5
	Setuju	42	10.5	10.5	98.0
	Sangat Setuju	8	2.0	2.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	98	24.5	24.5	24.5
	Tidak Setuju	229	57.3	57.3	81.8
	Agak Setuju	25	6.3	6.3	88.0
	Setuju	43	10.8	10.8	98.8
	Sangat Setuju	5	1.3	1.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	63	15.8	15.8	15.8
	Tidak Setuju	146	36.5	36.5	52.3
	Agak Setuju	60	15.0	15.0	67.3
	Setuju	127	31.8	31.8	99.0
	Sangat Setuju	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	84	21.0	21.0	21.0
	2.00	231	57.8	57.8	78.8
	3.00	35	8.8	8.8	87.5
	4.00	42	10.5	10.5	98.0
	5.00	8	2.0	2.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	62	15.5	15.5	15.5
	Tidak Setuju	147	36.8	36.8	52.3
	Agak Setuju	60	15.0	15.0	67.3
	Setuju	127	31.8	31.8	99.0
	Sangat Setuju	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	



**Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	62	15.5	15.5	15.5
	2.00	145	36.3	36.3	51.8
	3.00	62	15.5	15.5	67.3
	4.00	127	31.8	31.8	99.0
	5.00	4	1.0	1.0	100.0
	Total		400	100.0	100.0

**Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	98	24.5	24.5	24.5
	2.00	231	57.8	57.8	82.3
	3.00	23	5.8	5.8	88.0
	4.00	43	10.8	10.8	98.8
	5.00	5	1.3	1.3	100.0
	Total		400	100.0	100.0

**Persetujuan Responden bila dilingkungan tempat tinggal ada yang berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	63	15.8	15.8	15.8
	2.00	146	36.5	36.5	52.3
	3.00	60	15.0	15.0	67.3
	4.00	127	31.8	31.8	99.0
	5.00	4	1.0	1.0	100.0
	Total		400	100.0	100.0

**Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	102	25.5	25.5	25.5
	Tidak Setuju	178	44.5	44.5	70.0
	Agak Setuju	36	9.0	9.0	79.0
	Setuju	78	19.5	19.5	98.5
	Sangat Setuju	6	1.5	1.5	100.0
	Total		400	100.0	100.0

**Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	102	25.5	25.5	25.5
	Tidak Setuju	235	58.8	58.8	84.3
	Agak Setuju	23	5.8	5.8	90.0
	Setuju	35	8.8	8.8	98.8
	Sangat Setuju	5	1.3	1.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	102	25.5	25.5	25.5
	2.00	235	58.8	58.8	84.3
	3.00	23	5.8	5.8	90.0
	4.00	35	8.8	8.8	98.8
	5.00	5	1.3	1.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	102	25.5	25.5	25.5
	2.00	178	44.5	44.5	70.0
	3.00	36	9.0	9.0	79.0
	4.00	78	19.5	19.5	98.5
	5.00	6	1.5	1.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	106	26.5	26.5	26.5
	Tidak Setuju	172	43.0	43.0	69.5
	Agak Setuju	35	8.8	8.8	78.3
	Setuju	81	20.3	20.3	98.5
	Sangat Setuju	6	1.5	1.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden tentang arti poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	3	.8	.8	.8
	Tidak Tahu	15	3.8	3.8	4.5

**Pemahaman Responden tentang arti poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	agak Tahu	67	16.8	16.8	21.3
	Tahu	265	66.3	66.3	87.5
	Sangat Tahu	50	12.5	12.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden bila keluarganya berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	106	26.5	26.5	26.5
	2.00	172	43.0	43.0	69.5
	3.00	35	8.8	8.8	78.3
	4.00	81	20.3	20.3	98.5
	5.00	6	1.5	1.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Respoden bila dirinya berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	110	27.5	27.5	27.5
	2.00	222	55.5	55.5	83.0
	3.00	32	8.0	8.0	91.0
	4.00	32	8.0	8.0	99.0
	5.00	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Respoden bila dirinya berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	108	27.0	27.0	27.0
	Tidak Setuju	234	58.5	58.5	85.5
	Agak Setuju	28	7.0	7.0	92.5
	Setuju	26	6.5	6.5	99.0
	Sangat Setuju	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Respoden bila dirinya berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	108	27.0	27.0	27.0
	2.00	234	58.5	58.5	85.5
	3.00	28	7.0	7.0	92.5

**Persetujuan Responden bila dirinya berpoligami dan menyarankan ke orang lain**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	26	6.5	6.5	99.0
	5.00	4	1.0	1.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden untuk berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	107	26.8	26.8	26.8
	Tidak Setuju	187	46.8	46.8	73.5
	Agak Setuju	35	8.8	8.8	82.3
	Setuju	57	14.3	14.3	96.5
	Sangat Setuju	14	3.5	3.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden untuk berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	107	26.8	26.8	26.8
	2.00	187	46.8	46.8	73.5
	3.00	35	8.8	8.8	82.3
	4.00	57	14.3	14.3	96.5
	5.00	14	3.5	3.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman responden tentang sanksi sosial bagi pelaku poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	3	.8	.8	.8
	Tidak Tahu	82	20.5	20.5	21.3
	agak Tahu	84	21.0	21.0	42.3
	Tahu	192	48.0	48.0	90.3
	Sangat Tahu	39	9.8	9.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan perkawinan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	13	3.3	3.3	3.3
	Tidak Tahu	131	32.8	32.8	36.0
	agak Tahu	87	21.8	21.8	57.8
	Tahu	152	38.0	38.0	95.8

**Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan perkawinan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tahu	17	4.3	4.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan keagamaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	8	2.0	2.0	2.0
	Tidak Tahu	152	38.0	38.0	40.0
	agak Tahu	100	25.0	25.0	65.0
	Tahu	132	33.0	33.0	98.0
	Sangat Tahu	8	2.0	2.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Persetujuan Responden untuk berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	105	26.3	26.3	26.3
	Tidak Setuju	185	46.3	46.3	72.5
	Agak Setuju	37	9.3	9.3	81.8
	Setuju	59	14.8	14.8	96.5
	Sangat Setuju	14	3.5	3.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan keagamaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	8	2.0	2.0	2.0
	Tidak Tahu	152	38.0	38.0	40.0
	agak Tahu	100	25.0	25.0	65.0
	Tahu	132	33.0	33.0	98.0
	Sangat Tahu	8	2.0	2.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden tentang aturan poligami yang ada di Indonesia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	7	1.8	1.8	1.8
	Tidak Tahu	163	40.8	40.8	42.5
	agak Tahu	111	27.8	27.8	70.3
	Tahu	106	26.5	26.5	96.8
	Sangat Tahu	13	3.3	3.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden tentang aturan poligami yang ada di Indonesia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	7	1.8	1.8	1.8
	Tidak Tahu	156	39.0	39.0	40.8
	agak Tahu	112	28.0	28.0	68.8
	Tahu	112	28.0	28.0	96.8
	Sangat Tahu	13	3.3	3.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden tentang aturan poligami yang ada di Indonesia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	1.8	1.8	1.8
	2.00	163	40.8	40.8	42.5
	3.00	111	27.8	27.8	70.3
	4.00	106	26.5	26.5	96.8
	5.00	13	3.3	3.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan perkawinan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	13	3.3	3.3	3.3
	Tidak Tahu	135	33.8	33.8	37.0
	agak Tahu	92	23.0	23.0	60.0
	Tahu	144	36.0	36.0	96.0
	Sangat Tahu	16	4.0	4.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden tentang aturan poligami yang ada di Indonesia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	1.8	1.8	1.8
	2.00	156	39.0	39.0	40.8
	3.00	112	28.0	28.0	68.8
	4.00	112	28.0	28.0	96.8
	5.00	13	3.3	3.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan keagamaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	8	2.0	2.0	2.0
	2.00	152	38.0	38.0	40.0

**Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan keagamaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	100	25.0	25.0	65.0
	4.00	132	33.0	33.0	98.0
	5.00	8	2.0	2.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman responden tentang sanksi scsial bagi pelaku poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	.8	.8	.8
	2.00	80	20.0	20.0	20.8
	3.00	84	21.0	21.0	41.8
	4.00	194	48.5	48.5	90.3
	5.00	39	9.8	9.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman responden tentang sanksi sosial bagi pelaku poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	3	.8	.8	.8
	Tidak Tahu	74	18.5	18.5	19.3
	agak Tahu	90	22.5	22.5	41.8
	Tahu	194	48.5	48.5	90.3
	Sangat Tahu	39	9.8	9.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan keagamaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	8	2.0	2.0	2.0
	2.00	152	38.0	36.0	40.0
	3.00	100	25.0	25.0	65.0
	4.00	132	33.0	33.0	98.0
	5.00	8	2.0	2.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan perkawinan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	13	3.3	3.3	3.3
	2.00	135	33.8	33.8	37.0

**Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan perkawinan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	92	23.0	23.0	60.0
	4.00	144	36.0	36.0	96.0
	5.00	16	4.0	4.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden tentang arti poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	.8	.8	.8
	2.00	15	3.8	3.8	4.5
	3.00	67	16.8	16.8	21.3
	4.00	265	66.3	66.3	87.5
	5.00	50	12.5	12.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan responden mengenai batasan negara dan urusan perkawinan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	13	3.3	3.3	3.3
	2.00	128	32.0	32.0	35.3
	3.00	87	21.8	21.8	57.0
	4.00	155	38.8	38.8	95.8
	5.00	17	4.3	4.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal keutuhan keluarga**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	23	5.8	5.8	5.8
	agak Tahu	41	10.3	10.3	16.0
	Tahu	278	69.5	69.5	85.5
	Sangat Tahu	58	14.5	14.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal keutuhan keluarga**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	23	5.8	5.8	5.8
	agak Tahu	40	10.0	10.0	15.8
	Tahu	277	69.3	69.3	85.0



**Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal keutuhan keluarga**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tahu	60	15.0	15.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden tentang arti poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		4	1.0	1.0	1.0
	Sangat Tidak tahu	3	.8	.8	1.8
	Tidak Tahu	15	3.8	3.8	5.5
	agak Tahu	67	16.8	16.8	22.3
	Tahu	261	65.3	65.3	87.5
	Sangat Tahu	50	12.5	12.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal keutuhan keluarga**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	23	5.8	5.8	5.8
	3.00	41	10.3	10.3	16.0
	4.00	278	69.5	69.5	85.5
	5.00	58	14.5	14.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman responden tentang sanksi sosial bagi pelaku poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	.8	.8	.8
	2.00	74	18.5	18.5	19.3
	3.00	90	22.5	22.5	41.8
	4.00	194	48.5	48.5	90.3
	5.00	39	9.8	9.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal keutuhan keluarga**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	23	5.8	5.8	5.8
	3.00	40	10.0	10.0	15.8
	4.00	277	69.3	69.3	85.0

**Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal keutuhan keluarga**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5.00	60	15.0	15.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden tentang arti poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	.8	.8	.8
	2.00	20	5.0	5.0	5.8
	3.00	71	17.8	17.8	23.5
	4.00	256	64.0	64.0	87.5
	5.00	50	12.5	12.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan Responden mengenai ketentuan agama di luar Islam tentang poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	16	4.0	4.0	4.0
	2.00	140	35.0	35.0	39.0
	3.00	97	24.3	24.3	63.3
	4.00	123	30.8	30.8	94.0
	5.00	24	6.0	6.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal ekonomi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	18	4.5	4.5	4.5
	3.00	46	11.5	11.5	16.0
	4.00	270	67.5	67.5	83.5
	5.00	66	16.5	16.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal ekonomi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	18	4.5	4.5	4.5
	agak Tahu	46	11.5	11.5	16.0
	Tahu	270	67.5	67.5	83.5
	Sangat Tahu	66	16.5	16.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan Responden mengenai ketentuan agama di luar Islam tentang poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	15	3.8	3.8	3.8
	Tidak Tahu	140	35.0	35.0	38.8
	agak Tahu	97	24.3	24.3	63.0
	Tahu	124	31.0	31.0	94.0
	Sangat Tahu	24	6.0	6.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal ekonomi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	19	4.8	4.8	4.8
	agak Tahu	46	11.5	11.5	16.3
	Tahu	270	67.5	67.5	83.8
	Sangat Tahu	65	16.3	16.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pemahaman Responden mengenai dampak poligami dalam hal ekonomi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	22	5.5	5.5	5.5
	3.00	46	11.5	11.5	17.0
	4.00	267	66.8	66.8	83.8
	5.00	65	16.3	16.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan Responden mengenai ketentuan agama di luar Islam tentang poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	15	3.8	3.8	3.8
	2.00	140	35.0	35.0	38.8
	3.00	97	24.3	24.3	63.0
	4.00	124	31.0	31.0	94.0
	5.00	24	6.0	6.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan responden tentang ketentuan PNS dan pejabat berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	1.0	1.0	1.0
	2.00	93	23.3	23.3	24.3
	3.00	74	18.5	18.5	42.8

**Pengetahuan responden tentang ketentuan PNS dan pejabat berpoligami**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	199	49.8	49.8	92.5
5.00	30	7.5	7.5	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan Responden mengenai ketentuan agama di luar Islam tentang poligami**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak tahu	16	4.0	4.0	4.0
Tidak Tahu	140	35.0	35.0	39.0
agak Tahu	97	24.3	24.3	63.3
Tahu	123	30.8	30.8	94.0
Sangat Tahu	24	6.0	6.0	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan Responden tentang Islam memperbolehkan poligami**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak tahu	2	.5	.5	.5
Tidak Tahu	27	6.8	6.8	7.3
agak Tahu	60	15.0	15.0	22.3
Tahu	247	61.8	61.8	84.0
Sangat Tahu	64	16.0	16.0	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan Responden tentang Islam memperbolehkan poligami**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	.5	.5	.5
2.00	27	6.8	6.8	7.3
3.00	60	15.0	15.0	22.3
4.00	247	61.8	61.8	84.0
5.00	64	16.0	16.0	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan Responden tentang Islam memperbolehkan poligami**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak tahu	1	.3	.3	.3
Tidak Tahu	27	6.8	6.8	7.0
agak Tahu	60	15.0	15.0	22.0
Tahu	248	62.0	62.0	84.0

**Pengetahuan Responden tentang Islam memperbolehkan poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tahu	64	16.0	16.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan Responden tentang Islam memperbolehkan poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	.3	.3	.3
	2.00	27	6.8	6.8	7.0
	3.00	60	15.0	15.0	22.0
	4.00	248	62.0	62.0	84.0
	5.00	64	16.0	16.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan responden tentang ketentuan PNS dan pejabat berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	4	1.0	1.0	1.0
	Tidak Tahu	89	22.3	22.3	23.3
	agak Tahu	74	18.5	18.5	41.8
	Tahu	203	50.8	50.8	92.5
	Sangat Tahu	30	7.5	7.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan responden tentang ketentuan PNS dan pejabat berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	1.0	1.0	1.0
	2.00	89	22.3	22.3	23.3
	3.00	74	18.5	18.5	41.8
	4.00	203	50.8	50.8	92.5
	5.00	30	7.5	7.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan responden tentang ketentuan PNS dan pejabat berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	4	1.0	1.0	1.0
	Tidak Tahu	93	23.3	23.3	24.3
	agak Tahu	74	18.5	18.5	42.8
	Tahu	199	49.8	49.8	92.5
	Sangat Tahu	30	7.5	7.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan Responden tentang ketentuan berpoligami**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak tahu	3	.8	.8	.8
Tidak Tahu	24	6.0	6.0	6.8
agak Tahu	51	12.8	12.8	19.5
Tahu	266	66.5	66.5	86.0
Sangat Tahu	56	14.0	14.0	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan Responden tentang ketentuan berpoligami**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	3	.8	.8	.8
2.00	20	5.0	5.0	5.8
3.00	51	12.8	12.8	18.5
4.00	270	67.5	67.5	86.0
5.00	56	14.0	14.0	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas melihat isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Televisi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Sering	13	3.3	3.3	3.3
Sering	179	44.8	44.8	48.0
Jarang	192	48.0	48.0	96.0
Tidak Pernah	16	4.0	4.0	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan Responden tentang ketentuan berpoligami**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak tahu	3	.8	.8	.8
Tidak Tahu	20	5.0	5.0	5.8
agak Tahu	48	12.0	12.0	17.8
Tahu	274	68.5	68.5	86.3
Sangat Tahu	55	13.8	13.8	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Pengetahuan Responden tentang ketentuan berpoligami**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	3	.8	.8	.8
2.00	22	5.5	5.5	6.3
3.00	48	12.0	12.0	18.3

**Pengetahuan Responden tentang ketentuan berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	272	68.0	68.0	86.3
	5.00	55	13.8	13.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pegetahuan Responden tentang beda Poliandri dan poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	12	3.0	3.0	3.0
	Tidak Tahu	100	25.0	25.0	28.0
	agak Tahu	55	13.8	13.8	41.8
	Tahu	193	48.3	48.3	90.0
	Sangat Tahu	40	10.0	10.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pegetahuan Responden tentang beda Poliandri dan poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	12	3.0	3.0	3.0
	2.00	100	25.0	25.0	28.0
	3.00	55	13.8	13.8	41.8
	4.00	193	48.3	48.3	90.0
	5.00	40	10.0	10.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pegetahuan Responden tentang beda Poliandri dan poligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak tahu	12	3.0	3.0	3.0
	Tidak Tahu	104	26.0	26.0	29.0
	agak Tahu	48	12.0	12.0	41.0
	Tahu	198	49.5	49.5	90.5
	Sangat Tahu	38	9.5	9.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Jenis Acara yang sering diikuti**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berita/Informasi	73	18.3	18.3	18.3
	Hiburan	60	15.0	15.0	33.3
	Berita dan Hiburan	262	65.5	65.5	98.8
	Tidak Mengikuti	5	1.3	1.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas melihat isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Televisi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	13	3.3	3.3	3.3
	2.00	177	44.3	44.3	47.5
	3.00	194	48.5	48.5	96.0
	4.00	16	4.0	4.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas mendengar isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Radio**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	6	1.5	1.5	1.5
	2.00	75	18.8	18.8	20.3
	3.00	174	43.5	43.5	63.8
	4.00	145	36.3	36.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Televisi/televisi berbayar**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setiap hari	353	88.3	88.3	88.3
	Beberapa hari dalam seminggu	40	10.0	10.0	98.3
	1xseminggu	6	1.5	1.5	99.8
	<4kali sebulan	1	.3	.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas mendengar isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Radio**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Sering	8	2.0	2.0	2.0
	Sering	75	18.8	16.8	20.8
	Jarang	173	43.3	43.3	64.0
	Tidak Pernah	144	36.0	36.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Televisi/televisi berbayar**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	354	88.5	88.5	88.5
	2.00	40	10.0	10.0	98.5
	3.00	5	1.3	1.3	99.8



**Mencari informasi melalui Televisi/televisi berbayar**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	1	.3	.3	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas mendengar isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Radio**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Sering	8	2.0	2.0	2.0
Sering	75	18.8	18.8	20.8
Jarang	173	43.3	43.3	64.0
Tidak Pernah	144	36.0	36.0	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Jenis Acara yang sering diikuti**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Berita/Informasi	45	11.3	11.3	11.3
Hiburan	68	17.0	17.0	28.3
Berita dan Hiburan	188	47.0	47.0	75.3
Tidak Mengikuti	99	24.8	24.8	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Radio**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setiap hari	156	39.0	39.0	39.0
Beberapa hari dalam seminggu	102	25.5	25.5	64.5
1xseminggu	3	.8	.8	65.3
<4kali sebulan	45	11.3	11.3	76.5
Tidak Pernah	94	23.5	23.5	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Radio**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	156	39.0	39.0	39.0
2.00	102	25.5	25.5	64.5
3.00	3	.8	.8	65.3
4.00	44	11.0	11.0	76.3
5.00	95	23.8	23.8	100.0
Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Internet**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sering	81	20.3	20.3	20.3
	Jarang	182	45.5	45.5	65.8
	Tidak Pernah	137	34.3	34.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Internet**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setiap hari	130	32.5	32.5	32.5
	Beberapa hari dalam seminggu	76	19.0	19.0	51.5
	1xseminggu	30	7.5	7.5	59.0
	<4kali sebulan	34	8.5	8.5	67.5
	Tidak Pernah	130	32.5	32.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Internet**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	81	20.3	20.3	20.3
	3.00	182	45.5	45.5	65.8
	4.00	137	34.3	34.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Majalah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	57	14.3	14.3	14.3
	3.00	191	47.8	47.8	62.0
	4.00	152	38.0	38.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Internet**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	130	32.5	32.5	32.5
	2.00	76	19.0	19.0	51.5
	3.00	30	7.5	7.5	59.0
	4.00	34	8.5	8.5	67.5
	5.00	130	32.5	32.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Majalah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sering	57	14.3	14.3	14.3
	Jarang	191	47.8	47.8	62.0
	Tidak Pernah	152	38.0	38.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Majalah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	.8	.8	.8
	2.00	83	20.8	20.8	21.5
	3.00	72	18.0	18.0	39.5
	4.00	106	26.5	26.5	66.0
	5.00	136	34.0	34.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Tabloid**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sering	62	15.5	15.5	15.5
	Jarang	163	40.8	40.8	56.3
	Tidak Pernah	175	43.8	43.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Majalah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setiap hari	3	.8	.8	.8
	Beberapa hari dalam seminggu	83	20.8	20.8	21.5
	1xseminggu	72	18.0	18.0	39.5
	<4kali sebulan	106	26.5	26.5	66.0
	Tidak Pernah	136	34.0	34.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Majalah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setiap hari	3	.8	.8	.8
	Beberapa hari dalam seminggu	83	20.8	20.8	21.5
	1xseminggu	72	18.0	18.0	39.5
	<4kali sebulan	106	26.5	26.5	66.0

**Mencari informasi melalui Majalah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	136	34.0	34.0	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Tabloid**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setiap hari	7	1.8	1.8	1.8
	Beberapa hari dalam seminggu	78	19.5	19.5	21.3
	1xseminggu	77	19.3	19.3	40.5
	<4kali sebulan	81	20.3	20.3	60.8
	Tidak Pernah	157	39.3	39.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di Tabloid**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	62	15.5	15.5	15.5
	3.00	163	40.8	40.8	56.3
	4.00	175	43.8	43.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Jenis kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	209	52.3	52.3	52.3
	Perempuan	191	47.8	47.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Usia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17.00	8	2.0	2.0	2.0
	18.00	3	.8	.8	2.8
	19.00	10	2.5	2.5	5.3
	20.00	26	6.5	6.5	11.8
	21.00	8	2.0	2.0	13.8
	22.00	31	7.8	7.8	21.5
	23.00	10	2.5	2.5	24.0
	24.00	13	3.2	3.3	27.3
	25.00	8	2.0	2.0	29.3
	26.00	9	2.3	2.3	31.5

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	27.00	19	4.8	4.8	36.3
	28.00	17	4.3	4.3	40.5
	29.00	15	3.8	3.8	44.3
	30.00	27	6.8	6.8	51.0
	31.00	8	2.0	2.0	53.0
	32.00	14	3.5	3.5	56.5
	33.00	7	1.8	1.8	58.3
	34.00	4	1.0	1.0	59.3
	35.00	11	2.8	2.8	62.0
	36.00	7	1.8	1.8	63.8
	37.00	7	1.8	1.8	65.5
	38.00	9	2.3	2.3	67.8
	39.00	10	2.5	2.5	70.3
	40.00	13	3.3	3.3	73.5
	41.00	8	2.0	2.0	75.5
	42.00	7	1.8	1.8	77.3
	43.00	8	2.0	2.0	79.3
	44.00	4	1.0	1.0	80.3
	45.00	13	3.3	3.3	83.5
	46.00	4	1.0	1.0	84.5
	47.00	8	2.0	2.0	86.5
	48.00	5	1.3	1.3	87.8
	49.00	4	1.0	1.0	88.8
	50.00	9	2.3	2.3	91.0
	51.00	2	.5	.5	91.5
	52.00	7	1.8	1.8	93.3
	53.00	6	1.5	1.5	94.8
	54.00	6	1.5	1.5	96.3
	55.00	3	.8	.8	97.0
	56.00	2	.5	.5	97.5
	57.00	6	1.5	1.5	99.0
	59.00	1	.3	.3	99.3
	65.00	1	.3	.3	99.5
	67.00	1	.3	.3	99.8
	71.00	1	.3	.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Pendidikan Formal**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	5	1.3	1.3	1.3
	Tamat PascaSarjana	2	.5	.5	1.8
	Tidak Tamat SD	2	.5	.5	2.3
	Tamat SD	8	2.0	2.0	4.3
	Tamat SLTP	14	3.5	3.5	7.8
	Tamat Madrasah Tsanawiyah	4	1.0	1.0	8.8
	Tamat SLTA	175	43.8	43.8	52.5
	Tamat Madrasah Aliyah	51	12.8	12.8	65.3
	Tamat Perguruan Tinggi	139	34.8	34.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Suku Bangsa**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jawa	113	28.3	28.3	28.3
	Campuran	78	19.5	19.5	47.8
	Betawi	57	14.3	14.3	62.0
	Sunda	62	15.5	15.5	77.5
	Cina/Tiongoa	23	5.8	5.8	83.3
	Batak/Tapanuli	10	2.5	2.5	85.8
	Minang/Padang	29	7.3	7.3	93.0
	Bugis/makasar	15	3.8	3.8	96.8
	Melayu	12	3.0	3.0	99.8
	Ambon	1	.3	.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Agama**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Islam	275	68.8	68.8	68.8
	Kristen Protestan	75	18.8	18.8	87.5
	Kristen Katholik	50	12.5	12.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di koran**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sering	89	22.3	22.3	22.3
	Jarang	220	55.0	55.0	77.3
	Tidak Pernah	91	22.8	22.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas Ibadah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	68	17.0	17.0	17.0
	3.00	177	44.3	44.3	61.3
	4.00	155	38.8	38.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Intensitas membaca isu poligami artis, pejabat dan masyarakat umum di koran**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	89	22.3	22.3	22.3
	3.00	220	55.0	55.0	77.3
	4.00	91	22.8	22.8	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Koran**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	143	35.8	35.8	35.8
	2.00	91	22.8	22.8	58.5
	3.00	43	10.8	10.8	69.3
	4.00	49	12.3	12.3	81.5
	5.00	74	18.5	18.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Mencari informasi melalui Koran**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setiap hari	143	35.8	35.8	35.8
	Beberapa hari dalam seminggu	91	22.8	22.8	58.5
	1xseminggu	43	10.8	10.8	69.3
	<4kali sebulan	49	12.3	12.3	81.5
	Tidak Pernah	74	18.5	18.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Responden Berpoligami**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1	.3	.3	.3
	Tidak	398	99.5	99.7	100.0
	Total	399	99.8	100.0	
Missing	99	1	.3		
	Total	400	100.0		

### Alasan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Agama	1	.3	100.0	100.0
Missing	99	399	99.8		
	Total	400	100.0		

### Jabatan jika pegawai BUMN, Pengusaha dan pedagang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tenaga lepas/honorar	3	.8	1.6	1.6
	Pemilik Usaha	50	12.5	26.7	28.3
	Karyawan Biasa	104	26.0	55.6	84.0
	Kepala Bagian/supervisor	23	5.8	12.3	96.3
	Asisten Manajer	7	1.8	3.7	100.0
	Total	187	46.8	100.0	
Missing	99	213	53.3		
	Total	400	100.0		

### Saudara Berpoligami

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	72	18.0	18.0	18.0
	Tidak	314	78.5	78.7	96.7
	Tidak Tahu	13	3.3	3.3	100.0
	Total	399	99.8	100.0	
Missing	99	1	.3		
	Total	400	100.0		

### Orangtua Berpoligami

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	53	13.3	13.4	13.4
	Tidak	342	85.5	86.6	100.0
	Total	395	98.8	100.0	
Missing	99	5	1.3		
	Total	400	100.0		

### Pekerjaan Utama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pengusaha/Wirausaha	27	6.8	6.8	6.8
	Karyawan Lepas/Honorar	33	8.3	8.3	15.0
	Mahasiswa/Pelajar	59	14.8	14.8	29.8
	Ibu Rumah Tangga	34	8.5	8.5	38.3



**Pekerjaan Utama**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Bekerja	13	3.3	3.3	41.5
	TNI/Polri berpangkat prajurit	17	4.3	4.3	45.8
	PNS dibawah Golongan IIIA	22	5.5	5.5	51.3
	PNS diatas golongan III	7	1.8	1.8	53.0
	Karyawan BUMN	11	2.8	2.8	55.8
	Karyawan Swasta Nasional	90	22.5	22.5	78.3
	Karyawan swasta asing	20	5.0	5.0	83.3
	Staff/Pegawai/aktivis lembaga sosial Non Pemerintah	38	9.5	9.5	92.8
	Pedagang	29	7.3	7.3	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Status Rumah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		1	.3	.3	.3
	Milik sendiri	168	42.0	42.0	42.3
	Sewa/kontrak	78	19.5	19.5	61.8
	Menumpang Ortu/Saudara/Teman	143	35.8	35.8	97.5
	Lainnya	10	2.5	2.5	100.0
	Total	400	100.0	100.0	

**Jumlah Pekerja Rumah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	90	22.5	89.1	89.1
	2.00	8	2.0	7.9	97.0
	3.00	3	.8	3.0	100.0
	Total	101	25.3	100.0	
Missing	99.00	299	74.8		
	Total	400	100.0		

**Jumlah Tanggungan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	41	10.3	27.3	27.3
	2.00	57	14.3	38.0	65.3
	3.00	37	9.3	24.7	90.0
	4.00	15	3.8	10.0	100.0

Jumlah Tanggungan

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	Total	150	37.5	100.0
Missing	99.00	250	62.5	
	Total	400	100.0	

Usia Pernikahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	22	5.5	8.6	8.6
	2.00	33	8.3	12.8	21.4
	3.00	20	5.0	7.8	29.2
	4.00	21	5.3	8.2	37.4
	5.00	20	5.0	7.8	45.1
	6.00	4	1.0	1.6	46.7
	7.00	2	.5	.8	47.5
	8.00	26	6.5	10.1	57.6
	9.00	6	1.5	2.3	59.9
	10.00	9	2.3	3.5	63.4
	11.00	6	1.5	2.3	65.8
	12.00	6	1.5	2.3	68.1
	13.00	10	2.5	3.9	72.0
	14.00	3	.8	1.2	73.2
	15.00	3	.8	1.2	74.3
	16.00	6	1.5	2.3	76.7
	17.00	4	1.0	1.6	78.2
	18.00	4	1.0	1.6	79.8
	20.00	13	3.3	5.1	84.8
	22.00	2	.5	.8	85.6
	23.00	1	.3	.4	86.0
	24.00	2	.5	.8	86.8
	25.00	9	2.3	3.5	90.3
	30.00	9	2.3	3.5	93.8
	31.00	5	1.3	1.9	95.7
	33.00	4	1.0	1.6	97.3
	35.00	1	.3	.4	97.7
36.00	1	.3	.4	98.1	
40.00	1	.3	.4	98.4	
41.00	3	.8	1.2	99.6	
42.00	1	.3	.4	100.0	
	Total	257	64.3	100.0	
Missing	99.00	143	35.8		
	Total	400	100.0		